



KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (KUA)

KABUPATEN BANTUL

TAHUN ANGGARAN 2027

**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN
ASET DAERAH**



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR : B/900.1.1/05890/DPRD/2026
NOMOR : B/900.1.1/00498/DPRD/2026

TENTANG

KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2027

Yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : ABDUL HALIM MUSLIH
Jabatan : Bupati Bantul
Alamat Kantor : Jalan Robert Wolter Monginsidi Nomor 1 Bantul

bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Bantul, yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. a. Nama : H. HANUNG RAHARJO
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Bantul
Alamat Kantor : Jalan Jenderal Sudirman Nomor 85 Bantul
- b. Nama : SURADAL
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bantul
Alamat Kantor : Jalan Jenderal Sudirman Nomor 85 Bantul
- c. Nama : TITIS AJENG GANIS MARETI
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bantul
Alamat Kantor : Jalan Jenderal Sudirman Nomor 85 Bantul
- d. Nama : AGUNG LAKSMONO
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bantul
Alamat Kantor : Jalan Jenderal Sudirman Nomor 85 Bantul

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2027.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2027, terhadap kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2027.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2027 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan dan pembahasan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2027.

Bantul, 10 Agustus 2026.

BUPATI BANTUL
Selaku,
PIHAK PERTAMA

ABDUL HALIM MUSLIH

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANTUL

Selaku,
PIHAK KEDUA

H. HANUNG RAHARJO
KETUA


SURADAL
WAKIL KETUA


TITIS AJENG GANIS MARETI
WAKIL KETUA


AGUNG LAKSMONO
WAKIL KETUA

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL.....	ii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)	1
1.2. Tujuan Penyusunan KUA.....	3
1.3. Dasar Hukum Penyusunan KUA	3
1.4. Sistematika.....	7
BAB II. KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH	8
2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	8
2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah.....	21
BAB III. ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)	27
3.1. Asumsi Dasar yang digunakan dalam APBN	27
3.2. Asumsi Dasar yang digunakan dalam APBD	33
BAB IV. KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH.....	38
4.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang Diproyeksikan untuk Tahun Anggaran 2027	38
4.2. Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	42
BAB V. KEBIJAKAN BELANJA DAERAH	49
5.1. Kebijakan Terkait dengan Perencanaan Belanja	49
5.2. Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer, dan Belanja Tidak Terduga	55
5.3. Standar Pelayanan Minimal (SPM).....	58
5.4. Dana Keistimewaan	62
BAB VI. KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH	74
6.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan.....	74
6.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan	75

BAB VII. STRATEGI PENCAPAIAN 80

7.1. Strategi Pemerintah Daerah 80

7.2. Strategi dan Prioritas Pembangunan Daerah yang Disusun
Secara Terintegrasi dengan Kebijakan dan Prioritas
Pembangunan Nasional yang Akan Dilaksanakan di Daerah 84

BAB VIII. PENUTUP 152

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Target Indikator Ekonomi Makro Kabupaten Bantul Tahun 2027	13
Tabel 2.2	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kabupaten Bantul, DIY, dan Nasional Tahun 2021-2025	14
Tabel 2.3	Pertumbuhan PDRB Kabupaten Bantul Menurut Lapangan Usaha (%) Tahun 2021-2025.....	14
Tabel 2.4	Tingkat Kemiskinan Kabupaten Bantul, DIY dan Nasional Tahun 2021-2025	15
Tabel 2.5	Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Bantul Tahun 2021-2025	16
Tabel 2.6	Jumlah Penduduk Miskin (jiwa) per Kapanewon di Kabupaten Bantul Tahun 2025	17
Tabel 2.7	Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Bantul, DIY, dan Nasional Tahun 2021-2025	18
Tabel 2.8	Rasio Gini Kabupaten Bantul, DIY, dan Nasional Tahun 2021-2025	19
Tabel 2.9	Jumlah Pengangguran Terbuka Kabupaten Bantul Tahun 2021-2025	20
Tabel 2.10	Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Bantul, DIY dan Nasional Tahun 2021-2025	20
Tabel 2.11	Kategori Fiskal Daerah dalam PMK	23

Tabel 2.12	Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2027	24
Tabel 3.1	Indikator Ekonomi Makro di Indonesia Tahun 2027	27
Tabel 3.2	Indikator Ekonomi Makro dan Asumsinya di Kabupaten Bantul dan DIY Tahun 2027.....	33
Tabel 4.1	Realisasi Pendapatan Tahun 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, Pendapatan Tahun 2026, dan Prediksi Pendapatan Tahun 2027 di Kabupaten Bantul sesuai PP Nomor 12 Tahun 2019	44
Tabel 5.1	Realisasi Belanja Tahun 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, Belanja Tahun 2026, dan Prediksi Belanja Tahun 2027 di Kabupaten Bantul sesuai PP No.12 Tahun 2019	54
Tabel 5.2	Rekapitulasi Belanja Menurut Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2027	57
Tabel 5.3	Jenis dan Indikator Pelayanan SPM yang Harus Dipenuhi	59
Tabel 5.4	Target Penerima Layanan SPM Tahun 2027	61
Tabel 5.5	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Tahun 2027	63
Tabel 5.6	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan Tahun 2027	67
Tabel 5.7	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Pertanahan Tahun 2027	70
Tabel 5.8	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang Tahun 2027	73

Tabel 6.1	Realisasi Pembiayaan Tahun 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, Pembiayaan Tahun 2026, dan Prediksi Pembiayaan Tahun 2027 di Kabupaten Bantul sesuai PP No.12 Tahun 2019	77
Tabel 6.2	Rincian Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2027	78
Tabel 7.1	Penyelarasan Prioritas Nasional (PN) dan Prioritas DIY dengan Prioritas Daerah (PD)	85
Tabel 7.2	Interkoneksi Program Strategis Nasional (ProSN) dengan Program Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul	102
Tabel 7.3	Kesepakatan Rakortekbang Tahun 2026 tentang Outcome prioritas, Program dan Sub Kegiatan dalam Mendukung Astacita untuk Kabupaten Bantul Tahun 2027	120
Tabel 7.4	Program Unggulan Daerah Tahun 2027	147

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (KUA) merupakan suatu dokumen yang memuat kebijakan terkait pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasari untuk periode satu tahun. KUA wajib disusun oleh Kepala Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, disebutkan bahwa penyusunan KUA berdasarkan RKPD dan pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri setiap tahun. Penyusunan KUA tahun 2027 mendasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Bupati Bantul Nomor 49 Tahun 2026 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2027.

Kebijakan Umum APBD memuat target pencapaian kinerja yang terukur dari program-program yang akan dilaksanakan pemerintah daerah untuk setiap urusan pemerintah daerah yang disertai kondisi keuangan pemerintah daerah meliputi kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah, dan strategi pencapaiannya yang harus menjadi acuan bagi setiap Perangkat Daerah (PD) dalam melaksanakan program/kegiatan pembangunan. Rumusan Kebijakan Umum APBD juga merupakan hasil sinergi yang harmonis antara kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam hal menjamin sinkronisasi program dan kegiatan maka Penyusunan KUA tahun 2027 juga mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul tahun 2025-2045 dan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029.

Secara umum Kebijakan Umum APBD Kabupaten Bantul Tahun 2027 merupakan respon dan harus dapat memberikan solusi terhadap permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam pembangunan daerah. Permasalahan pembangunan daerah merupakan *gap expectation* antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta

antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat perencanaan sedang dibuat. Tahun 2027 fokus pada pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif yang inklusif dan berkelanjutan.

Beberapa permasalahan pembangunan daerah yang dihadapi Kabupaten Bantul yang merupakan latar belakang dari KUA 2027 antara lain:

1. Percepatan pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan;
2. Pemerataan kualitas infrastruktur;
3. Peningkatan SDM berdaya saing;
4. Pelestarian Lingkungan dan pengurangan resiko bencana;
5. Pemantapan layanan publik berbasis Teknologi Informatika;

Permasalahan yang berkaitan dengan capaian sasaran daerah meliputi permasalahan jangkauan efektivitas pelayanan publik secara digital, kurang optimalnya promosi kesehatan dan pendampingan kepada masyarakat, pemerataan dan daya saing pendidikan, potensi kearifan lokal sebagai bagian dari daya tarik wisata dan penguatan jati diri masyarakat Kabupaten Bantul secara berkelanjutan yang belum dikembangkan secara optimal, aduan masyarakat tentang gangguan ketertiban, tingkat pengangguran terbuka yang masih tinggi, sarana prasarana publik belum memadai, penurunan indeks kualitas air karena pola perilaku membuang sampah ke sungai, resiko bencana, perlindungan bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS), dan perlindungan bagi Perempuan dan anak.

Sedangkan tantangan yang dihadapi pada Tahun 2027 yaitu diperlukan sinergi yang lebih kuat dan terarah untuk menekan angka kemiskinan, selain itu pada aspek kesejahteraan masyarakat dalam pembangunan bidang kesehatan perlunya penanganan penyakit menular dan tidak menular yang harus dilakukan secara komprehensif dan sistematis. Dalam hal pemenuhan dan perlindungan hak anak di sektor kesehatan, pendidikan dan pelayanan birokrasi publik, tantangan yang masih dihadapi adalah masih adanya kasus kekerasan terhadap anak, tingginya pernikahan anak, dan kurangnya fasilitasi kegiatan anak di kalurahan. Tantangan dalam meminimalisasi potensi pencemaran dan limbah sampah.

Tahun 2027 dengan asumsi perekonomian semakin membaik sehingga kebijakan pemerintah daerah dapat mendukung pembangunan perekonomian daerah. Kondisi ekonomi di Kabupaten Bantul, masih perlu ditingkatkan agar lebih stabil dan berkelanjutan. Jika tidak ada langkah konkret dalam perbaikan tata kelola ekonomi, kondisi ini berisiko mengalami

penurunan, yang dapat berdampak pada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

1.2. Tujuan Penyusunan KUA

KUA disusun dengan tujuan untuk menentukan arah kebijakan dan sasaran prioritas pembangunan daerah. KUA tahun anggaran 2027 memuat strategi dan prioritas pembangunan serta upaya pencapaian target kinerja yang terukur melalui program-program yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul, pada setiap urusan pemerintahan daerah disertai dengan proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, serta sumber dan penggunaan pembiayaan dengan asumsi yang mendasarinya. Dalam hal ini sesuai Permendagri Nomor 90 Tahun 2019, program dan kegiatan di Pemerintah Kabupaten Bantul dikelompokkan kedalam 6 Urusan Wajib Pelayanan Dasar, 18 Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar, 6 Urusan Pilihan, 2 Unsur Pendukung, 4 Unsur Penunjang, 1 Unsur Pengawas, Unsur Kewilayahan (Kapanewon), dan Urusan Pemerintahan Umum (Kesatuan Bangsa dan Politik). Kebijakan Umum Anggaran Tahun Anggaran 2027 ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan PPAS dan pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2027.

1.3. Dasar Hukum Penyusunan KUA

Dasar penyusunan KUA tahun anggaran 2027 adalah:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2027;
15. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2026 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 268);
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-861 Tahun 2026 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 9);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
21. Peraturan Bupati Bantul Nomor 15 Tahun 2021 tentang Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dalam Perencanaan Pembangunan di Kabupaten Bantul;
22. Peraturan Bupati Bantul Nomor 49 Tahun 2026 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027.
23. Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kabupaten Bantul Nomor B/900.1.1/05890/DPRD/2026 dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Nomor B/900.1.1/00498/DPRD/2026 tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2027.

1.4. Sistematika

Penyajian penulisan KUA Tahun Anggaran 2027 disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)
- 1.2 Tujuan Penyusunan KUA
- 1.3 Dasar Hukum Penyusunan KUA
- 1.4 Sistematika

BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

- 2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah
- 2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

BAB III ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)

- 1.1. Asumsi dasar yang digunakan dalam APBN
- 1.2. Asumsi dasar yang digunakan dalam APBD

BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

- 4.1. Kebijakan perencanaan pendapatan daerah yang akan diproyeksikan untuk tahun 2027
- 4.2. Target pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

- 5.1. Kebijakan terkait dengan perencanaan belanja
- 5.2. Rencana belanja operasi, belanja modal, belanja transfer dan belanja tidak terduga

BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

- 6.1. Kebijakan penerimaan pembiayaan
- 6.2. Kebijakan pengeluaran pembiayaan

BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN

BAB VIII PENUTUP

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Arah kebijakan ekonomi daerah Kabupaten Bantul tahun 2027 berpedoman pada RPJMD Kabupaten Bantul tahun 2025-2029 dan diselaraskan dengan RKP 2027 dan RKPD DIY tahun 2027. Arah kebijakan ekonomi daerah menjadi dasar kebijakan pengembangan sektoral dan regional yang dijabarkan lebih lanjut ke dalam program, kegiatan dan sub kegiatan.

2.1.1 Kondisi dan Arah Perekonomian Nasional

Pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga triwulan III 2025 (yoy) tumbuh sebesar 5,04 persen, dengan permintaan domestik menjadi pendorong utama pertumbuhan Indonesia sejalan investasi yang tetap membaik, terutama di sektor bangunan seiring dengan penyelesaian berbagai Proyek Strategis Nasional (PSN). Dengan perkembangan tersebut, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2025 diperkirakan berada dalam kisaran 5,2%, dan diperkirakan akan meningkat pada 2026 dalam kisaran 5,2-5,8% serta pada 2027 sebesar 5,3-6,1%.

Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) pada Desember 2025 tetap terjaga sebesar 2,92% (yoy). Perkembangan ini dipengaruhi oleh inflasi inti yang terkendali pada level 2,38% (yoy) sejalan dengan konsistensi kebijakan suku bunga Bank Indonesia untuk mengarahkan ekspektasi inflasi.

Arah kebijakan pembangunan nasional sesuai dengan Tema RKP Tahun 2027 adalah “**Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas melalui Produktivitas, Investasi dan Industri**”. Dalam RPJMN 2025-2029 terdapat 8 Prioritas Nasional (PN) yang menguraikan 8 Misi (Asta Cita) sebagai berikut:

PN-1: Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM).

PN-2: Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi digital, Ekonomi Digital, dan Ekonomi Biru

PN-3: Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan,

Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi

- PN-4:** Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas
- PN-5:** Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di dalam Negeri
- PN-6:** Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan
- PN-7:** Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan
- PN-8:** Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antar Umat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur.

Adapun sejumlah strategi dan langkah mempercepat pencapaian target pertumbuhan ekonomi tahun 2026 ialah peningkatan produktivitas industrialisasi (hilirisasi) berorientasi ekspor dan program padat karya, peningkatan produktivitas pertanian menuju swasembada pangan, lalu swasembada energi melalui ekonomi hijau. Kemudian juga peningkatan inovasi teknologi melalui transformasi digital, serta peningkatan investasi produktif terutama *Foreign Direct Investment*/Penanaman Modal Asing berorientasi ekspor dan investasi non-Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

Pelaksanaan pemanfaatan anggaran pemerintah tahun 2026 diarahkan untuk program dan kegiatan yang mendukung penciptaan lapangan kerja, mendorong terobosan teknologi, mendukung swasembada pangan dan energi, serta meningkatkan produktivitas. Peningkatan produktivitas dilakukan melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG), sekolah unggulan, percepatan Rumah Sakit (RS) daerah, transformasi digital, reformasi birokrasi, kemudahan berbisnis, pertahanan semesta, serta stabilitas makro ekonomi dan fiskal adaptif.

Dalam swasembada pangan dan energi, akan didukung pelaksanaan lumbung pangan, pengembangan energi terbarukan, dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) hulu hilir.

Terkait percepatan pertumbuhan ekonomi inklusif, bakal dilakukan akselerasi hilirisasi sumber daya alam dan percepatan pengentasan kemiskinan (tiga juta rumah dan digitalisasi bantuan).

Target indikator ekonomi makro dalam Rancangan Rencana Kerja Pemerintah tahun 2027, sebagai berikut:

- 1) Pertumbuhan Ekonomi 6,3 – 7,5%
- 2) Tingkat Kemiskinan 6,0 – 6,5%.
- 3) Rasio Gini 0,375 – 0,378
- 4) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 4,30 – 4,87%
- 5) Indeks Modal Manusia 0,58.

2.1.2 Kondisi dan Arahan Perekonomian Daerah Istimewa Yogyakarta

Perekonomian DIY tumbuh positif pada triwulan III 2025 mencapai 5,40% (yoy) termoderasi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 5,49% (yoy). Meskipun demikian, perekonomian DIY triwulan III 2025 tersebut tumbuh lebih tinggi apabila dibandingkan dengan kinerja perekonomian wilayah Jawa dan Nasional, yang masing-masing tumbuh sebesar 5,17% (yoy) dan 5,04% (yoy). Adapun kontribusi perekonomian DIY terhadap pertumbuhan ekonomi Jawa dan Nasional secara berturut-turut sebesar 1,54% dan 0,87%.

Dari sisi pengeluaran, perekonomian DIY yang tumbuh positif pada triwulan III 2025 terutama ditopang oleh meningkatnya kinerja Konsumsi Rumah Tangga (RT), dan PMTB. Konsumsi RT yang memiliki pangsa terbesar dibandingkan komponen lainnya yaitu sebesar 60,92%, melanjutkan pertumbuhan positif sebesar 4,28% (yoy), sedikit melambat dibandingkan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya yaitu 4,43% (yoy). Sementara itu, kinerja PMTB memiliki pangsa sebesar 37,65% terhadap perekonomian DIY, tumbuh akseleratif sebesar 10,42% (yoy) dibandingkan dengan kinerja PMTB pada triwulan II 2025 yang tumbuh sebesar 8,23% (yoy).

Dari sisi Lapangan Usaha (LU), perekonomian DIY yang termoderasi pada triwulan III 2025 utamanya ditopang oleh melemahnya kinerja beberapa LU utama di DIY, seperti Industri Pengolahan, Konstruksi, Pertanian, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, serta Perdagangan Besar. LU Industri Pengolahan yang memiliki pangsa 11,69% dari total PDRB DIY triwulan III 2025, tumbuh sebesar 5,07% (yoy), termoderasi dibandingkan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya yaitu 5,25% (yoy). Kinerja LU Konstruksi memiliki pangsa sebesar 10,31% dari total PDRB DIY triwulan III

2025, tumbuh sebesar 8,77% (yoy), termoderasi dibandingkan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya yaitu 9,38% (yoy). LU Pertanian memiliki pangsa sebesar 10,18% dari total PDRB DIY triwulan III 2025, tumbuh akseleratif sebesar 6,08% (yoy), lebih tinggi dari capaian triwulan II 2025 yang berkontraksi 0,81% (yoy). Lebih lanjut, LU Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum memiliki pangsa sebesar 10,12% dari total PDRB DIY triwulan III 2025, tumbuh sebesar 5,30% (yoy), melambat dibandingkan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya yaitu 7,17% (yoy). Meskipun demikian, LU Perdagangan Besar tumbuh sebesar 5,14% (yoy), meningkat apabila dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yaitu 5,06% (yoy). LU Perdagangan memiliki pangsa sebesar 8,09% dari total PDRB DIY triwulan III 2025.

Pertumbuhan ekonomi DIY di tahun 2026 diperkirakan semakin terakselerasi dibandingkan tahun 2025. Secara keseluruhan pertumbuhan ekonomi DIY tahun 2026 diperkirakan berada pada kisaran 5,1-5,9% (yoy).

Tema RKPD DIY Tahun 2027 adalah **“Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan untuk Perwujudan Pancamulia”**, dengan 6 Prioritas Daerah DIY sebagai berikut:

- 1) Penurunan tingkat kemiskinan.
- 2) Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Yogyakarta.
- 3) Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah).
- 4) Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak.
- 5) Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tentram.
- 6) Penguatan Good Governance pada berbagai tingkatan.

Visi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah DIY Tahun 2022-2027, adalah: **“Mewujudkan Pancamulia Masyarakat Jogja melalui Reformasi Kalurahan, Pemberdayaan Kawasan Selatan, serta Pengembangan Budaya Inovasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi”**

Ada tiga komponen yang saling terkait dan menjadi prioritas dari visi tersebut. Ketiga hal itu adalah: (i) Reformasi Kalurahan, (ii) Kawasan Selatan, dan (iii) Teknologi Informasi, yang akan menjadi penopang terwujudnya Pancamulia Masyarakat Jogja. Selanjutnya, apabila di-proposisi-kan, bahwa untuk mewujudkan Pancamulia Manusia Jogja, maka Kawasan Selatan akan diletakkan sebagai subyek prioritas pembangunan, melalui cara pandang atau jalan Reformasi Kalurahan, dengan memanfaatkan Teknologi Informasi.

Target indikator ekonomi makro yang akan dicapai DIY pada tahun 2027 hasil penyelarasan dengan RKP sebagai berikut:

- 1) Pertumbuhan Ekonomi 6,3 – 7,5%;
- 2) Tingkat Kemiskinan 8,5 – 9,5%;
- 3) Rasio Gini 0,414 - 0,420;
- 4) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 3,06-3,38;
- 5) Indeks Modal Manusia 0,756 – 0,771.

2.1.3 Kondisi dan Arahane Perekonomian Kabupaten Bantul

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bantul tahun 2025 sebesar 4,92%, mengalami perlambatan dari capaian tahun 2024. Secara struktural, ekonomi Bantul masih bertumpu pada sektor perdagangan, pertanian, industri pengolahan kecil-menengah, jasa pendidikan, dan pariwisata pendukung kawasan DIY. Walaupun pertumbuhan ekonomi relatif baik, tantangan yang masih dihadapi meliputi ketergantungan pada sektor informal, produktivitas tenaga kerja yang belum merata, serta sensitivitas ekonomi daerah terhadap perlambatan ekonomi nasional dan global.

Pada Tahun 2025 tingkat kemiskinan Kabupaten Bantul menurun menjadi 11,54% atau lebih rendah 0,12% dibandingkan tahun 2024. Tingkat kemiskinan di Bantul relatif lebih tinggi dibandingkan dengan kemiskinan DIY dan Nasional. Hal ini menunjukkan bahwa program pengentasan kemiskinan mulai memberikan dampak positif. Pemerintah Kabupaten Bantul menjalankan strategi bantuan sosial, pengembangan UMKM, padat karya, pemberdayaan ekonomi masyarakat, pelatihan tenaga kerja, dan dukungan desa melalui Dana Desa. Namun demikian, tingkat kemiskinan Bantul masih tergolong cukup tinggi dibanding beberapa wilayah lain di DIY. Kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian masyarakat masih rentan secara ekonomi, kualitas pekerjaan informal masih dominan, dan distribusi manfaat pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya merata.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan perbandingan antara jumlah pengangguran dengan jumlah angkatan kerja. Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Bantul turun dari 3,62% di tahun 2024 menjadi 3,57% di tahun 2025, namun lebih tinggi dibandingkan DIY. Beberapa upaya yang telah dilakukan untuk mengurangi pengangguran yaitu program peningkatan kesempatan kerja, penempatan tenaga kerja, transmigrasi umum, perlindungan dan pengembangan ketenagakerjaan, peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja, dan perluasan tenaga kerja.

Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Bantul tahun 2025 mencapai 83,03 dan termasuk kategori tinggi. Angka ini meningkat dibanding tahun 2024 sebesar 82,05. Peningkatan IPM menunjukkan adanya perbaikan pada akses pendidikan, layanan kesehatan, harapan hidup, dan daya beli masyarakat. keunggulan yang dimiliki Kabupaten Bantul berupa akses pendidikan yang baik, kedekatan dengan pusat pendidikan DIY, berkembangnya fasilitas kesehatan, serta meningkatnya literasi Masyarakat.

Rasio gini Kabupaten Bantul tahun 2025 diperkirakan berada pada 0,427 yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan masih berada pada kategori sedang menuju tinggi. Kondisi ini memperlihatkan bahwa pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya inklusif, manfaat pembangunan lebih banyak terkonsentrasi pada kelompok ekonomi tertentu, serta masih terdapat kesenjangan antarwilayah dan antar kelompok masyarakat. Adapun faktor yang mempengaruhi ketimpangan antara lain perbedaan akses pendidikan, kesenjangan kualitas pekerjaan, dominasi sektor informal, serta konsentrasi aktivitas ekonomi di kawasan perkotaan dan perdagangan.

Target indikator ekonomi makro yang akan dicapai Kabupaten Bantul pada tahun 2027 hasil penyelarasan dengan RKPD DIY sebagai berikut:

Tabel 2.1 Target Indikator Ekonomi Makro Kabupaten Bantul
Tahun 2027

No	Uraian	2027
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	5,60-6,37
2	Tingkat Kemiskinan	9,02-9,32
3	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	84,80-85,83
4	Indeks Gini	0,383-0,408
5	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	3,00-3,56

Sumber: Bappeda, 2026

Tema Pembangunan Tahun 2027 dalam RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2027 adalah **”Memperkuat Pertumbuhan Ekonomi Daerah Berbasis Pertanian, Industri dan Pariwisata Didukung SDM Berkualitas”** dengan Prioritas Daerah (PD) sesuai RPJMD Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

- 1) Mewujudkan transformasi sumber daya manusia.
- 2) Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan.
- 3) Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi.
- 4) Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana.
- 5) Mewujudkan transformasi sosial dan pelestarian budaya.

2.1.3.1 Pertumbuhan Ekonomi (LPE)

Pertumbuhan Ekonomi merupakan salah satu indikator makro yang digunakan untuk mengukur perekonomian suatu negara/daerah. Besarnya pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu. Daerah yang mempunyai pertumbuhan ekonomi yang tinggi menunjukkan bahwa daerah tersebut mampu membawa kondisi perekonomiannya relatif lebih baik.

Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) ADHK Kabupaten Bantul Tahun 2021-2025 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.2 Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kabupaten Bantul, DIY dan Nasional Tahun 2021-2025

Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
LPE Kabupaten Bantul (%)	5,00	5,19	5,06	5,04	4,92
LPE DIY (%)	5,58	5,15	5,07	5,03	5,49
LPE Nasional (%)	3,70	5,31	5,05	5,03	5,11

Sumber: RKPD, 2026

Pada 2021, pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 5,00 persen, melampaui rata-rata nasional, mencerminkan resiliensi ekonomi lokal dalam pemulihan pascapandemi. Sepanjang periode 2022-2024, kinerja perekonomian daerah tetap terjaga dengan rata-rata pertumbuhan 5 persen, relatif sejajar dengan capaian DIY maupun nasional. Pada 2025, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bantul tercatat sebesar 4,92 persen. Meskipun berada di bawah rata-rata DIY sebesar 5,49 persen dan nasional sebesar 5,11 persen, capaian ini menunjukkan perekonomian daerah tetap stabil di tengah dinamika perekonomian yang berkembang.

Besarnya pertumbuhan PDRB menurut lapangan usaha Tahun 2021-2025 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.3 Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha (%)
Kabupaten Bantul Tahun 2021-2025

No	Kategori/Industri/Lapangan Usaha	2021	2022	2023	2024	2025
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	1,59	1,54	0,92	0,84	6,72
2	Pertambangan dan Penggalian	- 5,46	2,39	2,38	0,50	7,67
3	Industri Pengolahan	0,59	3,53	4,44	3,75	4,66
4	Pengadaan Listrik, Gas	2,14	6,72	7,13	10,27	4,58
5	Pengadaan Air, Pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang	6,28	4,06	3,40	1,37	-0,68
6	Konstruksi	11,27	5,72	5,13	8,42	-4,17
7	Perdagangan dan Reparasi Mobil dan Motor	1,07	5,37	4,38	4,49	5,54
8	Transportasi dan Pergudangan	3,69	14,69	7,73	6,67	8,52

No	Kategori/Industri/Lapangan Usaha	2021	2022	2023	2024	2025
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,72	12,70	8,53	8,21	7,71
10	Informasi dan Komunikasi	15,83	3,88	4,72	4,21	4,55
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,76	5,81	11,76	7,45	1,22
12	Real Estate	0,04	3,25	3,83	4,14	4,25
13	Jasa Perusahaan	7,75	7,13	8,42	5,39	4,97
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	- 0,72	3,32	2,46	6,59	6,42
15	Jasa Pendidikan	4,95	0,91	5,35	4,47	6,66
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3,98	4,61	6,37	5,41	7,66
17	Jasa Lainnya	15,14	12,32	10,05	3,79	7,71
PDRB		5,00	5,19	5,06	5,04	4,92

Sumber: RKPD, 2026

Berdasarkan tabel di atas, pertumbuhan PDRB menurut lapangan kerja pada periode 2023 – 2025 menunjukkan perlambatan. Pada tahun 2024, dari 17 lapangan usaha, sebanyak 12 lapangan usaha mengalami pertumbuhan yang lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Perlambatan tersebut terutama terjadi pada tiga sektor unggulan yaitu sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, sektor Industri Pengolahan, serta sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun perekonomian Kabupaten Bantul masih tumbuh secara agregat, namun terdapat tekanan pada sektor-sektor yang selama ini menjadi penggerak utama pertumbuhan. Dengan demikian, struktur pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bantul pada tahun 2024 cenderung ditopang oleh sektor tertentu sementara sektor unggulan mengalami moderasi pertumbuhan, sehingga perlunya kebijakan ekonomi sektoral yang lebih adaptif guna menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi daerah di masa depan.

2.1.3.2. Tingkat Kemiskinan

Kemiskinan merupakan permasalahan kompleks dan krusial dalam pembangunan di Kabupaten Bantul. Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan dan kesehatan. Tingkat kemiskinan Kabupaten Bantul sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.4 Tingkat Kemiskinan Kabupaten Bantul, DIY dan Nasional Tahun 2021–2025

Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
Tingkat Kemiskinan Kabupaten Bantul	14,04	12,27	11,96	11,66	11,54
Tingkat Kemiskinan D.I Yogyakarta	12,80	11,34	11,04	10,83	10,23
Tingkat Kemiskinan Nasional	10,14	9,54	9,36	9,03	8,47

Sumber: RKPD, 2026

Berdasarkan tabel tersebut, angka kemiskinan di Bantul tahun 2021 mencapai 14,04% dan perlahan turun menjadi 11,54% di tahun 2025. Meskipun trennya terus menurun, angka tersebut masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan capaian Provinsi DIY yakni 10,23% maupun angka Nasional yakni 8,47%. Kondisi ini menunjukkan bahwa Kabupaten Bantul masih memiliki tantangan besar, diperlukan sinergi yang lebih kuat dan terarah untuk menekan angka kemiskinan.

Masalah kemiskinan tidak hanya dilihat dari jumlah atau persentase penduduk miskin (P_0) tetapi juga harus memperhatikan aspek kedalaman (P_1) dan keparahan kemiskinan (P_2). Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1) digunakan untuk mengukur seberapa besar rata-rata selisih pengeluaran warga miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai P_1 , maka semakin jauh jarak rata-rata pengeluaran masyarakat dari garis kemiskinan, yang berarti upaya untuk mengangkat mereka keluar dari zona miskin memerlukan sumber daya yang lebih besar. Sementara itu, Indeks Keparahannya Kemiskinan (P_2) memberikan gambaran mengenai tingkat ketimpangan pengeluaran di antara sesama penduduk miskin. Nilai P_2 yang semakin tinggi menunjukkan bahwa kesenjangan ekonomi di dalam kelompok masyarakat miskin semakin lebar. Tingkat kemiskinan di Kabupaten Bantul tahun 2021-2025 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.5 Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Bantul Tahun 2021–2025

No.	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
1	Garis Kemiskinan (Rp/Kap/Bln)	418.265	445.511	488.340	510.740	531.456
2	Jumlah Penduduk Miskin (jiwa)	146.980	130.130	128.510	126.930	127.250
3	Tingkat Kemiskinan (%)	14,04	12,27	11,96	11,66	11,54
4	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1)	2,24	2,11	1,79	2,18	1,28
5	Indeks Keparahannya Kemiskinan (P_2)	0,54	0,50	0,44	0,56	0,26

Sumber: RKPD, 2026

Peningkatan Garis Kemiskinan yang mencapai Rp531.456 pada tahun 2025 mencerminkan adanya tekanan inflasi terhadap biaya kebutuhan pokok, namun kemampuan daerah dalam menekan angka kemiskinan dan mengatasi kesenjangan pengeluaran penduduk miskin, menunjukkan bahwa kebijakan ekonomi yang diterapkan cukup efektif dalam menjaga daya beli masyarakat rentan. Jumlah penduduk miskin tahun 2025 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.6 Jumlah Penduduk Miskin (jiwa) per Kapanewon di Kabupaten Bantul Tahun 2025

No	Kapanewon	2025
1	Bambanglipuro	5.739
2	Banguntapan	6.578
3	Bantul	5.749
4	Dlingo	9.229
5	Imogiri	11.733
6	Jetis	6.904
7	Kasihan	9.844
8	Kretek	3.068
9	Pajangan	7.883
10	Pandak	8.608
11	Piyungan	5.370
12	Pleret	6.423
13	Pundong	4.949
14	Sanden	5.316
15	Sedayu	7.295
16	Sewon	8.465
17	Srandakan	4.660
Total		117.813

Sumber: RKPD, 2026

Dari tabel di atas diketahui jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bantul tahun 2025 sejumlah 117.813 jiwa yang tersebar di tujuh belas kapanewon. Distribusi penduduk miskin ini menunjukkan adanya ketimpangan yang cukup mencolok antar wilayah, di mana Kapanewon Imogiri menjadi wilayah dengan jumlah penduduk miskin terbanyak sejumlah 11.733 jiwa, disusul Kapanewon Kasihan dan Kapanewon Dlingo lebih dari 9.000 jiwa. Sementara Kapanewon Kretek memiliki jumlah penduduk miskin paling sedikit sejumlah 3.068 jiwa, diikuti oleh Kapanewon Srandakan dan Kapanewon Pundong.

Untuk mewujudkan integrasi dan sinkronisasi data secara akurat dan komprehensif dalam mendukung penanggulangan kemiskinan digunakan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), berdasarkan Keputusan Bupati Bantul Nomor 611 Tahun 2025 tentang Penetapan Pelaksanaan Pengelolaan Pemanfaatan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Secara keseluruhan, DTSEN menggunakan gabungan indikator yang jauh lebih kompleks seperti diantaranya kondisi perumahan, kepemilikan aset dan ekonomi, profil demografi, sosial dan sebagainya.

Data yang ditampilkan merupakan kelompok desil 1 yakni kelompok dengan status kesejahteraan paling rendah di 17 kapanewon, atau secara teknis dapat dikategorikan sebagai kelompok masyarakat miskin ekstrim yang

memiliki karakteristik kerentanan sosial ekonomi yang sangat tinggi. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Bantul berupaya untuk menangani permasalahan kemiskinan melalui program daerah yang mengharuskan fokus intervensi per kapanewon antara lain program: Boga Sehat, Sambung Pangan, Program Perbaikan Rumah, PBI APBD, Padat Karya APBD, Program Pemberdayaan Berbasis Masyarakat Pedukuhan, Santunan anak yatim, Dana Insentif Kalurahan, kerja sama penanggulangan kemiskinan dengan BAZNAS dan lain-lain.

2.1.3.3. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indeks komposit yang menggambarkan tingkat pembangunan manusia. IPM diukur dengan pendekatan tiga dimensi yaitu kesehatan, pengetahuan dan dimensi hidup layak. Penghitungan IPM untuk dimensi pengetahuan menggunakan indikator Rata-rata Lama Sekolah (RLS), dan Harapan Lama Sekolah (HLS). Dimensi standar hidup layak menggunakan indikator Produk Nasional Bruto (PNB) per kapita, sedangkan untuk menghitung dimensi kesehatan menggunakan indikator Usia Harapan Hidup saat lahir (UHH). Metode agregasinya disempurnakan menjadi rata-rata geometrik. Ketidaktersediaan data PNB di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, digunakan proksi pengeluaran perkapita yang disesuaikan, dari data hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). Perkembangan IPM Kabupaten Bantul sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.7 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Bantul, DIY dan Nasional Tahun 2021–2025

Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
IPM Kabupaten Bantul	80,63	81,04	81,74	82,05	83,03
IPM D.I Yogyakarta	80,22	80,65	81,09	81,62	82,48
IPM Nasional	73,16	73,77	74,39	75,02	75,90

Sumber: RKPD, 2026

Berdasarkan hasil perhitungan IPM, dapat dilihat bahwa dalam lima tahun terakhir nilai IPM Kabupaten Bantul menunjukkan capaian yang positif. Nilai IPM mengalami peningkatan dari 80,63 pada tahun 2021 menjadi 83,03 di tahun 2025 dengan level capaiannya menjadi sangat tinggi (IPM ≥ 80).

Capaian IPM Kabupaten Bantul yang mengalami peningkatan secara konsisten menunjukkan keberhasilan pemerintah daerah dalam meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik, terutama di bidang pendidikan dan kesehatan. Peningkatan sebesar 2,4 poin dalam lima tahun

terakhir menandakan bahwa pembangunan manusia di Kabupaten Bantul tidak hanya berjalan, tetapi juga mengalami akselerasi yang signifikan.

Meskipun capaian IPM Kabupaten Bantul menunjukkan tren positif dalam lima tahun terakhir, namun nilai IPM masih dapat ditingkatkan antara lain:

1. laju pertumbuhan indeks kesehatan dengan memperluas cakupan layanan kesehatan, memastikan ketersediaan tenaga medis yang kompeten, serta meningkatkan edukasi masyarakat tentang pola hidup sehat;
2. laju pertumbuhan indeks pengetahuan melalui peningkatan kompetensi guru, penyediaan fasilitas belajar yang memadai, serta peningkatan partisipasi sekolah penduduk mulai dari jenjang pendidikan dasar hingga menengah (SD-SLTA);
3. laju pertumbuhan indeks pengeluaran dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pelatihan kewirausahaan, pengembangan UMKM dan akses terhadap pembiayaan mikro, pembangunan infrastruktur, serta program bantuan sosial pemerintah seperti Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH).

2.1.3.4. Rasio Gini

Rasio Gini merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat distribusi dan ketimpangan pendapatan penduduk. Nilainya berkisar antara 0 hingga 1. Semakin mendekati angka 1, semakin tinggi tingkat ketimpangan pendapatan yang menunjukkan kondisi mendekati ketimpangan sempurna. Sebaliknya, semakin mendekati angka 0, distribusi pendapatan semakin merata, atau mendekati pemerataan sempurna.

Menurut Harry T. Oshima, nilai Rasio Gini diklasifikasikan dalam tiga kategori. Nilai kurang dari 0,3 termasuk ketimpangan rendah; nilai antara 0,3 hingga 0,5 termasuk ketimpangan moderat; sedangkan nilai lebih dari 0,5 menunjukkan ketimpangan tinggi”.

Tabel 2.8 Rasio Gini Kabupaten Bantul, DIY dan Nasional Tahun 2021-2025

Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
Rasio Gini Kabupaten Bantul	0,441	0,410	0,454	0,417	0,427
Rasio Gini DIY	0,441	0,439	0,449	0,435	0,426
Rasio Gini Nasional	0,384	0,384	0,388	0,379	0,375

Sumber: RKPD, 2026
Keterangan *: Data Semester 1 2024

Tingkat kesenjangan di Kabupaten Bantul selama 2021-2025 menunjukkan pola fluktuasi. Setelah sempat menurun ke angka terendah 0,410 pada tahun 2022, rasio gini kembali meningkat menjadi 0,427 pada 2025. Jika dibandingkan dengan tingkat regional dan nasional, rasio gini Kabupaten Bantul berada di tingkat yang setara dengan DIY (0,426) namun cukup jauh di atas rata-rata nasional (0,375). Meskipun demikian, angka tersebut masih tergolong dalam kategori “kesenjangan sedang” karena berkisar antara 0,400-0,500.

Dinamika rasio gini tersebut mengindikasikan bahwa distribusi pendapatan masyarakat Kabupaten Bantul masih rentan terhadap perubahan kondisi ekonomi makro.

2.1.3.5. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Ada dua jenis pengangguran yaitu pengangguran terbuka (*open unemployment*) dan setengah pengangguran (*disguised unemployment*). Pengangguran Terbuka adalah orang yang tidak punya pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan usaha. Setengah pengangguran adalah orang yang bekerja di bawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu dan masih mencari pekerjaan atau masih bersedia menerima pekerjaan). Jumlah pengangguran terbuka Kabupaten Bantul tahun 2021-2025 terus mengalami penurunan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.9 Jumlah Pengangguran Terbuka Kabupaten Bantul
Tahun 2021-2025

Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
Kabupaten Bantul	24.075	24.875	22.783	21.981	21.911

Sumber: RKPD, 2026

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan perbandingan antara jumlah pengangguran dengan jumlah angkatan kerja. Tngkat Pengangguran Terbuka sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.10 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Bantul, DIY dan Nasional Tahun 2021-2025

Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
TPT Kabupaten Bantul	4,04	3,97	3,78	3,62	3,57
TPT DIY	4,56	4,06	3,69	3,48	3,46
TPT Nasional	6,49	5,86	5,32	4,91	4,85

Sumber: RKPD, 2026

TPT di Kabupaten Bantul tahun 2021-2025 menunjukkan tren penurunan yang positif dan stabil, di mana angka pengangguran berhasil ditekan dari 4,04% di tahun 2021 menjadi 3,57% di tahun 2025. Peran pemerintah daerah dalam rangka mengurangi pengangguran telah dilaksanakan melalui program peningkatan kesempatan kerja, penempatan tenaga kerja, transmigrasi umum, perlindungan dan pengembangan ketenagakerjaan, peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja dan perluasan tenaga kerja.

2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Arah kebijakan keuangan daerah merupakan kebijakan yang akan ditempuh oleh Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2027 berkaitan dengan manajemen pengelolaan keuangan daerah yang merupakan salah satu faktor penting dalam mendanai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.

Analisis pengelolaan keuangan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah. Mengingat bahwa pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam APBD maka analisis pengelolaan keuangan daerah dilakukan terhadap APBD dan laporan keuangan daerah.

Kebijakan keuangan daerah merupakan kebijakan yang akan di tempuh oleh pemerintah daerah berkaitan dengan manajemen pengelolaan keuangan daerah yang merupakan salah satu faktor penting dalam mendanai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Dalam penentuan kebijakan keuangan daerah diperlukan gambaran kondisi keuangan daerah yang meliputi analisis pengelolaan keuangan daerah baik dari sisi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah.

Pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam APBD yang merupakan siklus pengelolaan keuangan daerah. Dalam rangka sinkronisasi proses perencanaan dan penganggaran dan keserasian antar dokumen, maka terkait dengan pengelolaan keuangan berupa struktur APBD, nomenklatur program, kegiatan, sub kegiatan serta kode rekening yang disajikan dokumen KUA PPAS dan RAPBD akan berpedoman kepada Peraturan Pemerintah

Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-861 Tahun 2026.

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah diarahkan selain untuk mempercepat realisasi visi dan misi daerah juga untuk mengatasi berbagai permasalahan pokok seperti penanganan kemiskinan, perluasan kesempatan kerja, perbaikan mutu pelayanan publik utamanya pelayanan dasar, peningkatan produktivitas sektor dominan yang mempengaruhi PDRB, dan perluasan daya saing investasi.

Untuk mewujudkan kebijakan tersebut perlu didukung kebijakan penajaman APBD yang sesuai visi dan misi daerah melalui efektifitas dan efisiensi belanja daerah dan upaya peningkatan pendapatan daerah yang tetap mendukung iklim investasi daerah serta adanya komitmen seluruh elemen pengelola keuangan daerah, sehingga tercipta pengelolaan keuangan yang tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

2.2.1 Kemampuan Keuangan Daerah

Kapasitas Fiskal Daerah (KFD) adalah kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah tertentu dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan, belanja tertentu, dan pengeluaran pembiayaan daerah tertentu. Peta Kapasitas Fiskal Daerah adalah gambaran kemampuan keuangan daerah yang dikelompokkan berdasarkan rasio Kapasitas Fiskal Daerah.

Kapasitas Fiskal juga menjadi pertimbangan dalam pemberian pinjaman sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah. Selain itu, kapasitas fiskal daerah juga menjadi pertimbangan untuk mengusulkan pemerintah daerah sebagai penerima hibah sebagaimana diatur Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah.

Rasio Kapasitas Fiskal Daerah (RKFD) kabupaten/kota diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97 Tahun 2025 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1161), sebagai berikut:

Tabel 2.11 Kategori Fiskal Daerah dalam PMK

PMK Nomor 97 Tahun 2025													
Formula:													
$RKFD_{kabupaten/kota-i} = \frac{KFD_{kabupaten/kota-i}}{Belanja\ Pegawai_{kabupaten/kota-i}}$													
Keterangan:													
$RKFD_{kabupaten/kota-i}$	= Rasio Kapasitas Fiskal Daerah suatu kabupaten/kota												
$KFD_{kabupaten/kota-i}$	= Kapasitas Fiskal Daerah suatu kabupaten/kota												
$Belanja\ Pegawai_{kabupaten/kota-i}$	= Belanja Pegawai suatu kabupaten/kota												
<table><tr><th>Rentang RKFD</th><th>Kategori KFD</th></tr><tr><td>$RKFD < 0,947$</td><td>Sangat rendah</td></tr><tr><td>$0,947 \leq RKFD < 1,203$</td><td>Rendah</td></tr><tr><td>$1,203 \leq RKFD < 1,459$</td><td>Sedang</td></tr><tr><td>$1,459 \leq RKFD < 1,715$</td><td>Tinggi</td></tr><tr><td>$1,715 \leq RKFD$</td><td>Sangat tinggi</td></tr></table>		Rentang RKFD	Kategori KFD	$RKFD < 0,947$	Sangat rendah	$0,947 \leq RKFD < 1,203$	Rendah	$1,203 \leq RKFD < 1,459$	Sedang	$1,459 \leq RKFD < 1,715$	Tinggi	$1,715 \leq RKFD$	Sangat tinggi
Rentang RKFD	Kategori KFD												
$RKFD < 0,947$	Sangat rendah												
$0,947 \leq RKFD < 1,203$	Rendah												
$1,203 \leq RKFD < 1,459$	Sedang												
$1,459 \leq RKFD < 1,715$	Tinggi												
$1,715 \leq RKFD$	Sangat tinggi												
Kabupaten Bantul mempunyai nilai 0,035													
Kategori: Rendah													

Sumber: Peraturan Menteri Keuangan RI.

Terdapat empat faktor utama yang mempengaruhi kapasitas fiskal daerah, yang mencakup pendapatan pajak, dana transfer dari pemerintah pusat, kondisi ekonomi lokal, serta kepemimpinan dan manajemen keuangan daerah. Pendapatan pajak merupakan komponen signifikan karena mencerminkan kemampuan daerah dalam mengelola dan memungut pajak secara efektif. Semakin tinggi pendapatan pajak yang diperoleh, semakin kuat kemampuan keuangan daerah untuk membiayai berbagai program pembangunan.

Namun, efektivitas pengelolaan pajak ini juga bergantung pada kualitas regulasi, sistem pengumpulan pajak, dan tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar pajak. Selain itu, dana transfer dari pemerintah pusat juga memainkan peran penting, terutama bagi daerah yang memiliki keterbatasan dalam mengembangkan sumber PAD. Dana transfer ini, seperti Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK), berfungsi sebagai penyeimbang fiskal antar daerah yang bertujuan untuk memperkecil kesenjangan keuangan.

2.2.2 Proyeksi Pendapatan dan Belanja

Dalam pengelolaan keuangan yang lebih efisien dan efektif antara lain harus memenuhi persyaratan antara lain proyeksi peningkatan pendapatan daerah, belanja pemerintah dan defisit anggaran yang tidak melampaui ambang batas sesuai dengan peraturan yang ada, serta penetapan asumsi-asumsi yang akurat sebagai dasar rencana pengelolaan keuangan daerah.

Berdasarkan strategi peningkatan pendapatan daerah dan proyeksi variabel-variabel keuangan daerah di atas maka proyeksi anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2027 dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 2.12 Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun 2027

NO	URAIAN	APBD 2026	KUA TAHUN 2027	SELISIH (NAIK/TURUN)
4	PENDAPATAN DAERAH	2,311,219,955,330.00	2,013,392,738,248.00	(297,827,217,082.00)
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	753,349,327,920.00	795,135,000,000.00	41,785,672,080.00
4.1.01	Pajak Daerah	408,211,152,680.00	425,766,818,711.00	17,555,666,031.00
4.1.02	Retribusi Daerah	251,312,134,106.00	271,408,332,282.00	20,096,198,176.00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	20,199,694,868.00	20,199,694,868.00	-
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	73,626,346,266.00	77,760,154,139.00	4,133,807,873.00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1,557,870,627,410.00	1,218,257,738,248.00	(339,612,889,162.00)
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1,380,125,281,000.00	1,059,901,476,362.00	(320,223,804,638.00)
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	177,745,346,410.00	158,356,261,886.00	(19,389,084,524.00)
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	-	-
4.3.01	Pendapatan Hibah	-	-	-
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-
	Jumlah Pendapatan	2,311,219,955,330.00	2,013,392,738,248.00	(297,827,217,082.00)
5	BELANJA DAERAH	2,443,557,413,968.89	2,141,502,405,807.22	(302,055,008,161.67)
5.1	BELANJA OPERASI	1,964,789,992,422.29	1,661,998,452,314.22	(302,791,540,108.07)
5.1.01	Belanja Pegawai	1,002,139,576,313.04	810,156,715,607.22	(191,982,860,705.82)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	869,798,749,699.25	816,175,476,057.00	(53,623,273,642.25)
5.1.03	Belanja Bunga	-	-	-
5.1.04	Selanjuta Subsidi	-	-	-
5.1.05	Belanja Hibah	88,181,866,410.00	30,806,460,650.00	(57,375,405,760.00)

NO	URAIAN	APBD 2026	KUA TAHUN 2027	SELISIH (NAIK/TURUN)
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	4,669,800,000.00	4.859.800.000,00	190,000,000.00
5.2	BELANJA MODAL	160,425,656,347.60	144,037,279,034.00	(16,388,377,313.60)
5.2.01	Belanja Modal Tanah	-	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	38,052,115,908.00	26,984,952,280.00	(11,067,163,628.00)
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	29,352,886,415.60	37,507,556,840.00	8,154,670,424.40
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	84,233,782,002.00	78,427,769,914.00	(5,806,012,088.00)
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	8,786,872,022.00	30.000.000,00	(8,756,872,022.00)
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	-	87.000.000,00	87.000.000,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	-
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	-
5.4	BELANJA TRANSFER	313,341,765,199.00	330,466,674,459.00	17,124,909,260.00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	37,271,261,169.00	55,835,530,429.00	18,564,269,260.00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	276,070,504,030.00	274,631,144,030.00	(1,439,360,000.00)
	Jumlah Belanja	2,443,557,413,968.89	2,141,502,405,807.22	(302,055,008,161.67)
	Total Surplus/(Defisit)	(132,337,458,638.89)	(128,109,667,559.22)	4,227,791,079.67
6	PEMBIAYAAN DAERAH	132,337,458,638.89	128,109,667,559.22	(4,227,791,079.67)
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	132,337,458,638.89	153,109,667,559.22	20,772,208,920.33
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA)	132,337,458,638.89	153,109,667,559.22	20,772,208,920.33
6.1.02	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-
6.1.03	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	-	-	-
6.1.06	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	132,337,458,638.89	153,109,667,559.22	20,772,208,920.33
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	25,000,000,000.00	25,000,000,000.00
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-
6.2.02	Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	-	25,000,000,000.00	25,000,000,000.00
6.2.03	Pembayaran Pokok Utang	-	-	-
6.2.04	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	-	25,000,000,000.00	25,000,000,000.00
	Pembiayaan Netto	132,337,458,638.89	128,109,667,559.22	(4,227,791,079.67)

NO	URAIAN	APBD 2026	KUA TAHUN 2027	SELISIH (NAIK/TURUN)
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah tahun Berjalan	-	-	-

Sumber: BPKPAD Kabupaten Bantul (diolah), 2026

BAB III

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)

3.1. Asumsi Dasar Ekonomi Makro Tahun 2027 Dalam APBN

Kebijakan ekonomi yang dicanangkan pemerintah pusat tahun 2027 dapat menjadi tantangan maupun peluang bagi perekonomian Kabupaten Bantul ke depan. Kerangka perekonomian nasional secara makro dalam tahun 2027 disusun berdasarkan kondisi umum perekonomian Indonesia. Kebijakan perekonomian Indonesia yang diperkirakan dapat mempengaruhi perekonomian Kabupaten Bantul meliputi sasaran dan kebijakan yang terkait dengan pertumbuhan ekonomi, stabilitas ekonomi yang tercermin dalam stabilitas moneter, fiskal dan neraca pembayaran, serta kebutuhan investasi untuk mendorong pencapaian sasaran yang telah ditetapkan.

Beberapa indikator utama ekonomi makro pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2027, menjadi tolok ukur dalam penentuan RAPBN tahun 2027. Oleh karena itu dalam asumsi dasar penyusunan RAPBD perlu mempertimbangkan indikator ekonomi makro pembangunan nasional tersebut, diantaranya:

Tabel 3.1.
Indikator Ekonomi Makro di Indonesia Tahun 2027

No	Indikator Ekonomi Makro	Asumsi Tahun 2027
1.	Laju Pertumbuhan ekonomi	6,3 - 7,5 %
2.	Tingkat kemiskinan	6,0 – 6,5 %
3.	Indeks Modal Manusia	0,58
4.	Rasio Gini	0,375 – 0,378
5.	Tingkat pengangguran Terbuka	4,30 – 4,87 %

Sumber : RPJMN 2025-2029

3.1.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi

Dalam jangka menengah, strategi ekonomi Indonesia diarahkan untuk mencapai pertumbuhan yang lebih tinggi, merata, dan stabil. Pembangunan ekonomi Indonesia bertumpu pada tiga pilar utama yaitu: pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pemerataan manfaat pembangunan, dan stabilitas nasional. Melalui kombinasi ketiga pilar tersebut, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi di atas 6 persen dalam jangka pendek dan menuju 8

persen dalam jangka menengah (2029) sehingga pertumbuhan tidak hanya kuat secara agregat tetapi juga inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat.

Pengelolaan ekonomi Indonesia mengejar pertumbuhan ekonomi potensial dan secara langsung meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini ditempuh melalui sinergi kebijakan fiskal, moneter, dan peran lembaga pembiayaan pembangunan seperti Danantara. Sinergi ini diharapkan mampu mendorong sektor keuangan berputar lebih cepat, sektor riil bergerak lebih kuat, sehingga meningkatkan penyerapan tenaga kerja, mendorong daya beli, peningkatan konsumsi serta menggairahkan investasi yang pada gilirannya akan menciptakan pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dan percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pertumbuhan ekonomi tahun 2027 diperkirakan tumbuh kuat pada kisaran 6,3 - 7,5 persen. Stabilisasi harga, daya beli yang terjaga, serta peningkatan kesempatan kerja diharapkan mampu memperkuat konsumsi rumah tangga sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi. Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, pendekatan pembangunan bertumpu pada penambahan modal, tenaga kerja, dan peningkatan produktivitas. Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas lahir dari inovasi dan efisiensi, yang terefleksi dalam peningkatan Total Factor Productivity (TFP). Peningkatan produktivitas ditempuh melalui empat intervensi strategis yaitu: 1. People, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan tenaga kerja terampil; 2. Process, efisiensi operasional serta adopsi teknologi; 3. Product, penciptaan nilai tambah yang lebih tinggi dan peningkatan daya saing; dan 4. Policy, regulasi yang mendukung inovasi dan iklim usaha.

Strategi pertumbuhan juga diperkuat melalui pengembangan sektor-sektor yang resilien dan memiliki daya serap tenaga kerja yang tinggi. Strategi ini didukung oleh kebijakan fiskal yang kolaboratif, berkualitas dan berkelanjutan. APBN berperan sebagai katalis untuk mendorong aktivitas ekonomi dan meningkatkan partisipasi sektor swasta, sekaligus menjaga fiskal yang sehat dan kredibel. Melalui sinergi antar sektor, yakni sektor keuangan yang bergerak cepat, sektor riil yang kuat, serta iklim investasi yang kondusif. Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi menuju 8 persen pada tahun 2029.

3.1.2 Tingkat Kemiskinan

Tingkat kemiskinan pada tahun 2027 melanjutkan tren menurun. Per September 2025, tingkat kemiskinan turun menjadi 8,3 persen dengan jumlah penduduk miskin sebesar 23,4 juta orang. Angka kemiskinan ini merupakan yang terendah dalam satu dekade terakhir (2015-2025) bahkan terendah sejak tingkat kemiskinan diumumkan oleh BPS di tahun 1960. Secara spasial, tingkat kemiskinan per September 2025 di perkotaan berada pada level 6,6 persen atau sebanyak 11,2 juta orang penduduk miskin. Sementara itu, tingkat kemiskinan di perdesaan berada pada level 10,7 persen atau sebanyak 12,2 juta orang penduduk miskin. Pulau Maluku dan Papua menjadi pulau dengan persentase penduduk miskin terbesar di Indonesia dengan total 18,2 persen diikuti Bali dan Nusa Tenggara dengan 11,3 persen. Tingkat kemiskinan ekstrem pun berada pada tren yang semakin menurun. Per 2025, tingkat kemiskinan ekstrem mencapai 0,85 persen dan ditargetkan menuju 0 persen di tahun 2026.

Pencapaian pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan perlu diiringi dengan upaya pembangunan inklusif untuk memastikan manfaat pembangunan dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat di seluruh wilayah. Tantangan kemiskinan, ketimpangan, dan keterbatasan akses layanan dasar menuntut kebijakan yang terintegrasi, dan berbasis data yang akurat. Oleh karena itu, Pemerintah berupaya untuk merumuskan kerangka kebijakan yang tidak hanya mendorong akselerasi pertumbuhan, tetapi juga memastikan pemerataan kesejahteraan melalui penurunan tingkat kemiskinan serta penguatan pembangunan kewilayahan dengan sinergi lintas sektor, serta optimalisasi kebijakan fiskal sebagai instrumen transformasi sosial-ekonomi.

Kerangka kebijakan penurunan kemiskinan mengacu pada Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 yang menekankan pada akselerasi penurunan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem. Instruksi Presiden tersebut menegaskan perlunya penyelarasan program dengan menggunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai basis perencanaan, penargetan, dan pemantauan. DTSEN menjadi instrumen utama untuk memastikan ketepatan sasaran dan efektivitas kebijakan fiskal. Dengan data yang akurat, program perlindungan sosial dapat lebih tepat sasaran sehingga mengurangi inclusion dan exclusion error, serta meningkatkan efisiensi belanja. Kerangka kebijakan ini memerlukan sinergi kuat antara Pemerintah

Pusat dan Pemerintah Daerah terutama dalam mengoptimalkan pengentasan kemiskinan ekstrem.

Strategi pengentasan kemiskinan ditekankan pada tiga pilar utama sebagaimana diamanatkan Inpres Nomor 8 Tahun 2025. Pilar pertama, pengurangan beban pengeluaran masyarakat, ditempuh melalui penguatan perlindungan sosial adaptif yang menempatkan bantuan pangan, bantuan tunai, dan subsidi layanan dasar sebagai instrumen stabilisasi konsumsi rumah tangga miskin. Pilar kedua, peningkatan pendapatan, ditempuh terutama melalui penguatan pendidikan, pengembangan ekonomi desa, koperasi, dan UMKM, serta transformasi dari paradigma bantuan sosial menjadi peningkatan kapasitas, akses modal keterampilan, dan kemandirian masyarakat miskin. Pilar ketiga, pengurangan kantong-kantong kemiskinan, ditempuh melalui peningkatan infrastruktur dasar seperti konektivitas jalan desa, pelayanan dasar, dan fasilitas pendidikan. Ketiga pilar tersebut akan dijalankan secara terintegrasi lintas K/L dan pemerintah daerah untuk memastikan dampak yang lebih terukur dan berkelanjutan. Pemerintah menargetkan penurunan kemiskinan menuju 4,5–5,0 persen pada 2029.

Dalam jangka menengah, strategi pengentasan kemiskinan tersebut menjadi fondasi bagi pembangunan inklusif yang merata di seluruh wilayah Indonesia. Dengan menempatkan pengentasan kemiskinan dan pembangunan sumber daya manusia sebagai prioritas fiskal jangka menengah, kebijakan fiskal tidak hanya berfungsi sebagai instrumen stabilisasi ekonomi, tetapi juga sebagai katalis transformasi sosial-ekonomi. Pembangunan inklusif yang berkeadilan akan memperkuat ketahanan masyarakat terhadap guncangan eksternal, meningkatkan produktivitas, dan daya saing ekonomi nasional.

3.1.3 Indeks Modal Manusia

Kualitas modal manusia terus meningkat. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tercatat terus naik mencapai 75,90 di 2025, meningkat sebesar 0,88 poin (1,2 persen) dibandingkan tahun sebelumnya. Pertumbuhan ini juga lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan di 2024 serta rata-rata pertumbuhan tahunan selama 2020-2024. Peningkatan IPM 2025 didorong oleh penyempurnaan pada semua dimensi, yaitu umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Secara spasial, IPM tertinggi adalah DKI Jakarta (85,05) sedangkan yang terendah adalah Papua Pegunungan (54,91). Sejak 2025, Pemerintah mulai mengadopsi Indeks Modal Manusia

(IMM). Indikator ini menjadi salah satu sasaran pembangunan pengganti IPM yang memberikan gambaran lebih komprehensif atas kualitas SDM Indonesia. Target IMM 2026 sebesar 0,57.

Kualitas SDM merupakan pilar utama untuk menyongsong Indonesia Emas 2045. Tantangan demografi dan dinamika global yang tidak pasti harus diantisipasi dengan membangun kualitas SDM yang memadai dan kompeten. Fokus kebijakan diarahkan pada peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan yang diukur dengan menggunakan Indeks Modal Manusia (IMM). Di tahun 2027, IMM ditargetkan terus membaik mencapai nilai 0,58.

Kualitas SDM merupakan pilar utama untuk menyongsong Indonesia Emas 2045. Tantangan demografi dan dinamika global yang tidak pasti harus diantisipasi dengan membangun kualitas SDM yang memadai dan kompeten. Fokus kebijakan diarahkan pada peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan yang diukur dengan menggunakan Indeks Modal Manusia (IMM). Di tahun 2027, IMM ditargetkan terus membaik mencapai nilai 0,58.

3.1.4 Rasio Gini

Tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk masih harus terus dipantau dan diperbaiki. Tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia (Rasio Gini) per September 2025 berada pada level 0,363, lebih rendah dari Rasio Gini per Maret 2025 sebesar 0,375. Peningkatan kualitas tersebut didorong oleh turunnya Rasio Gini, baik di perkotaan maupun perdesaan yang masing-masing mencapai 0,383 dan 0,295. Secara spasial, hampir seluruh provinsi telah mengalami penurunan Rasio Gini di bawah level prapandemi pada September 2025. Pada tahun 2027 Rasio Gini ditargetkan pada level 0,375 – 0,378.

Pertumbuhan ekonomi di masa yang akan datang diharapkan akan meningkatkan penciptaan lapangan kerja sehingga tingkat pengangguran terbuka konsisten turun menjadi 4,00–4,71 persen di 2029. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi harus inklusif sehingga upaya Pemerintah untuk memperbaiki Rasio Gini di 2029 ke angka 0,372–0,375 tercapai.

3.1.5 Tingkat Pengangguran Terbuka

Penciptaan lapangan kerja menunjukkan tren yang positif, sejalan dengan kondisi perekonomian nasional yang tetap kuat. Pada November 2025, jumlah penduduk yang bekerja tercatat sebesar 147,9 juta orang, dengan jumlah pengangguran sebanyak 7,4 juta orang, atau setara dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 4,7 persen. Capaian tersebut menunjukkan perbaikan dibandingkan dengan kondisi pada Agustus 2024, ketika jumlah penduduk bekerja tercatat sebesar 144,6 juta orang dengan jumlah pengangguran sebanyak 7,5 juta orang, atau TPT sebesar 4,9 persen. Peningkatan jumlah penduduk yang bekerja yang disertai penurunan TPT tersebut mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi mampu menciptakan lapangan kerja baru sekaligus menekan angka pengangguran. Dengan realisasi TPT pada Februari 2026 sebesar 4,7 persen, Pemerintah tetap berkomitmen untuk mencapai target TPT pada kisaran 4,44–4,96 persen pada tahun 2026.

Sejalan dengan capaian tersebut, peningkatan kualitas tenaga kerja secara umum turut terjadi di mayoritas wilayah Indonesia, meskipun disparitas antarwilayah masih relatif tampak. Berdasarkan data November 2025, kondisi ketenagakerjaan di sebagian besar wilayah mengalami perbaikan yang tercermin dari penurunan TPT. Secara regional, TPT tertinggi tercatat di Provinsi Papua sebesar 7,1 persen, diikuti oleh Banten, Jawa Barat, dan Papua Barat Daya. Sebaliknya, TPT terendah tercatat di Provinsi Bali sebesar 1,5 persen, yang menegaskan kuatnya pasar tenaga kerja di wilayah tersebut, terutama yang ditopang oleh sektor pariwisata dan jasa. Apabila dibandingkan dengan Agustus 2025, mayoritas provinsi di wilayah Indonesia Timur menunjukkan tren penurunan TPT pada November 2025, meskipun terdapat pengecualian pada beberapa provinsi. Penurunan TPT terbesar tercatat di Kalimantan Tengah dan Jawa Tengah, sementara peningkatan TPT paling signifikan terjadi di DKI Jakarta.

Berdasarkan capaian dan dinamika tersebut, prioritas pembangunan nasional tetap dijaga guna memastikan tercapainya sasaran pembangunan nasional. Pertumbuhan ekonomi ke depan diproyeksikan mampu mendorong penciptaan lapangan kerja secara lebih optimal, sehingga TPT diharapkan dapat terus menurun secara konsisten hingga mencapai kisaran 4,00–4,71 persen pada tahun 2029.

3.2 Asumsi Dasar yang digunakan dalam APBD

Pada tahun 2027, diasumsikan perekonomian sudah mulai pulih. Kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat sudah berjalan normal sehingga perputaran roda perekonomian sudah dapat meningkatkan pendapatan dan daya beli masyarakat. Dalam rangka mendanai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah perlu disusun kerangka pendanaan daerah yang matang meliputi pendapatan, belanja dan pembiayaan.

Beberapa indikator utama ekonomi makro pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2027 yang menjadi tolok ukur dalam penentuan RAPBD Tahun 2027, diantaranya :

Tabel 3.2.
Indikator Ekonomi Makro dan Asumsinya
di Kabupaten Bantul dan DIY Tahun 2027

No	Indikator Ekonomi Makro	Kab. Bantul	DIY
1.	Laju Pertumbuhan Ekonomi	5,60-6,37%	6,3-7,5 %
2.	Tingkat Kemiskinan	9,02-9,32 %	8,5-9,5 %
3.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	84,80-85,83	0,756-0,771
4.	Indeks Gini	0,383-0,408	0,414-0,420
5.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	3,00-3,56%	3,06-3,38%

Sumber : RKPD Kabupaten Bantul 2026

3.2.1 Pertumbuhan Ekonomi

Pada Tahun 2027 Laju Pertumbuhan Ekonomi diprediksikan mencapai 5,60-6,37%. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bantul tahun 2025 sebesar 4,92%, mengalami perlambatan dari capaian tahun 2024. Secara struktural, ekonomi Bantul masih bertumpu pada sektor perdagangan, pertanian, industri pengolahan kecil-menengah, jasa pendidikan, dan pariwisata pendukung kawasan DIY. Walaupun pertumbuhan ekonomi relatif baik, tantangan yang masih dihadapi meliputi ketergantungan pada sektor informal, produktivitas tenaga kerja yang belum merata, serta sensitivitas ekonomi daerah terhadap perlambatan ekonomi nasional dan global.

3.2.2 Tingkat Kemiskinan

Pada Tahun 2027 Tingkat Kemiskinan diprediksikan mencapai 9,02-9,32%. Pada Tahun 2025 tingkat kemiskinan Kabupaten Bantul menurun menjadi 11,54% atau lebih rendah 0,12% dibandingkan tahun 2024. Tingkat kemiskinan di Bantul relatif lebih tinggi dibandingkan dengan kemiskinan DIY dan Nasional. Hal ini menunjukkan bahwa program pengentasan kemiskinan mulai memberikan dampak positif. Pemerintah Kabupaten Bantul menjalankan strategi bantuan sosial, pengembangan UMKM, padat karya, pemberdayaan ekonomi masyarakat, pelatihan tenaga kerja, dan dukungan desa melalui Dana Desa. Namun demikian, tingkat kemiskinan Bantul masih tergolong cukup tinggi dibanding beberapa wilayah lain di DIY. Kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian masyarakat masih rentan secara ekonomi, kualitas pekerjaan informal masih dominan, dan distribusi manfaat pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya merata.

Meskipun demikian, Perangkat Daerah dapat mengkolaborasikan penentuan sasaran dengan data lain sesuai dengan kriteria penerima program masing-masing. Program tersebut memiliki tujuan untuk:

- 1) Mengurangi beban pengeluaran warga miskin;
- 2) Meningkatkan kemampuan dan pendapatan warga miskin;
- 3) Mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro dan kecil;
- 4) Pemberdayaan warga miskin untuk memenuhi kebutuhan dasar; dan
- 5) Mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.

3.2.3 Indeks Pembangunan Manusia

Pada Tahun 2027 Indeks Pembangunan Manusia diprediksikan mencapai 84,80-85,83. Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Bantul tahun 2025 mencapai 83,03 dan termasuk kategori tinggi. Angka ini meningkat dibanding tahun 2024 sebesar 82,05. Peningkatan IPM menunjukkan adanya perbaikan pada akses pendidikan, layanan kesehatan, harapan hidup, dan daya beli masyarakat. Keunggulan yang dimiliki Kabupaten Bantul berupa akses pendidikan yang baik, kedekatan dengan pusat pendidikan DIY, berkembangnya fasilitas kesehatan, serta meningkatnya literasi Masyarakat.

Faktor pendorong tercapainya IPM Kabupaten Bantul tahun 2024 tidak lepas dari dukungan dari:

- a) Usia Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Bantul yang semakin membaik dari 74,64 pada tahun 2023 menjadi 74,80 pada tahun 2024 yang artinya

bahwa derajat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Bantul semakin membaik.

- b) Angka Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Bantul terus mengalami peningkatan, dari 9,79 tahun pada tahun 2023 menjadi 9,81 tahun pada tahun 2024. Capaian ini menunjukkan bahwa minat penduduk usia 15 tahun ke atas di Kabupaten Bantul untuk menempuh jenjang pendidikan yang lebih tinggi semakin meningkat.
- c) Meningkatnya daya beli penduduk sebagai akibat dari penurunan inflasi pada tahun 2024 sebesar 1,73 (sumber data dari table dinamis BPS DIY), juga harga dipasar lebih stabil yang ditunjukkan dengan koefisien variasi harga antar waktu pada tahun 2024 8,63% lebih rendah jika dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar 9,31%, dengan pengeluaran riil perkapita pada tahun 2024 senilai Rp.16.851.000 lebih tinggi dibandingkan tahun 2023 yang hanya sebesar Rp.16.524.000.

3.2.4 Rasio Gini

Pada Tahun 2027 Rasio Gini diprediksikan mencapai 0,383-0,408. Rasio gini Kabupaten Bantul tahun 2025 diperkirakan berada pada 0,427 yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan masih berada pada kategori sedang menuju tinggi. Kondisi ini memperlihatkan bahwa pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya inklusif, manfaat pembangunan lebih banyak terkonsentrasi pada kelompok ekonomi tertentu, serta masih terdapat kesenjangan antarwilayah dan antar kelompok masyarakat. Adapun faktor yang mempengaruhi ketimpangan antara lain perbedaan akses pendidikan, kesenjangan kualitas pekerjaan, dominasi sektor informal, serta konsentrasi aktivitas ekonomi di kawasan perkotaan dan perdagangan.

Faktor pendorong penurunan Rasio Gini adalah mulai berkembangnya industri kerajinan dan kuliner di masyarakat dan tumbuhnya industri-industri yang bergerak dalam ekonomi kreatif serta adanya pemberian bantuan sosial. Adapun yang menjadi faktor penghambat kecilnya penurunan Indeks Gini adalah: 1) Tingkat kemiskinan yang masih relative tinggi; 2) Upah yang diterapkan di Kabupaten Bantul relatif rendah; dan 3) Investasi yang tidak merata.

Upaya meningkatkan perekonomian penduduk berpendapatan menengah ke bawah, akan mengurangi kesenjangan ekonomi. Namun peningkatan pemerataan pendapatan tidak hanya bisa dilakukan oleh pemerintah dengan mengalokasikan bantuan untuk masyarakat menengah

ke bawah, tetapi juga memerlukan dukungan dari masyarakat golongan ekonomi tinggi.

3.2.5 Tingkat Pengangguran Terbuka

Pada Tahun 2027 Tingkat Pengangguran Terbuka diprediksikan mencapai 3,00-3,56%. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan perbandingan antara jumlah pengangguran dengan jumlah angkatan kerja. Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Bantul turun dari 3,62% di tahun 2024 menjadi 3,57% di tahun 2025, namun lebih tinggi dibandingkan DIY. Beberapa upaya yang telah dilakukan untuk mengurangi pengangguran yaitu program peningkatan kesempatan kerja, penempatan tenaga kerja, transmigrasi umum, perlindungan dan pengembangan ketenagakerjaan, peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja, dan perluasan tenaga kerja.

Adapun faktor penghambat belum tercapainya tingkat pengangguran di Kabupaten Bantul adalah:

1. ketidaksiapan tenaga kerja dalam memasuki dunia kerja sehingga menyebabkan *turnover* yang tinggi di perusahaan;
2. ketersediaan lowongan tenaga kerja belum sesuai dengan kegiatan tenaga kerja;
3. krisis ekonomi global berdampak pada industri di dalam maupun di luar Kabupaten Bantul sehingga perusahaan tidak dapat melakukan perekrutan baru;
4. angkatan kerja cenderung meningkat, sedangkan lowongan kerja terbatas.

3.2.6 Lain-lain Asumsi

- a. Apabila terjadi pergeseran asumsi akibat adanya kebijakan dari Pemerintah maupun Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta serta penambahan/pengurangan sumber pendapatan daerah, maka terhadap program/kegiatan yang tercantum dalam KUA dapat dilakukan penambahan atau pengurangan jumlah dan atau anggarannya serta pagu anggaran definitif dalam pembahasan RAPBD tahun anggaran 2027 tanpa melakukan perubahan kesepakatan KUA maupun PPAS.

- b. Penyusunan Kebijakan Umum APBD dan PPAS 2027 diasumsikan juga bahwa kondisi perekonomian stabil, tidak terjadi gejolak sosial dan politik serta tidak terjadi bencana lebih besar lagi seperti pandemi covid 19.
- c. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan *acress* yang besarnya 2,5% dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.
- d. Proyek infrastruktur pusat tetap ada di tahun 2027.

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2027

Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Pendapatan daerah merupakan unsur penting dalam struktur APBD, karena besaran pendapatan daerah sangat menentukan kemampuan daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Pendapatan daerah merupakan unsur penting dalam struktur APBD, karena besaran pendapatan daerah sangat menentukan kemampuan daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, struktur pendapatan daerah terdiri dari:

1. Pendapatan Asli Daerah Merupakan Penerimaan Yang Diperoleh Dari Sektor Yaitu Sebagai Berikut:
 - a. Pajak daerah, terdiri dari PBB Perkotaan dan Perdesaan, BPHTB, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Mineral bukan Logam, Pajak Sarang Burung Walet;
 - b. Retribusi daerah, terdiri retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, retribusi perizinan tertentu dan retribusi perpanjangan izin memperkerjakan tenaga kerja asing.
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, terdiri dari bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah.
 - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah, terdiri dari hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan, penerimaan jasa giro, penerimaan bunga deposito, pendapatan denda retribusi, tuntutan ganti kerugian daerah, penerimaan jasa dana bergulir dan penerimaan lain-lain.
2. Pendapatan transfer adalah dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah lainnya, meliputi Transfer Pemerintah Pusat dan Transfer Antar Daerah. Pendapatan transfer terdiri atas:
 - a. Transfer Pemerintah Pusat
 - 1) Dana Perimbangan
 - a) Dana Transfer Umum

- (1) Bagi hasil pajak/bukan pajak merupakan bagian dana perimbangan untuk mengatasi masalah ketimpangan vertikal (antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah) yang dilakukan melalui pembagian hasil antara Pemerintah Pusat dan Daerah penghasil dari sebagian penerimaan perpajakan dan bukan perpajakan.
 - a. Bagi Hasil Pajak, berupa :
 - Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pertambangan
 - Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan Orang Pribadi
 - Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau
 - b. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam, berupa:
 - Bagi Hasil Dari Iuran Hak Pengusahaan Hutan
 - Bagi Hasil Dari Pungutan Hasil Perikanan
- (2) Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana transfer yang bersifat umum (*block grant*) untuk mengatasi masalah ketimpangan horizontal (antar daerah) dengan tujuan utama pemerataan kemampuan keuangan antar daerah;
- b) Dana Transfer Khusus

Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Non Fisik merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu bertujuan membantu mendanai kegiatan-kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

 - 2) Dana Insentif Daerah;
 - 3) Dana Otonomi Khusus;
 - 4) Dana Keistimewaan;
 - 5) Dana Desa.
- b. Transfer Antar-Daerah
 - 1) Bagi hasil pajak dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya; dan
 - 2) Bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya.
3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah, terdiri dari sebagai berikut:
 - a. Pendapatan hibah meliputi pendapatan hibah dari pemerintah dan pendapatan hibah dari badan/lembaga/organisasi swasta dalam negeri;
 - b. Dana Darurat;

- c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adanya otonomi daerah dan desentralisasi memberi kewenangan yang luas kepada daerah untuk mengatur dan mengelola pendapatan daerah sehingga diharapkan dapat memacu daerah menuju tingkat kemampuan keuangan daerah yang lebih baik yang tercermin semakin meningkatnya kapasitas fiskal dan berkurangnya celah fiskal dari tahun ke tahun. Upaya meningkatkan kapasitas fiskal dengan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah yang merupakan komponen kapasitas fiskal daerah, sehingga arah kebijakan pendapatan daerah adalah optimalisasi dan peningkatan kapasitas fiskal daerah untuk memaksimalkan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan penyelenggaraan pelayanan publik melalui optimalisasi sumber-sumber pendapatan yang selama ini menjadi sumber pendapatan asli daerah yaitu dengan optimalisasi pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, serta berupaya menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah yang baru dengan memanfaatkan potensi lokal yang ada di wilayah Kabupaten Bantul.

Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2027 Pemerintah Kabupaten Bantul tetap berupaya untuk lebih mengoptimalkan potensi PAD melalui:

- 1) Optimalisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah melalui Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak dan Retribusi Daerah sebagai berikut:
 - a) Meningkatkan mutu pelayanan publik kepada wajib pajak/ retribusi daerah dengan memberikan kecepatan/kemudahan dalam pelayanan pembayaran pajak, akses informasi dan kemudahan dalam pengurusan pajak.
 - b) Memperbaiki dan memperluas basis data objek dan subjek pajak/retribusi daerah.
 - c) Memberikan *reward* bagi pamong desa dan dukuh yang wilayahnya telah lunas sebelum jatuh tempo.
 - d) Mengembangkan pelaporan pajak secara online untuk wajib pajak yang melakukan sistem pemungutan secara *self assessment*.
- 2) Mengoptimalkan pengelolaan manajemen kas daerah dengan memanfaatkan idle cash dalam bentuk deposito;
- 3) Optimalisasi pendayagunaan aset daerah yang berpotensi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah;

- 4) Meningkatkan kontribusi penerimaan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD melalui upaya memperkuat permodalan perusahaan milik daerah/BUMD;
- 5) Mengoptimalkan penerimaan yang berasal dari bagi hasil pajak melalui kerjasama instansi vertikal dan daerah dalam menyerap basis pajak terkait;
- 6) Meningkatkan sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pendapatan daerah misal dengan memperbaiki fasilitas obyek retribusi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD) mengamanatkan adanya restrukturisasi dan integrasi pajak daerah serta retribusi, yang dilakukan dalam rangka efisiensi pelayanan publik di daerah, mendukung iklim investasi dan kemudahan berusaha, namun tetap menjaga penerimaan PAD. Kabupaten Bantul telah menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan keuangan daerah.

Kebijakan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Pengelolaan Kekayaan Daerah merupakan penerimaan daerah yang berasal dari hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Penerimaan ini antara lain dari Bank Pembangunan Daerah, Perusahaan Daerah, deviden dan Penyertaan Modal Daerah kepada pihak ketiga. Untuk meningkatkan kinerja komponen pendapatan ini, dilakukan melalui langkah-langkah adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kemampuan manajemen pengelolaan bisnis Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dapat meningkatkan laba BUMD;
- 2) Menerapkan strategis bisnis yang tepat, serta meningkatkan sinergisitas antar BUMD untuk meningkatkan daya saing perusahaan
- 3) Memperkuat struktur permodalan BUMD, antara lain melalui PMD, dan lain-lain;
- 4) Mengoptimalkan pendapatan BLUD.

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik Pemerintah Daerah. Penerimaan ini berasal dari hasil penjualan barang milik daerah, dan penerimaan jasa giro. Untuk meningkatkan kinerja Lain- lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Pendapatan transfer terdiri dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan Pendapatan Transfer Antar Daerah. Pendapatan Transfer Pemerintah

Pusat tahun 2027 yang bersumber dana DAK Fisik dan Non Fisik belum diperhitungkan.

Pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD) yang tujuannya adalah untuk penguatan *local taxing power* dan meningkatkan kualitas belanja daerah agar lebih efisien, produktif, dan akuntabel. Salah satu kebijakan terkait perpajakan daerah yang diatur dalam UU HKPD ini adalah adanya kebijakan opsen. Opsen memperluas sinergi pemungutan dan mempercepat penyaluran pajak yang sebelumnya dibagihasilkan. Sehingga dalam jangka panjang diharapkan tercapai peningkatan penerimaan pajak. Opsen adalah pungutan tambahan pajak menurut persentase tertentu. Ada 3 jenis pajak daerah yang dikenai opsen yaitu opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dan opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB). Pemerintah Kabupaten Bantul telah menerapkan dalam penganggaran Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (Opsen PKB) dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Opsen BBNKB), penerapannya diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

4.2 Target Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

a. Prediksi Sumber Pendanaan Pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2027

Tuntutan peningkatan pendapatan daerah semakin besar seiring dengan semakin banyaknya kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan kepada daerah. Daerah harus lebih kreatif dalam menggali potensi sumber pendapatan asli daerah. Sekarang ini pemerintah daerah masih mengandalkan dana perimbangan yang merupakan transfer keuangan oleh pusat kepada daerah dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Dana perimbangan memiliki kontribusi yang besar dari pendapatan daerah karena pendapatan asli daerah masih relatif kecil bila dibandingkan dengan dana perimbangan ($\pm 30\%$). Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Bantul selama ini dalam pembiayaan administrasi pemerintahan dan pembangunan masih sangat tergantung dari Pemerintah Pusat, terutama membiayai belanja pegawai berupa gaji.

Berdasarkan PP Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, struktur pendapatan daerah diuraikan menjadi Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Realisasi pendapatan tahun 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 dan pendapatan tahun 2026, serta prediksi anggaran pendapatan daerah tahun 2027 tertuang dalam tabel berikut ini:

Tabel 4.1. Realisasi Pendapatan Tahun 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 dan Pendapatan Tahun 2026, dan Prediksi Pendapatan Tahun 2027 di Kabupaten Bantul sesuai PP No.12 Tahun 2019

No	Uraian	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Tahun 2025	Pendapatan Tahun 2026	KUA Tahun 2027
	PENDAPATAN							
	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	<u>491.670.724.028,10</u>	<u>540.572.423.372,80</u>	<u>587.435.038.672,92</u>	<u>638.567.864.259,57</u>	<u>766.131.199.608,89</u>	<u>753.349.327.920,00</u>	<u>795.135.000.000,00</u>
	Pajak Daerah	203.758.210.969,00	252.857.438.493,70	269.918.537.186,00	295.769.695.358,90	414.970.629.456,50	408.211.152.680,00	425.766.818.711,00
	Retribusi Daerah	27.767.869.814,00	42.178.624.886,07	42.382.506.560,80	307.622.088.520,00	312.457.635.841,00	251.312.134.106,00	271.408.332.282,00
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	20.053.289.569,97	20.839.915.416,20	20.515.070.732,29	20.083.794.982,30	20.838.377.004,15	20.199.694.868,00	20.199.694.868,00
	Lain-lain PAD Yang Sah	240.091.353.675,13	224.696.444.576,83	254.618.924.193,83	15.092.285.398,37	17.864.557.307,24	73.626.346.266,00	77.760.154.139,00
	PENDAPATAN TRANSFER	<u>1.656.161.604.258,00</u>	<u>1.712.037.734.603,00</u>	<u>1.821.467.142.818,65</u>	<u>1.968.055.104.226,00</u>	<u>1.746.164.380.877,00</u>	<u>1.557.870.627.410,00</u>	<u>1.218.257.738.248,00</u>
	Transfer Pemerintah Pusat	<u>1.394.234.560.549,00</u>	<u>1.469.251.642.781,0</u>	<u>1.541.171.838.737,00</u>	<u>1.678.657.691.985,00</u>	<u>1.590.136.561.180,00</u>	<u>1.380.125.281.000,00</u>	<u>1.059.901.476.362,00</u>
	Dana Perimbangan	<u>1.254.511.869.549,00</u>	<u>1.309.437.261.781,00</u>	<u>1.355.883.247.737,00</u>	<u>1.500.030.298.985,00</u>	<u>1.447.496.790.096,00</u>	<u>1.277.434.882.000,00</u>	
	Dana Bagi Hasil Pajak dan SDA	43.031.166.560,00	36.764.154.907,00	34.766.685.062,00	35.169.801.000,00	32.006.870.000,00	12.747.285.000,00	16.878.002.362,00
	Dana Alokasi Umum	911.168.107.000,00	902.030.732.566,00	954.626.878.777,00	1.022.019.834.045,00	1.036.581.653.691,00	914.464.154.000,00	940.333.075.000,00
	Dana Alokasi Khusus	300.312.595.989,00	370.642.374.308,00	366.489.683.898,00	442.840.663.940,00	378.908.266.405,00	350.223.443.000,00	
	Dana Insentif Daerah / Insentif Fiskal	30.323.619.000,00	58.566.684.000,00	58.809.566.000,00	51.233.491.000,00	22.624.496.000,00	0,00	0,00
	Dana Desa	109.399.072.000,00	101.247.697.000,00	126.479.025.000,00	127.393.902.000,00	120.015.275.084,00	102.690.399.000,00	102.690.399.000,00
	Transfer Antar Daerah	<u>261.927.043.709,00</u>	<u>242.786.091.822,00</u>	<u>280.295.304.081,65</u>	<u>289.397.412.241,00</u>	<u>156.027.819.697,00</u>	<u>177.745.346.410,00</u>	<u>158.356.261.886,00</u>

No	Uraian	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Tahun 2025	Pendapatan Tahun 2026	KUA Tahun 2027
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	163.305.276.389,00	192.023.344.227,00	201.588.461.475,00	200.933.285.798,00	124.738.816.027,00	108.340.869.652,00	108.340.869.652,00
	Bantuan Keuangan Khusus dari Provinsi	98.621.767.320,00	50.762.747.595,00	78.706.842.606,65	88.464.126.443,00	31.289.003.670,00	69.404.476.758,00	50.015.392.234,00
	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	<u>87.823.373.069,00</u>	<u>7.967.281.219,74</u>	<u>7.182.235.863,00</u>	<u>2.790.385.919,00</u>	<u>341.262.977,00</u>		
	Pendapatan Hibah	6.167.255.751,00	6.725.000.000,00	7.164.398.619,00	2.790.385.919,00	341.262.977,00		
	Pendapatan Lainnya	81.656.117.318,00	1.242.281.219,74	17.837.244,00				
	Jumlah Pendapatan	<u>2.235.655.701.355,10</u>	<u>2.260.577.439.195,54</u>	<u>2.416.084.417.354,57</u>	<u>2.609.413.354.404,57</u>	<u>2.512.636.843.462,89</u>	<u>2.311.219.955.330,00</u>	<u>2.013.392.738.248,00</u>

Sumber : BPKPAD, tahun 2026

b. Proyeksi PAD Kabupaten Bantul Tahun 2027**1) Proyeksi Rincian Pajak Daerah Tahun 2027**

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu tolok ukur dari perkembangan ekonomi daerah. Besarnya PAD secara umum menunjukkan kemajuan aktivitas perekonomian pada masyarakat yang dapat dijadikan obyek pungut. Oleh karena itu, pencapaian target PAD merupakan faktor paling penting dalam menilai laju pembangunan di daerah.

Sesuai amanat Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD) yaitu restrukturisasi dan integrasi pajak daerah dimana pajak daerah yang dulunya ada 16 jenis menjadi 14 jenis pajak, maka pajak perlu didorong sehingga transparansi pembagian pajak daerah antara provinsi dengan kabupaten bisa lebih baik, dan penguatan lokal *taxing power* dapat terwujud.

Beberapa jenis penerimaan pajak daerah yang dapat didorong peningkatan realisasinya pada tahun mendatang terutama:

- 1) Pajak Hotel sebenarnya masih punya potensi yang cukup tinggi untuk berkembang di Kabupaten Bantul seiring dengan berkembangnya wilayah DIY termasuk Bantul sebagai daerah tujuan wisata utama di Indonesia. Sejauh ini hanya ada dua hotel berbintang yang dipungut pajak hotel, sedangkan hotel lain masih berstatus melati. Potensi lain dari pajak hotel yang dapat lebih diintensifkan adalah rumah kos;
- 2) Pajak Restoran sejauh ini yang banyak dipungut adalah dari catering yang melayani kegiatan-kegiatan di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Bantul, sedangkan restoran dan rumah makan lainnya perlu diintensifkan pemungutannya;
- 3) Pajak reklame masih dapat dikembangkan lagi dengan penentuan spot-spot reklame yang layak dan penguatan koordinasi dengan pihak terkait tata ruang wilayah daerah karena adanya batasan jumlah maksimal reklame pada titik tertentu;
- 4) Pajak parkir masih bisa dikembangkan, mengingat setiap tahun jumlah kendaraan meningkat.

Pajak sebenarnya masih memiliki potensi yang besar seiring dengan berkembangnya aktivitas ekonomi masyarakat terutama di sektor perdagangan. Meskipun demikian masih terdapat beberapa permasalahan yaitu:

- 1) Belum optimalnya fungsi koordinasi antar Perangkat Daerah yang mempunyai keterkaitan dengan pengelolaan pendapatan Daerah.

- 2) Sistem pengawasan pemungutan pajak dan retribusi belum optimal sehingga perlu ditingkatkannya sistem pengawasan terhadap kepatuhan wajib pajak.
- 3) Sistem administrasi pencatatan penerimaan/pembayaran daerah dengan memanfaatkan teknologi informasi belum seluruhnya bisa diterapkan pada pemungutan pajak dan retribusi daerah.
- 4) Potensi obyek pajak dan obyek retribusi belum sepenuhnya bisa dikembangkan dengan optimal.

2) Proyeksi Retribusi Daerah Tahun 2027

Retribusi Daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Beberapa hal yang mempengaruhi pemungutan Retribusi Daerah, sebagai berikut:

- 1) Beberapa kebijakan dalam rangka optimalisasi penerimaan Retribusi Daerah adalah:
 - a) Pengembangan aplikasi sistem pemungutan Retribusi Daerah secara elektronik;
 - b) Menerapkan *Banking System* dalam melakukan pembayaran Retribusi Daerah;
 - c) Menerapkan transaksi non tunai;
 - d) Memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat atau wajib retribusi daerah melalui Retribusi Perizinan dan Non Perizinan, yang dilaksanakan melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP);
 - e) Menerapkan sistem *e-ticketing* untuk menggantikan pelayanan retribusi daerah yang masih menggunakan karcis.
- 2) Beberapa kebijakan yang berpengaruh terhadap penurunan capaian terhadap penerimaan Retribusi Daerah adalah:
 - a) Adanya kebijakan Pemerintah yang menghapus beberapa jenis Retribusi Daerah, seperti: Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dan Retribusi Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing;
 - b) Sarana dan prasarana pemungutan Retribusi Daerah yang sudah tidak layak digunakan, namun belum dilakukan perbaikan/ peremajaan.

Pos retribusi daerah yang dominan di Kabupaten Bantul dan terkait erat dengan pulihnya perekonomian daerah diharapkan akan kembali memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah, yaitu: retribusi tempat rekreasi dan olahraga, retribusi pelayanan pasar, retribusi penjualan produksi usaha daerah, dan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, retribusi pengujian kendaraan bermotor serta retribusi parkir.

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1 Kebijakan Terkait dengan Perencanaan Belanja

Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana, merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang berkenaan. Belanja daerah dikelompokkan menjadi yaitu:

1. Belanja Operasi yang peruntukannya meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial.
2. Belanja Modal
3. Belanja Tidak Terduga
4. Belanja Transfer yang meliputi belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa dan belanja bantuan keuangan kepada provinsi dan kabupaten/kota/pemerintah desa.

Berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah disusun dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja yaitu suatu sistem anggaran yang mengutamakan hasil kerja dan output dari setiap program dan kegiatan yang direncanakan. Setiap anggaran belanja daerah yang dialokasikan untuk melaksanakan program dan kegiatan harus didasarkan atas hasil dan output yang jelas dan terukur.

Alokasi belanja daerah disesuaikan dengan kemampuan pendanaan daerah dengan memperhatikan kebijakan daerah untuk mendukung prioritas daerah dalam rangka pencapaian visi dan misi daerah yang sudah ditetapkan pada RPJMD, serta memperhatikan kebutuhan belanja daerah yang bersifat wajib mengikat dan *earmarked* sebagai berikut:

1. Belanja daerah memprioritaskan terlebih dahulu pos belanja yang mengikat, antara lain belanja pegawai, belanja bunga dan pembayaran pokok pinjaman, belanja subsidi, belanja bagi hasil, serta belanja barang dan jasa yang wajib dikeluarkan pada tahun yang bersangkutan;

2. Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan belanja pegawai ASN dan pemberian gaji ke-13 serta tunjangan hari raya dengan memperhitungkan rencana kenaikan gaji dan tunjangannya (*acress* maksimal 2,5% dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangannya), kompensasi yang diberikan kepada kepala daerah dan wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD, tambahan penghasilan pegawai, tunjangan profesi guru, tambahan penghasilan guru, jaminan kesehatan, dan jaminan kecelakaan dan kematian;
3. Belanja prioritas kedua adalah belanja wajib pelayanan dasar pada urusan pemerintahan daerah sesuai peraturan perundang-undangan;
4. Penerimaan dari pajak daerah diutamakan untuk belanja program dan kegiatan yang berhubungan langsung dengan peningkatan layanan pajak daerah, belanja yang harus disediakan untuk layanan masyarakat yang terkait dengan perolehan pajak, serta belanja bagi hasil kepada desa minimal sebesar 10% dari total penerimaan pajak daerah. Selanjutnya sisanya dialokasikan untuk mendanai program pembangunan prioritas lainnya;
5. Penerimaan dari retribusi daerah diutamakan untuk belanja program dan kegiatan yang berhubungan langsung dengan pengelolaan obyek retribusi baik fisik maupun non fisik, belanja untuk pengelolaan penerimaan retribusi, serta belanja bagi hasil kepada desa minimal sebesar 10% dari total penerimaan retribusi daerah. Selanjutnya juga dialokasikan untuk mendanai program pembangunan prioritas lainnya;
6. Penerimaan dari pendapatan Badan Layanan Umum Daerah diarahkan untuk pemenuhan belanja Badan Layanan Umum Daerah;
7. Belanja daerah berupa hibah dan bantuan sosial diberikan secara selektif, akuntabel, transparan dan berkeadilan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
8. Belanja Bantuan Keuangan diarahkan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, yaitu ditujukan untuk mendukung pencapaian sasaran daerah yaitu menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkan perekonomian masyarakat desa serta meningkatkan infrastruktur perdesaan dan fasilitas umum;
9. Pemerintah Daerah mengalokasikan 50% dari realisasi penerimaan pajak rokok untuk program Jaminan Kesehatan Nasional bagi warga miskin Penerima Bantuan Iuran (PBI);

10. Belanja yang bersumber dari dana transfer disesuaikan dengan peruntukannya berdasarkan peraturan yang berlaku. Prioritas penggunaan dana transfer adalah sebagai berikut:

- a. Dana Bagi Hasil Pajak; dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan dan kinerja tertentu yang dibagikan kepada daerah penghasil dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah, serta kepada daerah lain non penghasil dalam rangka mengurangi eksternalitas negatif dan/atau meningkatkan pemerataan dalam satu wilayah. penggunaan DBH pajak bersifat *block grant* yang penggunaannya diserahkan daerah sesuai kebutuhan daerah masing-masing.
- b. Dana Alokasi Umum (DAU); untuk mendanai kebutuhan belanja pegawai dan urusan wajib dalam rangka peningkatan pelayanan dasar dan pelayanan umum.
- c. Dana Alokasi Khusus (DAK) disesuaikan dengan kebijakan pemerintah untuk mendanai program, kegiatan, dan/atau kebijakan tertentu dengan tujuan mencapai prioritas nasional, mempercepat pembangunan daerah, mengurangi kesenjangan layanan publik, mendorong pertumbuhan perekonomian daerah, dan/atau mendukung operasional layanan publik.

Pada penyusunan KUA ini tidak memasukkan DAK fisik dan non fisik.

11. Belanja yang bersumber dari dana penyesuaian otonomi khusus disesuaikan peruntukannya sesuai peraturan yang berlaku:

- a. Dana Insentif Daerah (DID); digunakan untuk mendanai kegiatan sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah yang mendukung pencapaian kinerja atas kategori DID sesuai dengan jumlah alokasi yang diterima.
- b. Dana Desa; digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat.

12. Belanja yang bersumber dari BKK DIY untuk Penugasan Keistimewaan digunakan pada Urusan Kelembagaan, Kebudayaan, Tata Ruang dan Pertanahan.

13. Belanja prioritas Daerah meliputi:

- a. Pemenuhan Penerapan Layanan Dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- b. Peningkatan Kualitas SDM (Pendidikan, Kesehatan dan Budaya);

- c. Peningkatan infrastruktur kewilayahan dan pendukung ekonomi kewilayahan dengan peningkatan jalan desa dan saluran irigasi;
 - d. Pengurangan kemiskinan melalui pengurangan beban dan pemberdayaan masyarakat serta meminimalisir wilayah kantong kemiskinan;
 - e. Pengembangan 3 sektor unggulan yaitu sektor pertanian, pariwisata dan industri;
 - f. Peningkatan konsumsi pangan bergizi;
 - g. Penuntasan penanganan sampah dan penegakan hukum;
 - h. Penguatan Program Pemberdayaan Berbasis Masyarakat Padukuhan (PPBMP) untuk penanganan masalah strategis level pedukuhan seperti program pengentasan kemiskinan.
14. Pemenuhan *mandatory spending* pada RKPD dan KUA 2027 sebagai berikut:
- a. Alokasi anggaran pendidikan memenuhi amanat UUD 1945 pasal 31 ayat (4) dan UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 49 ayat (1).
 - b. Alokasi anggaran kesehatan memenuhi amanat UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
 - c. Alokasi anggaran infrastruktur daerah merupakan infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antardaerah. Anggaran ini berada di OPD DPUPKP, Dinas Perhubungan, Diskominfo dan BPKPAD khusus belanja BKK untuk infrastruktur.
 - d. Alokasi Dana Desa (ADD).
15. Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2025 tentang Bantuan Keuangan kepada Kalurahan Program Pemberdayaan Berbasis Masyarakat Padukuhan (PPBMP). Ruang Lingkup dan Prioritas Sasaran Bantuan Keuangan PPBMP adalah bidang yang merupakan kewenangan Kalurahan meliputi: bidang Pendidikan Anak Usia Dini formal dan non formal, bidang Kesehatan, bidang lingkungan hidup. Terdapat 933 pedukuhan di Kabupaten Bantul, masing-masing padukuhan mendapatkan dana PPBMP sebesar Rp40.000.000,-.

Berdasarkan hasil analisis dan perkiraan sumber-sumber pendapatan daerah dan realisasi serta proyeksi pendapatan daerah dalam 5 (lima) tahun terakhir dan Berdasarkan PP Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, struktur belanja daerah diuraikan menjadi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer, Prediksi Belanja tahun 2027 tertuang dalam tabel berikut ini:

Tabel 5.1.

**Realisasi Belanja Tahun 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, Belanja Tahun 2026, dan Prediksi Belanja Tahun 2027
di Kabupaten Bantul sesuai PP No.12 Tahun 2019**

No	Uraian	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Tahun 2025	Tahun 2026	KUA Tahun 2027
	BELANJA							
	Belanja Operasi	1.670.457.246.865,58	1.721.577.286.930,32	1.840.327.289.726,91	1.972.500.878.943,82	1.953.712.205.582,04	1.964.789.992.422,29	1.661.998.452.314,22
	Belanja Pegawai	894.085.181.553,00	853.342.373.348,00	860.578.542.728,00	952.731.205.875,00	1.001.021.783.465,00	1.002.139.576.313,04	810.156.715.607,22
	Belanja Barang dan Jasa	713.169.222.812,58	768.495.409.619,24	858.885.766.998,91	886.056.158.351,82	856.399.680.925,04	869.798.749.699,25	816.175.476.057,00
	Belanja Hibah	60.212.342.500,00	91.629.103.963,08	115.915.380.000,00	128.922.914.717,00	91.182.341.192,00	88.181.866.410,00	30.806.460.650,00
	Belanja Bantuan Sosial	2.990.500.000,00	8.110.400.000,00	4.947.600.000,00	4.790.600.000,00	5.108.400.000,00	4.669.800.000,00	4.859.800.000,00
	Belanja Modal	274.194.646.994,36	221.698.419.757,81	227.673.894.188,81	279.968.387.225,89	195.412.733.322,80	160.425.656.347,60	144.037.279.034,00
	Belanja Modal Tanah	38.174.497.613,00	8.247.988.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000.000,00
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	70.145.840.914,94	70.206.003.149,45	76.046.486.634,86	83.581.489.731,00	60.251.382.383,00	38.052.115.908,00	26.984.952.280,00
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	43.667.937.716,16	37.780.797.101,00	32.716.587.212,88	55.291.616.258,64	13.492.099.185,00	29.352.886.415,60	37.507.556.840,00
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	110.699.132.699,26	98.155.322.270,36	110.642.014.782,07	132.955.617.915,25	111.660.165.894,80	84.233.782.002,00	78.427.769.914,00
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	11.464.691.597,00	7.308.308.697,00	8.268.805.559,00	8.041.511.571,00	9.447.873.360,00	8.786.872.022,00	30.000.000,00
	Belanja Modal Aset Lainnya	42.546.454,00			98.151.750,00	561.212.500,00		87.000.000,00
	Belanja Tidak Terduga	26.690.978.644,00	19.683.697.169,00	1.122.989.975,00	7.518.166.014,00	3.525.110.891,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00
	Belanja Transfer	255.245.395.091,00	309.515.184.340,00	342.301.803.637,00	356.026.220.783,00	348.629.547.270,00	313.341.765.199,00	330.466.674.459,00
	Belanja Bagi Hasil	26.103.398.250,00	26.103.398.250,00	30.677.039.097,00	35.620.232.553,00	40.548.857.469,00	37.271.261.169,00	55.835.530.429,00
	Belanja Bantuan Keuangan	229.141.996.841,00	283.411.786.090,00	311.624.764.540,00	320.405.988.230,00	307.959.329.084,00	276.070.504.030,00	274.631.144.030,00
	Jumlah Belanja	2.226.588.267.594,94	2.272.474.588.197,13	2.411.425.977.527,72	2.616.013.652.966,71	2.501.279.597.065,84	2.443.557.413.968,89	2.141.502.405.807,22

Sumber : BPKPAD, tahun 2026

5.2. Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer, dan Belanja Tidak Terduga

Sesuai PP Nomor 12 Tahun 2019, dalam pengelolaan anggaran belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, dan kegiatan terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer. Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Prediksi Belanja operasi Tahun 2027 meliputi Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah, dan Bantuan Sosial sebesar Rp1.661.998.452.314,22. Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dan/atau dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa meliputi Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan. Adapun rincian belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer dengan rincian sebagai berikut:

- a. Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada kepala daerah/wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja pegawai direncanakan untuk kebutuhan gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada PNS yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk *accres* sebesar 2,5%; tambahan penghasilan PNS sesuai dengan peraturan Bupati; iuran asuransi kesehatan; uang representasi dan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD serta gaji dan tunjangan Bupati dan Wakil Bupati serta penghasilan dan penerimaan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebesar Rp810.156.715.607,22
- b. Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD, sebesar Rp 816.175.476.057,00
- c. Belanja hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang/jasa kepada Pemerintah Pusat, pemerintah daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.

Pemerintah daerah mengalokasikan belanja hibah dalam KUA Tahun Anggaran 2027 pada SKPD terkait dan diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek berkenaan dan hal ini sudah disesuaikan dengan peraturan perundangan yang berlaku, sebesar Rp30.806.460.650,00

- d. Belanja Bantuan Sosial digunakan untuk mengalokasikan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah daerah mengalokasikan belanja bantuan sosial dalam KUA Tahun Anggaran 2027 pada SKPD terkait dan diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek berkenaan, sebesar Rp4.859.800.000,00
- e. Belanja modal direncanakan untuk mengalokasikan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya, sebesar Rp144.037.279.034,00
- f. Belanja tidak terduga dianggarkan untuk belanja yang sifatnya darurat seperti adanya bencana alam dan bencana sosial, sebesar Rp5.000.000.000,00
- g. Belanja bagi hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa yang digunakan untuk mengalokasikan bagi hasil pendapatan kepada pemerintah desa atau pemerintah lainnya, sebesar Rp55.835.530.429,00
- h. Belanja bantuan keuangan digunakan untuk mengalokasikan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus kepada desa untuk pemerataan kemampuan keuangan, sebesar Rp274.631.144.030,00

Pagu indikatif setiap program pembangunan dihitung berdasarkan capaian indikator program pembangunan, dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menentukan rencana penggunaan kapasitas riil anggaran yaitu alokasi belanja;
2. Menentukan keluaran/ *output* setiap kegiatan;
3. Menghitung alokasi pagu dari setiap *output* kegiatan untuk setiap program;
4. Menghitung alokasi pagu setiap program setelah *output* kegiatan pada setiap program diverifikasi kebenarannya;
5. Menghitung alokasi pagu PD berdasarkan program yang menjadi tanggungjawab PD.

Rekapitulasi belanja menurut perangkat daerah disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 5.2
Rekapitulasi Belanja Menurut Perangkat Daerah Kabupaten Bantul
Tahun Anggaran 2027

NO	PERANGKAT DAERAH	KUA 2027
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	461,433,440,265.79
2	Unsur Kesehatan:	538,697,062,598.28
	Dinas Kesehatan	312,038,830,642.28
	RSUD Panembahan Senopati	207,568,576,021.00
	RSUD Saras Adyatma	19,089,655,935.00
3	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	151,962,180,495.00
4	Satuan Polisi Pamong Praja	16,431,125,526.00
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	13,126,692,974.50
6	Dinas Sosial	22,236,376,768.05
7	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	13,834,588,732.70
8	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	8,139,527,642.76
9	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	32,817,977,946.37
10	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	15,663,449,937.07
11	Dinas Lingkungan Hidup	52,225,944,258.00
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	11,210,467,826.66
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan	10,527,908,192.00
14	Dinas Perhubungan	31,866,164,746.35
15	Dinas Komunikasi dan Informatika	22,121,915,809.00
16	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	27,710,887,316.90
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	7,450,989,916.39
18	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	14,933,557,270.81
19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	7,715,504,686.00
20	Dinas Kelautan dan Perikanan	8,519,289,814.49
21	Dinas Pariwisata	14,764,251,674.00
22	SEKRETARIAT DAERAH:	44,834,850,094.66
	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN	460,016,350.00
	BAGIAN HUKUM	566,846,600.00
	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	7,507,984,594.00
	BAGIAN PEREKONOMIAN PEMBANGUNAN DAN SDA	341,975,480.00
	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	757,661,800.00
	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL	9,628,664,930.00

NO	PERANGKAT DAERAH	KUA 2027
	BAGIAN ORGANISASI	394,023,200.00
	BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN	25,177,677,140.66
23	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	63,397,124,983.93
24	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	12,248,395,012.88
25	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	444,767,455,199.00
26	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	12,795,007,379.97
27	Inspektorat Daerah	13,972,376,782.12
28	Kapanewon Piyungan	3,235,501,249.36
29	Kapanewon Dlingo	3,451,375,222.11
30	Kapanewon Imogiri	3,643,731,362.02
31	Kapanewon Pandak	3,460,006,440.00
32	Kapanewon Bantul	3,014,227,043.81
33	Kapanewon Kretek	3,252,598,675.44
34	Kapanewon Bambanglipuro	2,955,712,680.63
35	Kapanewon Jetis	3,362,770,297.50
36	Kapanewon Kasihan	3,630,618,144.96
37	Kapanewon Pleret	3,176,563,277.32
38	Kapanewon Pajangan	3,096,747,900.72
39	Kapanewon Sanden	2,948,348,184.18
40	Kapanewon Sedayu	3,421,858,069.27
41	Kapanewon Sewon	3,785,155,395.42
42	Kapanewon Srandakan	3,368,905,783.69
43	Kapanewon Banguntapan	3,485,138,592.43
44	Kapanewon Pundong	3,562,249,895.17
45	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	9,246,383,743.51
JUMLAH TOTAL		2.141.502.405.807,22

Sumber : BPKPAD, 2026

5.3. Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan jenis dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Sesuai ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, SPM merupakan sebagian substansi pelayanan dasar pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, yang terdiri dari:

1. SPM Bidang Pendidikan;
2. SPM Bidang Kesehatan;
3. SPM Bidang Pekerjaan Umum;
4. SPM Bidang Perumahan Rakyat;

5. SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat; dan
6. SPM Bidang Sosial.

Ketentuan penerapan SPM di lingkungan pemerintah daerah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dengan jenis dan indikator pelayanan dasar yang harus dipenuhi dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 5.3 Jenis dan Indikator Pelayanan SPM yang Harus Dipenuhi

Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target	Batas Waktu Pencapaian
I. SPM PENDIDIKAN			
1. Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100%	Setiap tahun
2. Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	100%	Setiap tahun
3. Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara usia 7- 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100%	Setiap tahun
II. SPM KESEHATAN			
1. Pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun
2. Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun
3. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun
4. Pelayanan kesehatan balita	Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun
5. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun
6. Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun
7. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Jumlah Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun
8. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Jumlah Warga Negara penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun
9. Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	Jumlah Warga Negara penderita diabetes melitus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun
10. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun
11. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Jumlah Warga Negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun
12. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan pelayanan kesehtan	100%	Setiap tahun

Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target	Batas Waktu Pencapaian
III. SPM PEKERJAAN UMUM			
1. Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari- hari	100%	Setiap tahun
2. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100%	Setiap tahun
IV. SPM PERUMAHAN RAKYAT			
1. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/ kota	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100%	Setiap tahun
2. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100%	Setiap tahun
V. SPM KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT			
1. Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkara Kabupaten/Kota	100%	Setiap tahun
2. Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	Setiap tahun
3. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan Pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	Setiap tahun
4. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	Setiap tahun
5. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%	Setiap tahun
VI. SPM SOSIAL			
1. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	Setiap tahun
2. Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	Setiap tahun
3. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	Setiap tahun
4. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah Warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	100%	Setiap tahun
5. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	Jumlah Warga Negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	100%	Setiap tahun

Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021

Dalam rangka mendukung penerapan SPM tersebut, Kabupaten Bantul telah menyusun Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2025-2029 dengan ditetapkan melalui Peraturan Bupati Bantul Nomor 10 Tahun 2025 tentang Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2025-2029. Selain itu, dalam rangka mendukung penerapan SPM Tahun 2027, ditetapkan target penerima layanan SPM yang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.4 Target Penerima Layanan SPM Tahun 2027

Jenis Layanan SPM	Satuan	Target 2027
I. SPM PENDIDIKAN		
1) Pendidikan Anak Usia Dini	orang	21.696
2) Pendidikan Dasar	orang	105.769
3) Pendidikan Kesetaraan	orang	3.975
II. SPM KESEHATAN		
1) Pelayanan kesehatan ibu hamil	orang	7.500
2) Pelayanan kesehatan ibu bersalin	orang	7.500
3) Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	orang	6.500
4) Pelayanan kesehatan balita	orang	38.499
5) Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	orang	120.313
6) Pelayanan kesehatan pada usia produktif	orang	11.775
7) Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	orang	4.000
8) Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	orang	12.370
9) Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	orang	4.225
10) Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	orang	2.639
11) Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	orang	8.560
12) Pelayanan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	orang	8.489
III. SPM PEKERJAAN UMUM		
1) Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	orang	4.728
2) Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	orang	2.032
1) Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/ kota	orang	28
2) Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota	orang	
IV. SPM KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT		
1) Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum	orang	1.485
2) Pelayanan informasi rawan bencana	orang	15.482
3) Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	orang	985.142
4) Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	orang	965
5) Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	orang	155
V. SPM SOSIAL		

Jenis Layanan SPM	Satuan	Target 2027
1) Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	orang	266
2) Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	orang	21
3) Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	orang	848
4) Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	orang	5
5) Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	orang	25

Sumber: RKPD, 2026

5.4 Dana Keistimewaan

5.4.1 Urusan Kelembagaan

Rekomendasi Penguatan Dampak Dana Keitimewaan (Danais) Urusan Kelembagaan di Kabupaten Bantul

- 1) Penguatan Kapasitas Kelembagaan Kalurahan Berbasis Keistimewaan
- Mendorong pelatihan terpadu dan pendampingan teknis bagi lembaga-lembaga lokal (Lurah, Carik, Ulu-ulu, Jagabaya, dan lain-lain) untuk memahami substansi keistimewaan, tugas kelembagaan, serta pengelolaan Danais secara akuntabel. Pelatihan sebaiknya mencakup penguatan administrasi, pengelolaan keuangan, sistem informasi kelembagaan, dan pengembangan program berbasis keistimewaan.
- 2) Standardisasi Struktur dan Fungsi Kelembagaan Lokal
- Menyusun pedoman operasional yang seragam bagi kalurahan dalam mengelola urusan keistimewaan, termasuk format struktur organisasi pelaksana urusan keistimewaan, sistem pelaporan, serta indikator capaian kelembagaan. Hal ini bertujuan agar pelaksanaan Danais lebih terarah dan terukur secara kelembagaan.
- 3) Digitalisasi Tata Kelola Kelembagaan
- Mendorong penggunaan sistem informasi kelembagaan berbasis digital untuk pengelolaan arsip, pelaporan kegiatan, serta dokumentasi program Danais. Ini akan meningkatkan efisiensi, transparansi, dan memudahkan proses monitoring dan evaluasi.
- 4) Fasilitasi Pembentukan dan Penguatan Forum Kelembagaan Adat dan Budaya
- Danais perlu mendorong pembentukan atau revitalisasi lembaga adat dan budaya di kalurahan, seperti Dewan Adat, Forum Budaya, atau Lembaga Pengembangan Kearifan Lokal, sebagai mitra pemerintah

kalurahan dalam mengelola aspek keistimewaan secara partisipatif dan berbasis masyarakat.

5) Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Danais dengan RPJM Kalurahan

Mengintegrasikan kegiatan Danais kelembagaan dalam dokumen perencanaan kalurahan (RPJMKal dan RKP Kal) agar pelaksanaannya tidak bersifat “tambahan”, melainkan melekat pada sistem perencanaan pembangunan lokal yang berkelanjutan.

6) Peningkatan Literasi Keistimewaan bagi Aparatur dan Masyarakat

Melalui forum warga, diskusi publik, atau media komunitas, literasi mengenai nilai-nilai keistimewaan dan tujuan kelembagaan keistimewaan perlu terus ditingkatkan agar tercipta kesadaran kolektif, sense of belonging, serta kontrol sosial terhadap pelaksanaan Danais di kalurahan.

7) Penyusunan Indikator Kinerja Dampak Kelembagaan

Penguatan pengukuran keberhasilan kelembagaan tidak hanya berbasis output administratif, tetapi juga dampak sosial seperti meningkatnya efektivitas pelayanan, penguatan nilai budaya, partisipasi warga dalam musyawarah, dan kualitas tata kelola kalurahan.

8) Evaluasi Berkala dan Replikasi Praktik Baik

Melakukan evaluasi tahunan secara partisipatif terhadap pelaksanaan Danais urusan kelembagaan di setiap kalurahan, dan mendokumentasikan praktik baik (best practices) yang dapat direplikasi ke kalurahan lain di wilayah Bantul.

Rencana usulan program, kegiatan, subkegiatan Dana Keistimewaan Urusan Kelembagaan di Kabupaten Bantul Tahun 2027 selaras dengan program kegiatan Dana Keistimewaan DIY, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 5.5
Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Tahun 2027

No.	Program	Kegiatan	Subkegiatan
	URUSAN KELEMBAGAAN		
1	Bagian Organisasi		
	Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Kabupaten/Kota
	Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Peningkatan Budaya Pemerintahan	Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota

No.	Program	Kegiatan	Subkegiatan
2	Bagian Hukum		
	Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	Penyusunan Rancangan Produk Hukum Kabupaten/Kota Tindak Lanjut Pelaksanaan Kewenangan Keistimewaan
	Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	Pengawasan Produk Hukum Kalurahan Tindak Lanjut Kewenangan Keistimewaan
3	Bagian Tata Pemerintahan		
	Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Urusan Keistimewaan	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/ Kemantren dan Kalurahan / Kelurahan
4	Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah		
	Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan
	Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan
	Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Tata Ruang
5	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		
	Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Peningkatan Budaya Pemerintahan	Penyelenggaraan Diklat Keistimewaan Kabupaten/Kota
6	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, Dan Aset Daerah		
	Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan se-DIY
7	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Kalurahan		
	Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Urusan Keistimewaan	Penerapan dan pendampingan keistimewaan di Kapanewon/ Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan
8	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		
	Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta	Peningkatan Budaya Pemerintahan	Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota

No.	Program	Kegiatan	Subkegiatan
	Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan		
9	Dinas Kesehatan		
	Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Peningkatan Budaya Pemerintahan	Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota
10	Kapanewon di Kabupaten Bantul (17 Kapanewon)		
	Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan

Aktivitas pada Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan diantaranya untuk:

- Penataan Kelembagaan dan Implementasi Budaya Satriya di Bagian Organisasi SETDA
- Fasilitasi dan Pendampingan Penyusunan Produk Hukum Kalurahan di Bagian Hukum SETDA
- Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan di Bappeda, BPKPAD, dan 17 kapanewon
- Diklat Internalisasi Keistimewaan di BKPSDM
- Pendampingan Reformasi Kalurahan di Bagian Tata Pemerintahan SETDA, DPMK dan 17 kapanewon.

5.3.2 Urusan Kebudayaan

Rekomendasi Penguatan Dampak Danais Urusan Kebudayaan di Kabupaten Bantul

- 1) Mendorong Pelestarian Budaya Berbasis Komunitas dan Kearifan Lokal
Danais perlu difokuskan pada pelestarian budaya yang digerakkan langsung oleh komunitas seni, kelompok adat, dan pelaku budaya lokal. Dukungan dapat berupa hibah kesenian, fasilitasi kegiatan budaya tahunan, serta penyediaan sarana produksi dan ruang ekspresi yang mudah diakses.
- 2) Digitalisasi dan Dokumentasi Budaya Takbenda Secara Sistematis
Perlu adanya program strategis untuk mendokumentasikan budaya lokal seperti tradisi lisan, upacara adat, permainan rakyat, dan seni pertunjukan tradisional secara digital (video, teks, dan audio). Ini penting sebagai arsip budaya dan bahan edukasi lintas generasi.
- 3) Integrasi Nilai Budaya dalam Pendidikan Formal dan NonFormal

- Menyusun modul muatan lokal yang berbasis budaya Bantul dan mengintegrasikannya ke sekolah dasar dan menengah, atau melalui kegiatan sanggar anak, karang taruna, dan pramuka. Hal ini akan memperkuat regenerasi dan penanaman nilai-nilai budaya sejak dini.
- 4) **Penguatan Kapasitas Manajemen Pelaku dan Komunitas Budaya**
Pelatihan manajemen organisasi seni, pengelolaan event budaya, publikasi digital, hingga penguatan branding budaya lokal penting untuk meningkatkan kemandirian komunitas budaya dan memperluas jangkauan audiens.
 - 5) **Revitalisasi Infrastruktur Budaya yang Inklusif dan Fungsional**
Danais dapat diarahkan untuk memperbaiki atau membangun rumah budaya, panggung rakyat, dan galeri desa dengan memperhatikan aspek keterlibatan warga, aksesibilitas, dan fleksibilitas fungsi untuk mendukung kegiatan seni, diskusi budaya, hingga pameran karya lokal.
 - 6) **Pengembangan Kalurahan sebagai Sentra Budaya**
Setiap kalurahan yang memiliki potensi budaya kuat dapat difasilitasi menjadi “Kalurahan Budaya” dengan dukungan program strategis jangka menengah. Termasuk di dalamnya pemetaan potensi budaya, penguatan kelembagaan budaya, dan program unggulan yang mengakar.
 - 7) **Sinergi Antar-Urusan dan Lintas Sektor**
Urusan kebudayaan perlu disinergikan dengan urusan tata ruang (zona budaya), pariwisata (wisata budaya), pendidikan (muatan lokal), dan kelembagaan (forum budaya). Ini akan memperluas dampak Danais dan menghindari pendekatan sektoral yang terpisah-pisah.
 - 8) **Pemanfaatan Teknologi dan Media Sosial untuk Promosi Budaya Lokal**
Pelaku budaya perlu difasilitasi dalam hal pembuatan konten digital, pengelolaan akun media sosial, dan strategi pemasaran online agar karya budaya lokal dikenal luas dan mendapat apresiasi, terutama dari generasi muda.
 - 9) **Pengembangan Indikator Kinerja Berbasis Dampak Sosial dan Budaya**
Perlu dikembangkan indikator capaian Danais kebudayaan yang tidak hanya berbasis output (jumlah kegiatan), tetapi juga berbasis outcome seperti peningkatan partisipasi warga, keberlanjutan komunitas budaya, dan penguatan identitas lokal.
 - 10) **Mekanisme Penilaian dan Replikasi Praktik Baik Budaya**
Mengadakan evaluasi tahunan berbasis partisipasi komunitas dan membuka ruang penghargaan atau insentif untuk kalurahan,

komunitas, atau tokoh budaya yang berhasil menjaga dan mengembangkan budaya lokal secara konsisten.

Rencana usulan program, kegiatan, subkegiatan Dana Keistimewaan Urusan Kebudayaan di Kabupaten Bantul Tahun 2027 selaras dengan program kegiatan Dana Keistimewaan DIY, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 5.6
Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan Tahun 2027

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
	URUSAN KEBUDAYAAN		
1	Dinas Kebudayaan		
	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseuman	Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan
	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseuman	Pembinaan, Pengembangan Bahasa dan Sastra
	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseuman	Pembinaan dan Pengelolaan Permuseuman
	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya	Tata Kelola Cagar Budaya dan Warisan Budaya
	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya	Pengembangan Cagar Budaya dan Warisan Budaya
	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Lembaga Budaya
	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Pembinaan dan Pengembangan Rintisan Desa dan Kantong Budaya
	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Pembinaan Lembaga Penggiat Seni
	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Penghargaan Seniman dan Budayawan
	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Misi Kebudayaan ke Dalam dan Luar Negeri dalam rangka Diplomasi Budaya
	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Festival Kebudayaan Yogyakarta
	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Gelar Budaya Jogja
	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Publikasi Seni dan Budaya Daerah
	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Pembinaan Penghayat Kepercayaan, Adat dan Tradisi
	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur dalam Masyarakat
	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Penyelenggaraan Event Penggiat Seni
	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
2	Dinas Pariwisata		
	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	Pengembangan Atraksi Wisata Budaya
3	Dinas Komunikasi dan Informatika		
	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	Pembangunan Ekosistem Kultural DIY Berbasis Digital
4	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman		
	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Pengelolaan Taman Budaya	Pengelolaan dan Pengembangan Taman Budaya Kabupaten/Kota
5	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan		
	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	Pengembangan Industri Kreatif
6	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi		
	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya

Aktivitas pada Urusan Kebudayaan adalah:

- Fasilitasi Pelestarian Adat, Seni, Tradisi dan Budaya di Bagian Dinas Kebudayaan,
- Pengembangan Atraksi Wisata Budaya di Dinas Pariwisata,
- Pembangunan Ekosistem Kultural Berbasis Digital di Diskominfo,
- Pembangunan Taman Budaya di DPUPKP
- Pengembangan Industri Kreatif di DKUKMP
- Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya di Disnakertrans.

5.3.3 Urusan Pertanahan

Rekomendasi Penguatan Dampak Danais Urusan Pertanahan di Kabupaten Bantul

- 1) Perluasan Implementasi Program Tertib Administrasi Pertanahan Kalurahan

Mendorong seluruh kalurahan di Bantul untuk melaksanakan Tertib Administrasi Pertanahan Kalurahan secara menyeluruh, termasuk perlengkapan dokumen pertanahan, pemetaan partisipatif, dan pengarsipan dokumen secara rapi dan digital. Tertib Administrasi Pertanahan Kalurahan perlu dijadikan standar minimum dalam pengelolaan pertanahan tingkat kalurahan.

- 2) **Penguatan Kapasitas SDM Kalurahan dalam Pengelolaan Pertanahan**
Memberikan pelatihan teknis dan asistensi lapangan bagi perangkat kalurahan agar mampu memahami prinsip legalitas pertanahan, sistem pemetaan, serta pengarsipan dokumen tanah. Pelatihan dapat difokuskan pada Carik, Jagabaya, dan Dukuh yang langsung bersentuhan dengan data pertanahan.
- 3) **Digitalisasi Sistem Administrasi Pertanahan Kalurahan**
Mengembangkan aplikasi atau sistem sederhana berbasis lokal untuk pencatatan, pelacakan, dan penyimpanan dokumen pertanahan. Ini akan memudahkan layanan kepada masyarakat, meningkatkan transparansi, dan menjadi dasar integrasi dengan sistem pertanahan kabupaten/provinsi.
- 4) **Pendampingan Pemetaan Partisipatif yang Inklusif dan Akurat**
Meningkatkan kualitas pemetaan bidang tanah dengan melibatkan masyarakat dan kelompok rentan (perempuan, lansia, petani penggarap) agar proses validasi data lebih akurat dan mencegah konflik pertanahan ke depan.
- 5) **Pengamanan dan Penataan Aset Tanah Kalurahan (TKD dan Tanah Adat)**
Danais perlu diarahkan untuk membantu proses identifikasi, penetapan batas, dan dokumentasi aset-aset strategis milik kalurahan agar tidak terjadi penguasaan ilegal atau pemanfaatan tanpa izin. Termasuk penyusunan peta aset dan laporan kondisi aktual.
- 6) **Sinergi Urusan Pertanahan dengan Tata Ruang dan Kebudayaan**
Pengelolaan pertanahan harus terintegrasi dengan dokumen tata ruang (zonasi) dan pelestarian kawasan budaya agar tidak terjadi konflik fungsi lahan. Contohnya: perlindungan tanah kas desa yang berada di zona pertanian atau kawasan cagar budaya.
- 7) **Sosialisasi dan Edukasi Publik tentang Pentingnya Tertib Pertanahan**
Meningkatkan literasi masyarakat melalui forum warga, media sosial desa, dan baliho edukatif mengenai manfaat dokumen pertanahan yang sah, bahaya jual beli ilegal, dan pentingnya partisipasi dalam program Tertib Administrasi Pertanahan Kalurahan.
- 8) **Pengawasan terhadap pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kas Desa**
Kegiatan Pengawasan Tanah Kasultanan dan Tanah Kalurahan sudah dilaksanakan oleh Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul sejak tahun 2023 menggunakan anggaran Dana Keistimewaan dan

sudah dilaksanakan di seluruh kalurahan di Kabupaten Bantul (75 kalurahan). Rekomendasi untuk tindak lanjut kegiatan ini dikeluarkan oleh DPTR Kabupaten Bantul kepada pemerintah kalurahan terkait penyelesaian permasalahan pemanfaatan tanah kasultanan dan tanah kalurahan dalam upaya meningkatkan tertib administrasi pertanahan.

- 9) Monitoring dan Evaluasi Berbasis Capaian Dampak
- Evaluasi Danais pertanahan tidak hanya berfokus pada output (jumlah bidang terpetakan atau jumlah pelatihan), tetapi juga outcome seperti berkurangnya sengketa, meningkatnya pelayanan pertanahan di kalurahan, dan meningkatnya kepercayaan warga terhadap pengelolaan tanah.
- 10) Replikasi Praktik Baik antar-Kalurahan
- Mendokumentasikan dan menyebarluaskan praktik baik pengelolaan pertanahan dari kalurahan yang berhasil (misalnya dalam menyusun Peta Pertanahan atau Digitalisasi Arsip), agar dapat menjadi model atau acuan bagi kalurahan lain di Bantul.

Rencana usulan program, kegiatan, subkegiatan Dana Keistimewaan urusan Pertanahan di Kabupaten Bantul Tahun 2027 selaras dengan program kegiatan Dana Keistimewaan DIY, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 5.7
Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Pertanahan Tahun 2027

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN
	URUSAN PERTANAHAN		
1	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG KAB. BANTUL		
	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Pertanahan	Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten
	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Pertanahan	Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	Pengawasan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa
	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Pertanahan	Pemanfaatan tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	Penyiapan Bahan Pertimbangan Teknis Izin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten
	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Pertanahan	Pemanfaatan tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa
2	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN KAB. BANTUL		
	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Pertanahan	Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten

Aktivitas pada Urusan Pertanahan adalah:

- Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten.
- Pengawasan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Kas Desa,
- Penyiapan Bahan Pertimbangan Teknis Izin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten
- Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa.

5.3.4 Urusan Tata Ruang

Rekomendasi Penguatan Dampak Danais Urusan Tata Ruang di Kabupaten Bantul

- 1) Percepatan Penyusunan dan Revisi Dokumen Tata Ruang di Tingkat Kalurahan dan Kabupaten

Mendorong penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kalurahan (RTRWKal) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di wilayah yang belum memiliki atau belum memperbarui dokumen tata ruang sesuai dinamika sosial-ekonomi dan lingkungan. Danais dapat digunakan untuk pendampingan teknis, pengumpulan data spasial, serta penyusunan peraturan kalurahan tentang penataan ruang.

- 2) Penguatan Kapasitas Aparatur dalam Perencanaan dan Pengendalian Tata Ruang

Menyelenggarakan pelatihan dan sertifikasi teknis bagi perangkat daerah dan kalurahan terkait GIS (Geographic Information System), pemetaan partisipatif, penataan kawasan berbasis nilai lokal, serta pengawasan pemanfaatan ruang agar pemahaman teknis dan legal meningkat.

- 3) Integrasi Tata Ruang dengan Urusan Lainnya (Kebudayaan, Pertanahan, dan Lingkungan)

Tata ruang perlu difungsikan sebagai kerangka dasar pembangunan, sehingga Danais untuk kebudayaan dan pertanahan diarahkan berdasarkan zonasi yang telah ditetapkan. Misalnya, pelestarian kawasan cagar budaya, perlindungan sawah lestari, dan pengendalian permukiman di zona rawan bencana.

- 4) Pemanfaatan Danais untuk Peningkatan Akses Informasi Tata Ruang bagi Masyarakat

Danais dapat digunakan untuk menyediakan papan informasi tata ruang di ruang publik (zona budaya, zona hijau, zona pertanian), pengembangan sistem informasi geospasial yang dapat diakses

masyarakat, dan media edukasi visual yang menjelaskan batas serta fungsi ruang.

5) Penerapan Penataan Ruang Berbasis Partisipasi Masyarakat dan Kearifan Lokal

Mendorong keterlibatan warga dalam musyawarah tata ruang, penyusunan peta partisipatif, serta integrasi nilai lokal (misalnya konsep hamemayu hayuning bawana) dalam desain ruang. Hal ini akan memperkuat legitimasi sosial dari dokumen dan implementasi tata ruang.

6) Penguatan Sistem Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Ruang

Danais juga dapat digunakan untuk membentuk Tim Pengendali Pemanfaatan Ruang di tingkat kalurahan/kapanewon, melibatkan tokoh masyarakat dan perangkat, guna mengawasi kesesuaian pembangunan dengan rencana tata ruang dan mencegah alih fungsi lahan yang tidak sesuai.

7) Digitalisasi dan Integrasi Data Spasial Tingkat Kalurahan dengan Sistem Kabupaten

Mendukung pengumpulan dan digitalisasi data spasial berbasis kelurahan (peta lahan, pemanfaatan ruang, batas wilayah, zona risiko) agar terintegrasi dengan sistem GIS kabupaten dan provinsi. Hal ini mempermudah perencanaan lintas sektor dan pengambilan kebijakan berbasis data.

8) Evaluasi dan Pengukuran Dampak Tata Ruang Berbasis Lingkungan dan Sosial

Dampak penataan ruang sebaiknya diukur tidak hanya melalui dokumen atau output fisik, tapi juga melalui indikator lingkungan (misalnya tutupan hijau, daya dukung), sosial (kenyamanan, akses warga), dan budaya (terjaganya kawasan adat/cagar budaya).

9) Replikasi Inisiatif Tata Ruang Inovatif di Kalurahan Lain

Praktik-praktik baik seperti peta partisipatif warga, penggunaan QR Code pada papan zonasi, atau tata ruang berbasis nilai filosofis lokal perlu dihimpun dan didiseminasikan sebagai referensi bagi kalurahan lain.

Rencana usulan program, kegiatan, subkegiatan Dana Keistimewaan urusan Tata Ruang di Kabupaten Bantul Tahun 2027 selaras dengan program kegiatan Dana Keistimewaan DIY, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 5.8
Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang Tahun 2027

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN
	URUSAN TATARUANG		
1	DINAS PERHUBUNGAN		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Samas-Parangtritis
2	SATPOL PP		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Samas-Parangtritis
3	DPTR		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	Perencanaan Lata Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Satuan Ruang Strategis Kasultanan Dan Kadipaten
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	Pengendalian Pemanfaatan Penataan Ruang Satuan Ruang Strategis	Pengawasan Penyelenggaraan Penataan Ruang
4	DKPP		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Samas-Parangtritis

Aktivitas pada urusan Tata Ruang adalah:

- Pemanfataan Ruang Satuan Ruang Strategis di SRS Samas Parangtritis
Terkait Pemasangan Alat Penerangan Jalan oleh Dinas Perhubungan
- Restorasi Gumuk Pasir (Penataan Kawasan Pantai Selatan) pada Satpol PP
- Aktivitas Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten Serta Pengawasan Penyelenggaraan Penataan ruang pada DPTR
- Pembibitan Bawang Merah pada DKPP.

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

6.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Pembiayaan daerah merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah dimaksudkan untuk menutupi defisit anggaran akibat lebih besarnya alokasi belanja daerah dibandingkan dengan pendapatan daerah. Penerimaan Pembiayaan dapat bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya, Pencairan Dana Cadangan, Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Penerimaan Pinjaman Daerah, Penerimaan Kembali Pinjaman dan Penerimaan Piutang Daerah. Disisi lain apabila terdapat surplus maka pembiayaan daerah dapat dialokasikan untuk penyertaan modal kepada BUMD yang dapat memberikan nilai tambah ekonomis bagi pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. Kebijakan pembiayaan daerah dibagi atas dua bagian yaitu kebijakan penerimaan pembiayaan dan kebijakan pengeluaran pembiayaan.

BUMD Bantul terdiri dari 3 Perusahaan yaitu: PT BPR Bank Bantul, Perumdam Tirta Projotamansari dan Perumda Aneka Dharma.

1. PT. BPR Bank Bantul

Perusahaan ini bergerak di bidang aktivitas keuangan yang mencakup aktivitas jasa keuangan, bukan asuransi dan dana pensiun serta mendorong pertumbuhan perekonomian daerah.

2. Perumda Tirta Projotamansari

Perusahaan ini bergerak dalam penyelenggaraan penyediaan air minum dan air bersih bagi masyarakat. Perumda Air Minum Tirta Prajatamansari membentuk 3 (tiga) unit wilayah yang membawahi 15 (lima belas) Sub Unit PDAM yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Bantul.

3. Perumda Aneka Dharma bergerak di bidang usaha sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2019 adalah: Perdagangan Umum; Pelayanan Jasa; Pertanian; Perindustrian; Pertambangan; Peternakan; dan Pariwisata.

Kebijakan penerimaan pembiayaan yang akan dilakukan terkait dengan kebijakan pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, maupun penerimaan piutang daerah. Dalam hal ada kecenderungan terjadinya defisit anggaran, harus diantisipasi kebijakan-kebijakan yang akan berdampak pada pos penerimaan pembiayaan daerah.

6.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah mencakup, penyertaan modal (investasi) daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, serta pemberian dana bergulir. Jika ada kecenderungan akan terjadinya surplus anggaran, harus diantisipasi kebijakan-kebijakan yang akan berdampak pada pos pengeluaran pembiayaan daerah, seperti penyelesaian pembayaran pokok utang dan penyertaan modal.

Kebijakan pembiayaan daerah di Kabupaten Bantul Tahun 2027 diarahkan sebagai berikut:

- 1) Proyeksi alokasi untuk Penyertaan Modal Daerah sebesar Rp25.000.000.000,00. Proyeksi tersebut disesuaikan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang penyertaan modal dengan mempertimbangkan keuangan daerah, adapun rincian penyertaan modal sebagai berikut:
- a) Bank BPD DIY

Rp17.000.000.000,00.
- b) PT. BPR Bank Bantul

Rp2.000.000.000,00.
- c) Perumdam Tirto Projotamansari

Rp6.000.000.000,00.
- d) Perumda Aneka Dharma

Rp0,00.
- 2) Kebijakan pengeluaran pembiayaan penyertaan modal daerah yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah;
- 3) Penguatan pengelolaan dana bergulir; dan
- 4) Menjaga agar keuangan daerah dan apabila terdapat defisit anggaran sedapat mungkin ditutup dengan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun lalu.

Usaha peningkatan pendapatan daerah melalui BUMD di Kabupaten Bantul antara lain penugasan kepada Perusahaan Umum Daerah Aneka Dharma Kabupaten Bantul untuk melaksanakan pengelolaan sampah serta dalam rangka mendukung Program Pemerintah Kabupaten Bantul dalam mengurangi timbunan sampah di Kabupaten Bantul dan sekitarnya. sesuai Surat Keputusan Bupati Bantul No. 260 Tahun 2023 sebagaimana telah dirubah dengan Surat Keputusan Bupati Bantul No. 75 Tahun 2024.

Berdasarkan PP Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, struktur pembiayaan daerah diuraikan menjadi Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Prediksi Pembiayaan tahun 2027 tertuang dalam tabel berikut ini:

Tabel 6.1.

**Realisasi Pembiayaan Tahun 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, Pembiayaan Tahun 2026, dan Prediksi Pembiayaan Tahun 2027
di Kabupaten Bantul sesuai PP No.12 Tahun 2019**

No	Uraian	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Tahun 2025	Tahun 2026	KUA Tahun 2027
	PEMBIAYAAN							
	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	244.577.427.898,17	259.029.014.734,33	215.631.865.732,74	197.220.549.259,59	175.061.744.482,45	132.337.458.638,89	153.109.667.559,22
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	238.201.393.766,17	240.503.861.658,33	215.631.865.732,74	196.239.211.759,59	173.920.250.697,45	132.337.458.638,89	153.109.667.559,22
	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.746.925.000,00	18.362.654.076,00		981.337.500,00	1.141.493.785,00		
	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	2.629.109.132,00	162.499.000,00					0,00
	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	13.141.000.000,00	31.500.000.000,00	24.051.093.800,00	16.700.000.000,00	25.375.550.000,00	0,00	25.000.000.000,00
	Penyertaan Modal Daerah	12.341.000.000,00	31.500.000.000,00	24.051.093.800,00	16.700.000.000,00	25.375.550.000,00	0,00	25.000.000.000,00
	Pemberian Pinjaman Daerah	800.000.000,00	0,00					0,00
	Pengeluaran Investasi Non Permanen Lainnya	0,00						
	Pembiayaan Netto	231.436.427.898,17	227.529.014.734,33	191.580.771.932,74	180.520.549.259,59	149.686.194.482,45	132.337.458.638,89	128.109.667.559,22
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	240.503.861.658,33	215.631.865.732,74	196.239.211.759,59	173.920.250.697,45	161.043.440.879,50	0,00	0,00

Sumber : BPKPAD, tahun 2026

Rincian pendapatan, belanja, dan pembiayaan tahun anggaran 2027 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 6.2.
Rincian Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan
Tahun Anggaran 2027

KODE	URAIAN	KUA TA 2027
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	795.135.000.000,00
4.1.01	Pajak Daerah	425.766.818.711,00
4.1.02	Retribusi Daerah	271.408.332.282,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	20.199.694.868,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	77.760.154.139,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.218.257.738.248,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.059.901.476.362,00
4.2.01.05	Dana Desa	102.690.399.000,00
4.2.01.06	Insentif Fiskal	0,00
4.2.01.07	Dana Bagi Hasil (DBH)	16.878.002.362,00
4.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	940.333.075.000,00
4.2.01.09	Dana Alokasi Khusus (DAK)	
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	158.356.261.886,00
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	108.340.869.652,00
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	50.015.392.234,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-
4.3.01	Pendapatan Hibah	
	Jumlah Pendapatan	2.013.392.738.248,00
5	BELANJA DAERAH	
5.1	BELANJA OPERASI	1.661.998.452.314,22
5.1.01	Belanja Pegawai	810.156.715.607,22
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	816.175.476.057,00
5.1.05	Belanja Hibah	30.806.460.650,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	4.859.800.000,00
5.2	BELANJA MODAL	144.037.279.034,00
5.2.01	Belanja Modal Tanah	1.000.000.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	26.984.952.280,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	37.507.556.840,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	78.427.769.914,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	30.000.000,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	87.000.000,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	5.000.000.000,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000,00
5.4	BELANJA TRANSFER	330.466.674.459,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	55.835.530.429,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	274.631.144.030,00
	Jumlah Belanja	2.141.502.405.807,22
	Total Surplus/(Defisit)	(128.109.667.559,22)
6	PEMBIAYAAN DAERAH	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	153.109.667.559,22

KODE	URAIAN	KUA TA 2027
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	153.109.667.559,22
6.1.03	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	25.000.000.000,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	25.000.000.000,00
6.2.04	Pemberian Pinjaman Daerah	0,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	25.000.000.000,00
	Pembiayaan Netto	128.109.667.559,22
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	-
	TOTAL APBD	2.166.502.405.807,22

Sumber : BPKPAD, tahun 2026

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

7.1. Strategi Pemerintah Daerah

Dalam rangka mendanai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah perlu disusun kerangka pendanaan daerah yang matang meliputi pendapatan, belanja dan pembiayaan.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana penerimaan dan pengeluaran pada pemerintah daerah selama satu tahun anggaran yang ditetapkan dengan peraturan daerah. APBD bertujuan untuk mengatur penerimaan dan pengeluaran yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah selama satu tahun anggaran yang memiliki struktur berikut:

- 1) Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.

Pendapatan Daerah terdiri dari:

- a) Pendapatan Asli Daerah
- b) Pendapatan transfer
- c) Lain-lain Pendapatan yang sah

Terhitung Tahun 2021 perhitungan Pendapatan Daerah mengacu Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

- 2) Belanja Daerah adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode waktu berkenaan

Belanja daerah terdiri dari:

- a) Belanja Operasi
- b) Belanja Modal
- c) Belanja Tidak Terduga
- d) Belanja Transfer

- 3) Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan daerah terdiri dari:

- a) Penerimaan pembiayaan
- b) Pengeluaran pembiayaan daerah

Hal-hal yang menjadi pertimbangan Belanja Daerah antara lain:

- 1) Belanja daerah diarahkan pada:
 - a) Peningkatan efektifitas penanggulangan kemiskinan;
 - b) Pemerataan Pembangunan dan Pemantapan Infrastruktur;
 - c) Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Pendidikan;
 - d) Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Kesehatan;
 - e) Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik;
 - f) Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dengan Menciptakan Kemandirian Kerja dan Perluasan Lapangan Kerja;
 - g) Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat dan upaya pemenuhan kebutuhan dasar sarana dan prasarana pelayanan masyarakat;
 - h) Meningkatkan alokasi anggaran pada bidang-bidang yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat (public interest);
 - i) Mengakomodir sebanyak-banyaknya aspirasi dan kepentingan masyarakat dalam skala mikro (bottom up);
 - j) Memantapkan akuntabilitas publik dan efisiensi pengelolaan belanja;
 - k) Menjamin terlaksananya program kegiatan skala besar dan prioritas.
- 2) Sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 maka belanja diprioritaskan pada:
 - a) Prioritas I: diperuntukan Belanja wajib dan mengikat serta belanja untuk pemenuhan penerapan pelayanan dasar (SPM) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b) Prioritas II: Untuk Belanja yang berkaitan dengan program sasaran yang menjadi unggulan kepala daerah serta mempunyai daya ungkit tinggi pada capaian visi/misi daerah.
 - c) Prioritas III: Belanja yang berkaitan dengan penyelenggaraan urusan pemerintah lainnya seperti belanja hibah, bantuan sosial.
Pengalokasian dana pada prioritas III dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- 3) Alokasi anggaran wajib (pendidikan, kesehatan, infrastruktur) sering disebut sebagai *mandatory spending*. Tujuan *mandatory spending* ini

adalah untuk mengurangi masalah ketimpangan sosial dan ekonomi daerah. *Mandatory spending* dalam tata kelola keuangan pemerintah daerah meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a) Alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBD sesuai amanat UUD 1945 pasal 31 ayat (4) dan UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 49 ayat (1).
- b) Besar anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dialokasikan minimal 10% (sepuluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah di luar gaji (UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan).
- c) Dana Transfer Umum (DTU) diarahkan penggunaannya, yaitu paling sedikit 25% (dua puluh lima persen untuk belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antardaerah (UU APBN).
- d) Alokasi dana Desa (ADD) paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa).

Beberapa upaya yang dilakukan agar target pendapatan tercapai adalah:

a. Pendapatan Asli Daerah

Untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bantul maka diperlukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Optimalisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah melalui Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak dan Retribusi Daerah sebagai berikut:
 - a. Meningkatkan mutu pelayanan publik kepada wajib pajak/retribusi daerah dengan memberikan kecepatan/kemudahan dalam pelayanan pembayaran pajak, akses informasi dan kemudahan dalam pengurusan pajak.
 - b. Memperbaiki dan memperluas basis data objek dan subjek pajak/retribusi daerah.

- c. Memberikan reward bagi pamong desa dan dukuh yang wilayahnya telah lunas sebelum jatuh tempo.
- d. Mengembangkan pelaporan pajak secara online untuk wajib pajak yang melakukan sistem pemungutan secara self assessment.
2. Mengoptimalkan pengelolaan manajemen kas daerah dengan memanfaatkan *idle cash* dalam bentuk deposito;
3. Optimalisasi pendayagunaan aset daerah yang berpotensi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah;
4. Meningkatkan kontribusi penerimaan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD melalui upaya memperkuat permodalan perusahaan milik daerah/BUMD;
5. Mengoptimalkan penerimaan yang berasal dari bagi hasil pajak melalui kerjasama instansi vertikal dan daerah dalam menyerap basis pajak terkait;
6. Meningkatkan sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pendapatan daerah misal dengan memperbaiki fasilitas obyek retribusi.

b. Pendapatan dari Pendapatan Transfer dan lain-lain Pendapatan yang Sah

Upaya yang dilakukan dalam rangka pencapaian target pendapatan adalah:

- 1) Melakukan updating data-data daerah yang merupakan variabel penentu alokasi dana perimbangan di daerah.
- 2) Membantu proses pemungutan pajak pusat/provinsi agar nantinya bagi hasil pajak tersebut bisa meningkat.
- 3) Melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat/provinsi dan instansi lainnya untuk memecahkan permasalahan-permasalahan yang mungkin timbul dalam rangka upaya penggalan pendapatan daerah.

7.2. Strategi dan Prioritas Pembangunan Daerah yang Disusun Secara Terintegrasi dengan Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nasional yang Akan Dilaksanakan di Daerah

Indikasi tema RKP 2027 adalah: **“Akslerasi Pertumbuhan Berkualitas melalui Produktivitas, Investasi dan Industri.”**

Tema ini memuat trisula pembangunan yakni pertumbuhan ekonomi, peningkatan SDM dan penurunan kemiskinan, melalui:

1. Penguatan Produktivitas Nasional
2. Investasi Produktif dan Berdaya Saing
3. Industrialisasi Berbasis Sumberdaya dan Potensi Wilayah

Tema Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Tahun 2027 ditetapkan sebagai berikut:

“Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan untuk Perwujudan Pancamulia”

Tema Pembangunan merupakan rumusan strategis tahunan yang menggambarkan fokus, orientasi, dan semangat utama penyelenggaraan pembangunan daerah pada satu tahun perencanaan. Rumusan tema pembangunan dalam RKPD Kabupaten Bantul 2027 disusun dengan mempedomani RPJPD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2045, RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 dan memperhatikan Tema RKP 2027, Tema RKPD DIY Tahun 2027 dan isu-isu strategis yang aktual, maka tema RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2027 adalah:

”Memperkuat Pertumbuhan Ekonomi Daerah Berbasis Pertanian, Industri, dan Pariwisata didukung SDM Berkualitas”

Tema tersebut mengandung pernyataan kunci sebagai berikut:

1. Memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah
2. Berbasis sektor pertanian, industri dan pariwisata.
3. Dukungan SDM yang berkualitas

Penekanan 3 sektor unggulan tersebut akan dijabarkan dalam konsep Analisis **Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial (THIS)**.

Sektor Unggulan Daerah yaitu Pertanian, Industri, dan Pariwisata, dengan SDM Berkualitas sebagai Penggerak Utama. **SDM Berkualitas** merupakan tenaga kerja yang sehat, terdidik, dan menguasai teknologi.

Produktivitas: SDM berkualitas mendongkrak efisiensi di sektor pertanian, industri dan pariwisata (misal: *smart farming* atau digitalisasi wisata).

Investasi: Sektor potensial yang produktif akan menarik modal masuk (investasi) untuk membangun infrastruktur pendukung.

Industri: Investasi yang masuk memperkuat sektor industri daerah (terutama industri pengolahan hasil tani/agroindustri dan industri kreatif pariwisata), sehingga menciptakan nilai tambah (*value-added*) yang tinggi di daerah, bukan sekadar menjual bahan mentah.

Inklusif: Memastikan pertumbuhan dari sektor pertanian, industri, dan pariwisata tersebut dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat (mengurangi ketimpangan dan kemiskinan), bukan hanya segelintir pemilik modal.

Berkelanjutan: Pembangunan pertanian, industri dan pariwisata wajib menjaga daya dukung lingkungan hidup demi generasi masa depan.

Pada tahun 2027 implementasi pendekatan perencanaan dengan konsep Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial (THIS) meliputi:

- a. Pengembangan Kawasan Pantai Selatan
- b. Kolaborasi penanganan kemiskinan
- c. Pengelolaan Sumbu Filosofi Yogyakarta di wilayah Bantul

Prioritas pembangunan daerah merupakan sekumpulan program unggulan yang dipilih secara khusus untuk mencapai sasaran pembangunan daerah dengan memperhatikan tingkat kemendesakan, dan daya ungkit bagi peningkatan kinerja pembangunan daerah. Perumusan prioritas pembangunan dilakukan dengan cara melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan daerah, memperhatikan arah kebijakan dan memperhatikan isu-isu strategis pembangunan.

Tabel 7.1 **Penyelarasan Prioritas Nasional (PN) dan Prioritas DIY**
dengan Prioritas Daerah (PD)

No	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DIY	PRIORITAS DAERAH	NAMA PROGRAM	PERANGKAT DAERAH
PN-1	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tentram	Mewujudkan transformasi sosial dan pelestarian budaya	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
				PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

No	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DIY	PRIORITAS DAERAH	NAMA PROGRAM	PERANGKAT DAERAH
				PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
				PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
PN-1	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tentram	Mewujudkan transformasi sosial dan pelestarian budaya	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Satuan Polisi Pamong Praja
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Satuan Polisi Pamong Praja
				PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Satuan Polisi Pamong Praja
				PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	Satuan Polisi Pamong Praja
PN-2	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi digital, Ekonomi Digital, dan Ekonomi Biru	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)	Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Dinas Kelautan dan Perikanan
				PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Dinas Kelautan dan Perikanan
				PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Dinas Kelautan dan Perikanan
				PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Dinas Kelautan dan Perikanan
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinas Kelautan dan Perikanan

No	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DIY	PRIORITAS DAERAH	NAMA PROGRAM	PERANGKAT DAERAH
PN-2	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi digital, Ekonomi Digital, dan Ekonomi Biru	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)	Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
				PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
				PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
				PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
				PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
				PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
				PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
				PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
				PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
				PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
				PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
PN-2	Memantapkan Sistem Pertahanan	Penurunan ketimpangan (antar kelas	Mewujudkan transformasi ekonomi	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Dinas Pariwisata

No	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DIY	PRIORITAS DAERAH	NAMA PROGRAM	PERANGKAT DAERAH
	Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi digital, Ekonomi Digital, dan Ekonomi Biru	sosial, antar wilayah)	berbasis sumberdaya lokal didukung investasi	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Dinas Pariwisata
				PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Dinas Pariwisata
				PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Dinas Pariwisata
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinas Pariwisata
				PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Dinas Pariwisata
PN-2	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi digital, Ekonomi Digital, dan Ekonomi Biru	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
				PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
				PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
				PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
				PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

No	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DIY	PRIORITAS DAERAH	NAMA PROGRAM	PERANGKAT DAERAH
				PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
				PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
				PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
				PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
				PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
PN-3	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tentram	Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
				PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
PN-3	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tentram	Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Dinas Lingkungan Hidup
				PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup
				PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Dinas Lingkungan Hidup

No	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DIY	PRIORITAS DAERAH	NAMA PROGRAM	PERANGKAT DAERAH
				PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Dinas Lingkungan Hidup
				PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Dinas Lingkungan Hidup
				PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup
				PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Dinas Lingkungan Hidup
				PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Dinas Lingkungan Hidup
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinas Lingkungan Hidup
				PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup
PN-3	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tentram	Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
				PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
				PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
				PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
				PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
				PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman

No	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DIY	PRIORITAS DAERAH	NAMA PROGRAM	PERANGKAT DAERAH
PN-3	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tentram	Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinas Perhubungan
				PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	Dinas Perhubungan
				PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Dinas Perhubungan
PN-3	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tentram	Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)
				PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)
				PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)
				PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)
				PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)
				PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)
PN-4	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi,	Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Yogyakarta	Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Dinas Kesehatan

No	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DIY	PRIORITAS DAERAH	NAMA PROGRAM	PERANGKAT DAERAH
	Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenian, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Dinas Kesehatan
				PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Dinas Kesehatan
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinas Kesehatan
				PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Dinas Kesehatan
				PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Dinas Kesehatan
PN-4	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenian, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Yogyakarta	Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
				PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
				PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
				PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

No	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DIY	PRIORITAS DAERAH	NAMA PROGRAM	PERANGKAT DAERAH
				PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
				PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
				PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
				PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
PN-4	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Yogyakarta	Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
				PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
				PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
				PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
				PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga

No	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DIY	PRIORITAS DAERAH	NAMA PROGRAM	PERANGKAT DAERAH
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
				PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
PN-4	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Yogyakarta	Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
				PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
PN-5	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di dalam Negeri	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
				PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
				PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
				PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
				PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
				PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

No	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DIY	PRIORITAS DAERAH	NAMA PROGRAM	PERANGKAT DAERAH
				PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
PN-5	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di dalam Negeri	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
				PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
				PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
				PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
				PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
				PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
PN-5	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di dalam Negeri	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
				PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
				PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
				PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

No	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DIY	PRIORITAS DAERAH	NAMA PROGRAM	PERANGKAT DAERAH
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
				PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
PN-6	Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Penurunan tingkat kemiskinan	Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
				PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
				PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
				PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
				PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
				PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
				PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
PN-6	Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Penurunan tingkat kemiskinan	Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan
				PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan

No	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DIY	PRIORITAS DAERAH	NAMA PROGRAM	PERANGKAT DAERAH
				PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan
				PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan
				PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan
PN-6	Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Penurunan tingkat kemiskinan	Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Dinas Sosial
				PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Dinas Sosial
				PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Dinas Sosial
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinas Sosial
				PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Dinas Sosial
				PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Dinas Sosial
				PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Dinas Sosial
PN-7	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Penguatan Good Governance pada berbagai tingkatan	Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
				PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia

No	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DIY	PRIORITAS DAERAH	NAMA PROGRAM	PERANGKAT DAERAH
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
				PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
PN-7	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Penguatan Good Governance pada berbagai tingkatan	Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
				PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
				PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
PN-7	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Penguatan Good Governance pada berbagai tingkatan	Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
				PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
				PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
				PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
				PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	Badan Perencanaan

No	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DIY	PRIORITAS DAERAH	NAMA PROGRAM	PERANGKAT DAERAH
					Pembangunan Daerah
7	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Penguatan Good Governance pada berbagai tingkatan	Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
				PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
				PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
PN-7	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Penguatan Good Governance pada berbagai tingkatan	Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Dinas Komunikasi dan Informatika
				PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Dinas Komunikasi dan Informatika
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinas Komunikasi dan Informatika
				PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Dinas Komunikasi dan Informatika
				PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Dinas Komunikasi dan Informatika
				PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Dinas Komunikasi dan Informatika
PN-7	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Penguatan Good Governance pada berbagai tingkatan	Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
				PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
PN-7	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat	Penguatan Good Governance pada berbagai tingkatan	Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Inspektorat Daerah

No	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DIY	PRIORITAS DAERAH	NAMA PROGRAM	PERANGKAT DAERAH
	Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan		pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Inspektorat Daerah
				PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Inspektorat Daerah
PN-7	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Penguatan Good Governance pada berbagai tingkatan	Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kapanewon
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kapanewon
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kapanewon
				PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Kapanewon
				PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Kapanewon
				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kapanewon
				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kapanewon
PN-7	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Penguatan Good Governance pada berbagai tingkatan	Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Sekretariat Daerah
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Sekretariat Daerah
				PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Sekretariat Daerah
				PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Sekretariat Daerah

No	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DIY	PRIORITAS DAERAH	NAMA PROGRAM	PERANGKAT DAERAH
PN-7	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Penguatan Good Governance pada berbagai tingkatan	Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
PN-8	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antar Umat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tentram	Mewujudkan transformasi sosial dan pelestarian budaya	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)
				PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)

Sumber: RKPD, 2026

Program Strategis Nasional (ProSN) adalah penerjemahan program/proyek yang tercantum dalam RPJMN dan RKP yang memiliki sifat strategis dan menjadi tanggung jawab pemerintahan daerah dalam upaya meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan yang berkualitas dan berkelanjutan, penurunan kemiskinan, dan peningkatan produktivitas sumber daya manusia serta menjaga keamanan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Interkoneksi Program Strategis Nasional (ProSN) dengan Program Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul dapat dilihat pada tabel 7.2., sedangkan Kesepakatan Rakortekbang Tahun 2026 tentang Outcome prioritas, Program dan Sub Kegiatan dalam mendukung Astacita untuk Kabupaten Bantul Tahun 2027 dapat dilihat pada tabel 7.3.

Tabel 7.2 Interkoneksi Program Strategis Nasional (ProSN) dengan Program Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul

Pro SN	Proyek / Kegiatan Pro SN	Tematik	Kinerja Tematik	Bidang Urusan	Program	Sub Kegiatan	Indikator	Target Renja	Perangkat Daerah
01 Pengentasan Kemiskinan	01.001 Penanggulan gan Kemiskinan	OPTIMALISASI PELAKSANAAN PENGENTASAN KEMISKINAN DAN PENGHAPUSAN KEMISKINAN EKSTREM	Menurunnya kemiskinan dan kemiskinan ekstrem	1.06 URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG SOSIAL	1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1.06.05.2.02.0004 Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	Dinas Sosial
01 Pengentasan Kemiskinan	01.001 Penanggulan gan Kemiskinan	OPTIMALISASI PELAKSANAAN PENGENTASAN KEMISKINAN DAN PENGHAPUSAN KEMISKINAN EKSTREM	Menurunnya kemiskinan dan kemiskinan ekstrem	1.06 URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG SOSIAL	1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1.06.05.2.02.0006 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1000 Orang	Dinas Sosial
01 Pengentasan Kemiskinan	01.001 Penanggulan gan Kemiskinan	OPTIMALISASI PELAKSANAAN PENGENTASAN KEMISKINAN DAN PENGHAPUSAN KEMISKINAN EKSTREM	Menurunnya kemiskinan dan kemiskinan ekstrem	1.06 URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG SOSIAL	3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	3.25.03.2.01.0004 Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	3 Unit	Dinas Kelautan dan Perikanan
01 Pengentasan Kemiskinan	01.001 Penanggulan gan Kemiskinan	OPTIMALISASI PELAKSANAAN PENGENTASAN KEMISKINAN DAN PENGHAPUSAN KEMISKINAN EKSTREM	Menurunnya kemiskinan dan kemiskinan ekstrem	2.09 URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG PANGAN	2.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	2.09.04.2.02.0002 Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
01 Pengentasan Kemiskinan	01.003 Sekolah Rakyat	SEKOLAH RAKYAT	Terbangunnya 500 Bangunan Sekolah Rakyat tahun 2029	1.06 URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG SOSIAL	1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1.06.05.2.02.0008 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan	75 Usulan	Dinas Sosial
01 Pengentasan Kemiskinan	01.003 Sekolah Rakyat	SEKOLAH RAKYAT	Terbangunnya 500 Bangunan Sekolah Rakyat tahun 2029	2.11 URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN	2.11.06.2.01.0001 Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	10 Dokumen	Dinas Lingkungan Hidup

Pro SN	Proyek / Kegiatan Pro SN	Tematik	Kinerja Tematik	Bidang Urusan	Program	Sub Kegiatan	Indikator	Target Renja	Perangkat Daerah
					LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)				
01 Pengentasan Kemiskinan	01.004 Pembangunan 3 Juta Rumah	PEMBANGUNAN TIGA JUTA RUMAH	Meningkatnya akses rumah tangga terhadap hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	1.03.08.2.01.0023 Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	1200 Dokumen	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
01 Pengentasan Kemiskinan	01.004 Pembangunan 3 Juta Rumah	PEMBANGUNAN TIGA JUTA RUMAH	Meningkatnya akses rumah tangga terhadap hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan	1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	1.04.02.2.03.0004 Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun	6 Unit Rumah	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
01 Pengentasan Kemiskinan	01.004 Pembangunan 3 Juta Rumah	PEMBANGUNAN TIGA JUTA RUMAH	Meningkatnya akses rumah tangga terhadap hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan	1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.04 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	1.04.04.2.01.0001 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	50 Unit Rumah	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
01 Pengentasan Kemiskinan	01.004 Pembangunan 3 Juta Rumah	PEMBANGUNAN TIGA JUTA RUMAH	Meningkatnya akses rumah tangga terhadap hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan	1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.04 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	1.04.04.2.01.0004 Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun dalam Rangka Pencegahan Kumuh	8 Unit	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman

Pro SN	Proyek / Kegiatan Pro SN	Tematik	Kinerja Tematik	Bidang Urusan	Program	Sub Kegiatan	Indikator	Target Renja	Perangkat Daerah
02 Ketahanan Pangan	02.001 Swasembada Pangan (Irigasi untuk Mendukung Swasembada Pangan)	IRIGASI YANG MENDUKUNG SWASEMBADA PANGAN	Terlaksananya jaringan irigasi swasembada pangan yang berkelanjutan	1.03 URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.2.01.0128 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun	5 Dokumen	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
02 Ketahanan Pangan	02.001 Swasembada Pangan (Irigasi untuk Mendukung Swasembada Pangan)	IRIGASI YANG MENDUKUNG SWASEMBADA PANGAN	Terlaksananya jaringan irigasi swasembada pangan yang berkelanjutan	1.03 URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.2.02.0021 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	6 KM	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
02 Ketahanan Pangan	02.002 Pendayagunaan Penyuluh Pertanian	PENDAYAGUNAAN PENYULUH PERTANIAN	Beroperasinya Balai Penyuluh Pertanian (BPP)	3.27 URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG PERTANIAN	3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	3.27.07.2.01.0010 Peningkatan Kapasitas dan Fungsi Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitas dan fungsinya	6 Unit	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
02 Ketahanan Pangan	02.002 Pendayagunaan Penyuluh Pertanian	PENDAYAGUNAAN PENYULUH PERTANIAN	Beroperasinya Balai Penyuluh Pertanian (BPP)	3.27 URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG PERTANIAN	3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	3.27.07.2.01.0015 Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Penyuluhan Pertanian kab/kota	Jumlah Pelaksanaan Pengembangan Metode Penyuluhan oleh penyuluh pertanian	6 Laporan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
02 Ketahanan Pangan	02.004 Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian (Sawah/Lumbung Pangan/Food Estate)	MENCETAK DAN MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS LAHAN PERTANIAN (SAWAH/LUMBUNG PANGAN/FOOD ESTATE)	Meningkatnya Indeks Pertanaman Hasil Cetak Sawah	1.03 URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	1.03.12.2.01.0005 Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah surat persetujuan substansi RTRW Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)
02 Ketahanan Pangan	02.005 Pangan Akuatik	PANGAN AKUATIK	Terwujudnya Ketersediaan Sumber Pangan Akuatik Secara Berkelanjutan	3.25 URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG KELAUTAN	3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	3.25.03.2.01.0004 Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	3 Unit	Dinas Kelautan dan Perikanan

Pro SN	Proyek / Kegiatan Pro SN	Tematik	Kinerja Tematik	Bidang Urusan	Program	Sub Kegiatan	Indikator	Target Renja	Perangkat Daerah
			Sebagai Bentuk Swasembada dan Ketahanan Pangan.	DAN PERIKANAN					
02 Ketahanan Pangan	02.005 Pangan Akuatik	PANGAN AKUATIK	Terwujudnya Ketersediaan Sumber Pangan Akuatik Secara Berkelanjutan Sebagai Bentuk Swasembada dan Ketahanan Pangan.	3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	3.25.03.2.02.0001 Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	15 Orang	Dinas Kelautan dan Perikanan
02 Ketahanan Pangan	02.005 Pangan Akuatik	PANGAN AKUATIK	Terwujudnya Ketersediaan Sumber Pangan Akuatik Secara Berkelanjutan Sebagai Bentuk Swasembada dan Ketahanan Pangan.	3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	3.25.03.2.02.0002 Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	2 Kelompok	Dinas Kelautan dan Perikanan
02 Ketahanan Pangan	02.005 Pangan Akuatik	PANGAN AKUATIK	Terwujudnya Ketersediaan Sumber Pangan Akuatik Secara Berkelanjutan Sebagai Bentuk Swasembada dan Ketahanan Pangan.	3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	3.25.03.2.03.0002 Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	1 Layanan	Dinas Kelautan dan Perikanan
02 Ketahanan Pangan	02.006 Kampung Nelayan Merah Putih	KAMPUNG NELAYAN MERAH PUTIH	Terwujudnya kemandirian dan daya saing kampung nelayan serta kampung budi daya sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru di wilayah pesisir.	3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	3.25.03.2.02.0001 Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	15 Orang	Dinas Kelautan dan Perikanan

Pro SN	Proyek / Kegiatan Pro SN	Tematik	Kinerja Tematik	Bidang Urusan	Program	Sub Kegiatan	Indikator	Target Renja	Perangkat Daerah
02 Ketahanan Pangan	02.006 Kampung Nelayan Merah Putih	KAMPUNG NELAYAN MERAH PUTIH	Terwujudnya kemandirian dan daya saing kampung nelayan serta kampung budi daya sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru di wilayah pesisir.	3.25 URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	3.25.03.2.02.0002 Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	2 Kelompok	Dinas Kelautan dan Perikanan
02 Ketahanan Pangan	02.006 Kampung Nelayan Merah Putih	KAMPUNG NELAYAN MERAH PUTIH	Terwujudnya kemandirian dan daya saing kampung nelayan serta kampung budi daya sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru di wilayah pesisir.	3.25 URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	3.25.03.2.01.0004 Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	3 Unit	Dinas Kelautan dan Perikanan
03 Kesehatan untuk Semua	03.001 Stunting	PENCEGAHAN DAN PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING	Pencegahan dan Penurunan Stunting	1.02 URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	Dinas Kesehatan
03 Kesehatan untuk Semua	03.001 Stunting	PENCEGAHAN DAN PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING	Pencegahan dan Penurunan Stunting	1.02 URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	8015 Orang	Dinas Kesehatan
03 Kesehatan untuk Semua	03.001 Stunting	PENCEGAHAN DAN PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING	Pencegahan dan Penurunan Stunting	1.02 URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	8015 Orang	Dinas Kesehatan
03 Kesehatan untuk Semua	03.001 Stunting	PENCEGAHAN DAN PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING	Pencegahan dan Penurunan Stunting	1.02 URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN	1.02.02.2.02.0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6890 Orang	Dinas Kesehatan

Pro SN	Proyek / Kegiatan Pro SN	Tematik	Kinerja Tematik	Bidang Urusan	Program	Sub Kegiatan	Indikator	Target Renja	Perangkat Daerah
					UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				
03 Kesehatan untuk Semua	03.001 Stunting	PENCEGAHAN DAN PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING	Pencegahan dan Penurunan Stunting	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	40000 Orang	Dinas Kesehatan
03 Kesehatan untuk Semua	03.001 Stunting	PENCEGAHAN DAN PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING	Pencegahan dan Penurunan Stunting	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	1.03.03.2.01.0026 Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan	2 Liter/Detik	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
03 Kesehatan untuk Semua	03.001 Stunting	PENCEGAHAN DAN PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING	Pencegahan dan Penurunan Stunting	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	1.03.03.2.01.0032 Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	50 SR	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
03 Kesehatan untuk Semua	03.001 Stunting	PENCEGAHAN DAN PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING	Pencegahan dan Penurunan Stunting	2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	2.09.03.2.01.0007 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	0 Keluarga	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
03 Kesehatan untuk Semua	03.001 Stunting	PENCEGAHAN DAN PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING	Pencegahan dan Penurunan Stunting	2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	2.14.04.2.01.0033 Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (Satyagatra)	Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (Satyagatra)	12 Laporan / Dokumen	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
03 Kesehatan untuk Semua	03.002 Pemeriksaan Kesehatan Gratis	PEMERIKSAAN KESEHATAN GRATIS	Meningkatnya Masyarakat Kelompok Usia Bayi, Balita,	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN	1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Dokumen	UPTD Jamkesda

Pro SN	Proyek / Kegiatan Pro SN	Tematik	Kinerja Tematik	Bidang Urusan	Program	Sub Kegiatan	Indikator	Target Renja	Perangkat Daerah
			Remaja, Dewasa, Dan Lansia Yang Menerima Pemeriksaan Kesehatan Gratis Sebagai Upaya Deteksi Dini, Pencegahan Penyakit, Dan Pengurangan Potensi Beban Anggaran Pengendalian Penyakit		UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				
03 Kesehatan untuk Semua	03.002 Pemeriksaan Kesehatan Gratis	PEMERIKSAAN KESEHATAN GRATIS	Meningkatnya Masyarakat Kelompok Usia Bayi, Balita, Remaja, Dewasa, Dan Lansia Yang Menerima Pemeriksaan Kesehatan Gratis Sebagai Upaya Deteksi Dini, Pencegahan Penyakit, Dan Pengurangan Potensi Beban Anggaran Pengendalian Penyakit	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02.0056 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	1 Laporan	Dinas Kesehatan
03 Kesehatan untuk Semua	03.002 Pemeriksaan Kesehatan Gratis	PEMERIKSAAN KESEHATAN GRATIS	Meningkatnya Masyarakat Kelompok Usia Bayi, Balita, Remaja, Dewasa, Dan Lansia Yang Menerima Pemeriksaan Kesehatan Gratis Sebagai Upaya Deteksi Dini,	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02.0057 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	1 Laporan	Dinas Kesehatan

Pro SN	Proyek / Kegiatan Pro SN	Tematik	Kinerja Tematik	Bidang Urusan	Program	Sub Kegiatan	Indikator	Target Renja	Perangkat Daerah
			Pencegahan Penyakit, Dan Pengurangan Potensi Beban Anggaran Pengendalian Penyakit						
03 Kesehatan untuk Semua	03.002 Pemeriksaan Kesehatan Gratis	PEMERIKSAAN KESEHATAN GRATIS	Meningkatnya Masyarakat Kelompok Usia Bayi, Balita, Remaja, Dewasa, Dan Lansia Yang Menerima Pemeriksaan Kesehatan Gratis Sebagai Upaya Deteksi Dini, Pencegahan Penyakit, Dan Pengurangan Potensi Beban Anggaran Pengendalian Penyakit	2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	2.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	2.12.04.2.03.0004 Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	24 Dokumen	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
03 Kesehatan untuk Semua	03.003 Jaminan Kesehatan Nasional	JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN)	Memperkuat Kapasitas JKN dan Pendanaan Kesehatan dalam Mendukung Pembangunan Kesehatan	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Dokumen	UPTD Jamkesda
03 Kesehatan untuk Semua	03.003 Jaminan Kesehatan Nasional	JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN)	Memperkuat Kapasitas JKN dan Pendanaan Kesehatan dalam Mendukung Pembangunan Kesehatan	1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1.06.05.2.02.0008 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan	75 Usulan	Dinas Sosial
03 Kesehatan untuk Semua	03.003 Jaminan Kesehatan Nasional	JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN)	Memperkuat Kapasitas JKN dan Pendanaan Kesehatan dalam	2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI	2.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI	2.12.04.2.03.0004 Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	24 Dokumen	Dinas Kependudukan dan

Pro SN	Proyek / Kegiatan Pro SN	Tematik	Kinerja Tematik	Bidang Urusan	Program	Sub Kegiatan	Indikator	Target Renja	Perangkat Daerah
			Mendukung Pembangunan Kesehatan	SI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN				Pencatatan Sipil
03 Kesehatan untuk Semua	03.004 Penuntasan TBC	PENUNTASAN TUBERKULOSIS (TBC)	Tercapainya Penuntasan TBC Melalui Peningkatan Upaya Pencegahan TBC, Intensifikasi Penemuan Kasus Secara Masif dan Pengobatan TBC Sampai Tuntas	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	8560 Orang	Dinas Kesehatan
03 Kesehatan untuk Semua	03.004 Penuntasan TBC	PENUNTASAN TUBERKULOSIS (TBC)	Tercapainya Penuntasan TBC Melalui Peningkatan Upaya Pencegahan TBC, Intensifikasi Penemuan Kasus Secara Masif dan Pengobatan TBC Sampai Tuntas	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1047 Orang	Dinas Kesehatan
03 Kesehatan untuk Semua	03.004 Penuntasan TBC	PENUNTASAN TUBERKULOSIS (TBC)	Tercapainya Penuntasan TBC Melalui Peningkatan Upaya Pencegahan TBC, Intensifikasi Penemuan Kasus Secara Masif dan Pengobatan TBC Sampai Tuntas	1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1.06.05.2.02.0006 Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1000 Orang	Dinas Sosial
03 Kesehatan untuk Semua	03.004 Penuntasan TBC	PENUNTASAN TUBERKULOSIS (TBC)	Tercapainya Penuntasan TBC Melalui Peningkatan Upaya Pencegahan TBC, Intensifikasi Penemuan Kasus Secara Masif dan	2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN	2.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	2.12.04.2.03.0004 Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	24 Dokumen	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pro SN	Proyek / Kegiatan Pro SN	Tematik	Kinerja Tematik	Bidang Urusan	Program	Sub Kegiatan	Indikator	Target Renja	Perangkat Daerah
			Pengobatan TBC Sampai Tuntas	PENCATATAN SIPIL					
03 Kesehatan untuk Semua	03.005 Pembangunan Rumah Sakit Lengkap Berkualitas di Kabupaten/ Kota	PEMBANGUNAN RUMAH SAKIT LENGKAP BERKUALITAS DI KABUPATEN/KOTA	meningkatkan kualitas rumah sakit tipe atau kelas D menjadi C melalui peningkatan infrastruktur dan fasilitas di rumah sakit daerah	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.01.0022 Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	1 Unit	RSUD Panembahan Senopati
03 Kesehatan untuk Semua	03.005 Pembangunan Rumah Sakit Lengkap Berkualitas di Kabupaten/ Kota	PEMBANGUNAN RUMAH SAKIT LENGKAP BERKUALITAS DI KABUPATEN/KOTA	meningkatkan kualitas rumah sakit tipe atau kelas D menjadi C melalui peningkatan infrastruktur dan fasilitas di rumah sakit daerah	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1.02.03.2.02.0003 Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1 Dokumen	Dinas Kesehatan
04 Perluasan Akses Pendidikan	04.002 Pembangunan dan Revitalisasi Pendidikan Dasar dan Menengah	PERCEPATAN PELAKSANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAN REVITALISASI SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH	Terpenuhinya pelayanan dasar bidang pendidikan	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.01.0038 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 Dokumen	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
04 Perluasan Akses Pendidikan	04.002 Pembangunan dan Revitalisasi Pendidikan Dasar dan Menengah	PERCEPATAN PELAKSANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAN REVITALISASI SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR,	Terpenuhinya pelayanan dasar bidang pendidikan	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.02.0051 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	95 Dokumen	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga

Pro SN	Proyek / Kegiatan Pro SN	Tematik	Kinerja Tematik	Bidang Urusan	Program	Sub Kegiatan	Indikator	Target Renja	Perangkat Daerah
		DAN PENDIDIKAN MENENGAH							
04 Perluasan Akses Pendidikan	04.002 Pembangunan dan Revitalisasi Pendidikan Dasar dan Menengah	PERCEPATAN PELAKSANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAN REVITALISASI SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH	Terpenuhinya pelayanan dasar bidang pendidikan	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.03.0025 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 Dokumen	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
04 Perluasan Akses Pendidikan	04.003 Pembangunan dan Revitalisasi SMA Unggul Garuda dan Digitalisasi Pembelajaran	DIGITALISASI PEMBELAJARAN	Terpenuhinya pelayanan dasar bidang pendidikan	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.04.2.01.0001 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1 Dokumen	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
04 Perluasan Akses Pendidikan	04.003 Pembangunan dan Revitalisasi SMA Unggul Garuda dan Digitalisasi Pembelajaran	DIGITALISASI PEMBELAJARAN	Terpenuhinya pelayanan dasar bidang pendidikan	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.02.0060 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 Orang	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
04 Perluasan Akses Pendidikan	04.004 Makan Bergizi Gratis	MAKAN BERGIZI GRATIS	Meningkatnya asupan gizi dan pengetahuan gizi kelompok sasaran	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.01.0049 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 Orang	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
04 Perluasan Akses Pendidikan	04.004 Makan Bergizi Gratis	MAKAN BERGIZI GRATIS	Meningkatnya asupan gizi dan pengetahuan gizi kelompok sasaran	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	1.02.04.2.04.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat	1 Dokumen	Dinas Kesehatan

Pro SN	Proyek / Kegiatan Pro SN	Tematik	Kinerja Tematik	Bidang Urusan	Program	Sub Kegiatan	Indikator	Target Renja	Perangkat Daerah
						Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)		
04 Perluasan Akses Pendidikan	04.004 Makan Bergizi Gratis	MAKAN BERGIZI GRATIS	Meningkatnya asupan gizi dan pengetahuan gizi kelompok sasaran	2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	2.09.05.2.01.0007 Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	1 Dokumen	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
04 Perluasan Akses Pendidikan	04.004 Makan Bergizi Gratis	MAKAN BERGIZI GRATIS	Meningkatnya asupan gizi dan pengetahuan gizi kelompok sasaran	3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	3.25.06.2.02.0002 Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	9 Unit Usaha	Dinas Kelautan dan Perikanan
05 Pertumbuhan Ekonomi	05.001 Pengendalian Inflasi	PENGENDALIAN INFLASI	Pengendalian inflasi dengan program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	2.09.03.2.01.0008 Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	1 laporan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
05 Pertumbuhan Ekonomi	05.001 Pengendalian Inflasi	PENGENDALIAN INFLASI	Pengendalian inflasi dengan program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	2.09.03.2.01.0020 Penyusunan Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota	Data Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
05 Pertumbuhan Ekonomi	05.001 Pengendalian Inflasi	PENGENDALIAN INFLASI	Pengendalian inflasi dengan program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	3.30.04.2.02.0002 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	12 Laporan	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan

Pro SN	Proyek / Kegiatan Pro SN	Tematik	Kinerja Tematik	Bidang Urusan	Program	Sub Kegiatan	Indikator	Target Renja	Perangkat Daerah
									Perdagangan
05 Pertumbuhan Ekonomi	05.002 Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih	KOPERASI DESA/KELURAHAN MERAH PUTIH	Meningkatnya peran koperasi dalam perekonomian lokal melalui pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih	2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.17.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	2.17.06.2.01.0005 Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	40 Unit Usaha	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
		MASYARAKAT ADAT	Meningkatnya pengakuan, perlindungan, pemberdayaan, serta akses masyarakat hukum adat terhadap pelayanan dasar dan pelestarian budaya secara berkelanjutan.	2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	2.13.05.2.01.0002 Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	1 Dokumen	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan
		PENANGGULANGAN BENCANA	Tingkat keberhasilan pemerintah dalam melaksanakan upaya pengurangan risiko, penanganan darurat, dan pemulihan pascabencana secara cepat, tepat, terkoordinasi, dan berkelanjutan guna melindungi masyarakat serta meminimalkan dampak bencana.	1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.05.03.2.01.0008 Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 Dokumen	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Pro SN	Proyek / Kegiatan Pro SN	Tematik	Kinerja Tematik	Bidang Urusan	Program	Sub Kegiatan	Indikator	Target Renja	Perangkat Daerah
		PENANGGULANGAN BENCANA	Tingkat keberhasilan pemerintah dalam melaksanakan upaya pengurangan risiko, penanganan darurat, dan pemulihan pascabencana secara cepat, tepat, terkoordinasi, dan berkelanjutan guna melindungi masyarakat serta meminimalkan dampak bencana.	1.05 URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.05.03.2.02.0027 Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 Dokumen	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		PENANGGULANGAN BENCANA	Tingkat keberhasilan pemerintah dalam melaksanakan upaya pengurangan risiko, penanganan darurat, dan pemulihan pascabencana secara cepat, tepat, terkoordinasi, dan berkelanjutan guna melindungi masyarakat serta meminimalkan dampak bencana.	1.05 URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.05.03.2.04.0015 Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 Dokumen	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		PENGARUSUTAMAAN GENDER	Meningkatnya kesetaraan gender, kualitas hidup, dan peran perempuan	1.01 URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.02.0060 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang	1 Orang	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga

Pro SN	Proyek / Kegiatan Pro SN	Tematik	Kinerja Tematik	Bidang Urusan	Program	Sub Kegiatan	Indikator	Target Renja	Perangkat Daerah
			melalui penguatan tata kelola dan kelembagaan PUG dalam pembangunan			Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Pendidikan yang dilaksanakan		
		PENGARUSUTAMAAN GENDER	Meningkatnya kesetaraan gender, kualitas hidup, dan peran perempuan melalui penguatan tata kelola dan kelembagaan PUG dalam pembangunan	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	8015 Orang	Dinas Kesehatan
		PENGARUSUTAMAAN GENDER	Meningkatnya kesetaraan gender, kualitas hidup, dan peran perempuan melalui penguatan tata kelola dan kelembagaan PUG dalam pembangunan	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	8015 Orang	Dinas Kesehatan
		PENGARUSUTAMAAN GENDER	Meningkatnya kesetaraan gender, kualitas hidup, dan peran perempuan melalui penguatan tata kelola dan kelembagaan PUG dalam pembangunan	2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	2.07.04.2.01.0005 Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	92 Orang	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		PENGARUSUTAMAAN GENDER	Meningkatnya kesetaraan gender, kualitas hidup, dan peran perempuan melalui penguatan tata kelola dan kelembagaan PUG dalam pembangunan	2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN	2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	2.08.02.2.01.0015 Advokasi dan sosialisasi terkait penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota	Jumlah pemangku kepentingan tingkat Kab/Kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) terkait	45 Lembaga	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian

Pro SN	Proyek / Kegiatan Pro SN	Tematik	Kinerja Tematik	Bidang Urusan	Program	Sub Kegiatan	Indikator	Target Renja	Perangkat Daerah
			dalam pembangunan	PERLINDUNGAN ANAK			penyelenggaraan PUG Kewenangan Kab/Kota		n Penduduk Dan Keluarga Berencana
		PENGARUSUTAMAAN GENDER	Meningkatnya kesetaraan gender, kualitas hidup, dan peran perempuan melalui penguatan tata kelola dan kelembagaan PUG dalam pembangunan	2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	2.17.07.2.01.0023 Fasilitas Integrasi Basis Data Tunggal UMKM	Jumlah Kegiatan Hasil Fasilitas Integrasi dan Sinkronisasi Data UMKM	2 Kegiatan	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
		PERLINDUNGAN ANAK	Terpenuhinya hak dan perlindungan khusus anak melalui penguatan kelembagaan dan tata kelola pemenuhan hak anak dalam proses pembangunan	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.02.0055 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	1 Kegiatan	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
		PERLINDUNGAN ANAK	Terpenuhinya hak dan perlindungan khusus anak melalui penguatan kelembagaan dan tata kelola pemenuhan hak anak dalam proses pembangunan	1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.2.01.0005 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	80 Orang	Dinas Sosial
		PERLINDUNGAN ANAK	Terpenuhinya hak dan perlindungan khusus anak melalui penguatan kelembagaan dan tata kelola pemenuhan hak anak dalam proses pembangunan	1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.2.01.0006 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	Dinas Sosial

Pro SN	Proyek / Kegiatan Pro SN	Tematik	Kinerja Tematik	Bidang Urusan	Program	Sub Kegiatan	Indikator	Target Renja	Perangkat Daerah
		PERLINDUNGAN ANAK	Terpenuhinya hak dan perlindungan khusus anak melalui penguatan kelembagaan dan tata kelola pemenuhan hak anak dalam proses pembangunan	2.08 URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	2.08.06.2.02.0012 Bimbingan teknis dan pendampingan SDM lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/Kota	Jumlah SDM lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/Kota yang mendapatkan bimbingan teknis dan pendampingan.	50 Orang	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
		PERLINDUNGAN ANAK	Terpenuhinya hak dan perlindungan khusus anak melalui penguatan kelembagaan dan tata kelola pemenuhan hak anak dalam proses pembangunan	5.01 PERENCANAAN	5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	5.01.02.2.01.0005 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	1 Berita Acara	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		EKONOMI SYARIAH	Terintegrasinya implementasi Ekonomi Syariah dalam kebijakan, program, dan kegiatan lembaga negara, kementerian/lembaga dan pemerintah daerah	1.06 URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG SOSIAL	1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1.06.05.2.02.0004 Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	Dinas Sosial
		EKONOMI SYARIAH	Terintegrasinya implementasi Ekonomi Syariah dalam kebijakan, program, dan kegiatan lembaga negara, kementerian/lembaga dan pemerintah daerah	2.17 URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	2.17.07.2.01.0027 Pembinaan dan Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Produk	Jumlah UMKM yang dibina dan difasilitasi dalam mengakses Sertifikasi dan Standardisasi Produk	10 Unit Usaha	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

Pro SN	Proyek / Kegiatan Pro SN	Tematik	Kinerja Tematik	Bidang Urusan	Program	Sub Kegiatan	Indikator	Target Renja	Perangkat Daerah
		EKONOMI SYARIAH	Terintegrasinya implementasi Ekonomi Syariah dalam kebijakan, program, dan kegiatan lembaga negara, kementerian/lembaga dan pemerintah daerah	3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	3.26.02.2.04.0023 Fasilitasi dan Pembinaan Pengawas Usaha Pariwisata di Daerah	Jumlah Pengawas di Daerah yang Mendapatkan Advokasi dan Pendampingan Pengawasan Standar Usaha Bidang Pariwisata	50 Orang	Dinas Pariwisata
		EKONOMI SYARIAH	Terintegrasinya implementasi Ekonomi Syariah dalam kebijakan, program, dan kegiatan lembaga negara, kementerian/lembaga dan pemerintah daerah	3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	3.31.02.2.01.0008 Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Kabupaten/Kota	- Jumlah objek pengawasan jaminan produk halal yang dapat diawasi - Jumlah program pengawasan Jaminan produk halal yang dapat diimplementasikan	1 Dokumen	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
		EKONOMI SYARIAH	Terintegrasinya implementasi Ekonomi Syariah dalam kebijakan, program, dan kegiatan lembaga negara, kementerian/lembaga dan pemerintah daerah	4.01 SEKRETARIAT DAERAH	4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	4.01.03.2.01.0002 Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	5 Laporan	Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumberdaya Alam

Sumber: RKPD, 2026

Tabel 7.3 Kesepakatan Rakortekbang Tahun 2026 tentang Outcome prioritas, Program dan Sub Kegiatan dalam Mendukung Astacita untuk Kabupaten Bantul Tahun 2027

ASTA CITA	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	INDIKATOR	SATUAN	PROGRAM	KODE	SUBKEGIATAN
Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	%	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.01.0049	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan
Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	%	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.02.0060	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan
Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	%	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.03.0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD
Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	%	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.03.0046	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD

ASTA CITA	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	INDIKATOR	SATUAN	PROGRAM	KODE	SUBKEGIATAN
Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Kesehatan Untuk Semua	Angka Kematian Ibu (AKI)	(per 100.000 kelahiran hidup)	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.01.002.2	Pengembangan Rumah Sakit
Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Kesehatan Untuk Semua	Angka Kematian Ibu (AKI)	(per 100.000 kelahiran hidup)	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.01.002.3	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan
Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Kesehatan Untuk Semua	Angka Kematian Ibu (AKI)	(per 100.000 kelahiran hidup)	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1.02.03.2.02.000.3	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan
Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Penyelenggaraan Infrastruktur Pekerjaan Umum Yang Andal Dan Berkelanjutan	Jumlah Luas Kawasan yang terlindungi oleh risiko daya rusak air (Ha)	Ha	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.2.01.010.1	Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing
Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru							
Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Penyelenggaraan Infrastruktur Pekerjaan Umum Yang Andal Dan Berkelanjutan	Peningkatan Presentasi Pengawasan Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang Berkualitas Baik	%	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	1.03.03.2.01.002.5	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru							

ASTA CITA	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	INDIKATOR	SATUAN	PROGRAM	KODE	SUBKEGIATAN
Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Penyelenggaraan Infrastruktur Pekerjaan Umum Yang Andal Dan Berkelanjutan	Peningkatan Presentasi Pengawasan Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang Berkinerja Baik	%	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	1.03.03.2.01.0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan
Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru							
Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Penyelenggaraan Infrastruktur Pekerjaan Umum Yang Andal Dan Berkelanjutan	Rumah tangga dengan akses air minum aman (%)	%	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	1.03.04.2.01.0017	Penyediaan Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA
Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru							
Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Penyelenggaraan Infrastruktur Pekerjaan Umum Yang Andal Dan Berkelanjutan	Persentase timbulan sampah yang terolah di fasilitas pengolahan sampah	%	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	1.03.05.2.01.0038	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)
Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru							
Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Penyelenggaraan Infrastruktur Pekerjaan Umum Yang Andal Dan Berkelanjutan	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	%	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	1.03.05.2.01.0045	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)
Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru							
Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN	Penyelenggaraan Infrastruktur Pekerjaan Umum	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	%	PROGRAM PENYELENGGARAA N JALAN	1.03.10.2.01.0055	Rehabilitasi Jalan

ASTA CITA	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	INDIKATOR	SATUAN	PROGRAM	KODE	SUBKEGIATAN
Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	UMUM DAN PENATAAN RUANG	Yang Andal Dan Berkelanjutan					
Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Penyelenggaraan Infrastruktur Pekerjaan Umum Yang Andal Dan Berkelanjutan	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	%	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	1.03.11.2.04.0006	Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi
Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Penyelenggaraan Infrastruktur Pekerjaan Umum Yang Andal Dan Berkelanjutan	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	%	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	1.03.11.2.04.0006	Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi
Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Terlaksananya pembangunan daerah sesuai dengan rencana tata ruang	Pengenaan Sanksi Administratif Pelanggaran Pemanfaatan Ruang	Kasus	PROGRAM PENYELENGGARAA N PENATAAN RUANG	1.03.12.2.01.0010	Penetapan RDTR Kabupaten/Kota
Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Terlaksananya pembangunan daerah sesuai dengan rencana tata ruang	Penetapan RDTR	Perda/Perkada	PROGRAM PENYELENGGARAA N PENATAAN RUANG	1.03.12.2.04.0011	Pengawasan TURBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan Manfaat
Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Terlaksananya pembangunan daerah sesuai dengan rencana tata ruang	Penetapan RDTR	Perda/Perkada	PROGRAM PENYELENGGARAA N PENATAAN RUANG	1.03.12.2.04.0011	Pengawasan TURBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan Manfaat
Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Terlaksananya pembangunan daerah sesuai dengan rencana tata ruang	Penetapan RDTR	Perda/Perkada	PROGRAM PENYELENGGARAA N PENATAAN RUANG	1.03.12.2.04.0011	Pengawasan TURBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan Manfaat

ASTA CITA	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	INDIKATOR	SATUAN	PROGRAM	KODE	SUBKEGIATAN
Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Terpenuhinya Rumah Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	(%)	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.03.2.03.0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni
Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Terpenuhinya Rumah Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	(%)	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.03.2.03.0012	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 Ha
Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Terpenuhinya Rumah Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	(%)	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	1.04.05.2.01.0012	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan
Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Terpenuhinya Rumah Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	(%)	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	1.04.05.2.01.0012	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan
Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Terwujudnya Manajemen Bencana yang Terintegrasi, Pelayanan Satpol PP, Satlinmas, dan Pelayanan Pemadam Kebakaran Sesuai Standar	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlin-mas Sub Urusan Bencana	Nilai	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.05.03.2.01.0007	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)
Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.							
Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.							
Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	URUSAN PEMERINTAHAN	Terwujudnya Manajemen		Nilai			Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota

ASTA CITA	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	INDIKATOR	SATUAN	PROGRAM	KODE	SUBKEGIATAN
Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Bencana yang Terintegrasi, Pelayanan Satpol PP, Satlinmas, dan Pelayanan Pemadam Kebakaran Sesuai Standar	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlin-mas Sub Urusan Bencana		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.05.03.2.01.0008	
Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.							
Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Terwujudnya Manajemen Bencana yang Terintegrasi, Pelayanan Satpol PP, Satlinmas, dan Pelayanan Pemadam Kebakaran Sesuai Standar	Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat Sub Urusan Trantibum	Nilai	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.05.03.2.02.0018	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota
Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.							
Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.							
Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Terwujudnya Manajemen Bencana yang Terintegrasi, Pelayanan Satpol PP, Satlinmas, dan Pelayanan Pemadam	Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat Sub Urusan Trantibum	Nilai	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.05.03.2.02.0030	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota
Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.							

ASTA CITA	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	INDIKATOR	SATUAN	PROGRAM	KODE	SUBKEGIATAN
Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.		Kebakaran Sesuai Standar					
Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Terwujudnya Manajemen Bencana yang Terintegrasi, Pelayanan Satpol PP, Satlinmas, dan Pelayanan Pemadam Kebakaran Sesuai Standar	Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat Sub Urusan Kebakaran	Nilai	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.05.02.2.02.0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah
Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.							
Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.							
Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Terwujudnya Manajemen Bencana yang Terintegrasi, Pelayanan Satpol PP, Satlinmas, dan Pelayanan Pemadam Kebakaran Sesuai Standar	Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat Sub Urusan Kebakaran	Nilai	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	1.05.04.2.01.0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.							
Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.							

ASTA CITA	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	INDIKATOR	SATUAN	PROGRAM	KODE	SUBKEGIATAN
Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Tercapainya Indeks Kesejahteraan Sosial	Jumlah Keluarga Miskin Penerima Perlindungan Sosial yang Tergraduasi dari Kemiskinan	Keluarga	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	1.06.02.2.03.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Tercapainya Indeks Kesejahteraan Sosial	Jumlah Keluarga Miskin Penerima Perlindungan Sosial yang Tergraduasi dari Kemiskinan	Keluarga	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	1.06.02.2.03.0015	Fasilitasi Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah di Kabupaten/Kota melalui Pemberdayaan Ekonomi
Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Tercapainya Indeks Kesejahteraan Sosial	Jumlah Keluarga Miskin Penerima Perlindungan Sosial yang Tergraduasi dari Kemiskinan	Keluarga	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1.06.05.2.02.0006	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga
Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Tercapainya Indeks Kesejahteraan Sosial	Jumlah Keluarga Miskin Penerima Perlindungan Sosial yang Tergraduasi dari Kemiskinan	Keluarga	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1.06.05.2.02.0008	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Meningkatnya Kinerja Pembangunan Ketenagakerjaan	Jumlah lulusan pelatihan vokasi di lembaga pelatihan kerja swasta dan/atau OPD	Orang	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	2.07.03.2.01.0009	Proses Pelaksanaan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi
Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.							
Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Meningkatnya Kinerja Pembangunan Ketenagakerjaan	Peningkatan jumlah pekerja yang terlindungi program jaminan sosial tenaga kerja	Orang	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	2.07.05.2.01.0001	Pengesahan Peraturan Perusahaan
Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.							

ASTA CITA	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	INDIKATOR	SATUAN	PROGRAM	KODE	SUBKEGIATAN
Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Meningkatnya Kinerja Pembangunan Ketenagakerjaan	Jumlah pekerja pada Perusahaan yang Menerapkan Perlindungan Hak-hak Pekerja dan Dialog Sosial	Orang	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	2.07.05.2.02.0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja
Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.							
Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Meningkatnya efektivitas penanganan sesuai standar bagi korban KtP dan TPPO serta anak korban kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah lainnya	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	%	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	2.08.03.2.02.0010	Layanan Pendampingan Korban bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Kab/Kota
Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Meningkatnya efektivitas penanganan sesuai standar bagi korban KtP dan TPPO serta anak korban kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah lainnya	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	%	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	2.08.03.2.03.0013	Advokasi dan Sosialisasi Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kab/Kota
Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN	Meningkatnya efektivitas penanganan sesuai standar bagi korban KtP dan TPPO serta anak korban kekerasan,	Persentase Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	%	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	2.08.07.2.02.0016	Layanan Pendampingan Korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Kab/Kota

ASTA CITA	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	INDIKATOR	SATUAN	PROGRAM	KODE	SUBKEGIATAN
	PERLINDUNGAN ANAK	eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah lainnya					
Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Meningkatnya efektivitas penanganan sesuai standar bagi korban KtP dan TPPO serta anak korban kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah lainnya	Persentase Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	%	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	2.08.07.2.03.0015	Advokasi dan Sosialisasi Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kab/Kota
Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	Meningkatnya Ketahanan Pangan	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	Indeks	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	2.09.03.2.01.0007	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga
Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	Meningkatnya Ketahanan Pangan	Rasio Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah (CBPD) terhadap Target Jumlah CBPD Berdasarkan Ketentuan yang Berlaku	%	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	2.09.03.2.01.0008	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota
Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	Meningkatnya Ketahanan Pangan	Rasio Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah (CBPD) terhadap Target Jumlah CBPD Berdasarkan Ketentuan yang Berlaku	%	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	2.09.04.2.02.0002	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	Meningkatnya Ketahanan Pangan	Rasio Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah (CBPD) terhadap Target Jumlah CBPD Berdasarkan Ketentuan yang Berlaku	%	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	2.09.04.2.02.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota

ASTA CITA	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	INDIKATOR	SATUAN	PROGRAM	KODE	SUBKEGIATAN
Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Lingkungan Hidup Berkualitas	Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	%	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Lingkungan Hidup Berkualitas	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Poin	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.02.2.01.0006	Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota
Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Lingkungan Hidup Berkualitas	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Poin	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	2.11.06.2.01.0010	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Meningkatnya kualitas layanan kependudukan dan pencatatan sipil, serta pemanfaatan data kependudukan berbasis digital	Indeks kualitas layanan kependudukan dan pencatatan sipil berkategori "Sangat Baik"	Daerah	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	2.12.02.2.01.0002	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk

ASTA CITA	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	INDIKATOR	SATUAN	PROGRAM	KODE	SUBKEGIATAN
Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Meningkatnya kualitas layanan kependudukan dan pencatatan sipil, serta pemanfaatan data kependudukan berbasis digital	Indeks kualitas layanan kependudukan dan pencatatan sipil berkategori "Sangat Baik"	Daerah	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	2.12.02.2.01.0004	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk
Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Meningkatnya kualitas layanan kependudukan dan pencatatan sipil, serta pemanfaatan data kependudukan berbasis digital	Indeks kualitas layanan kependudukan dan pencatatan sipil berkategori "Sangat Baik"	Daerah	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	2.12.03.2.02.0004	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil
Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Meningkatnya Kemandirian Pedesaan yang Berkelanjutan yang didukung oleh Tata Kelola Pemerintahan Desa	Persentase Desa Mandiri	%	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	2.13.03.2.01.0001	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota
Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur							
Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Meningkatnya Kemandirian Pedesaan yang Berkelanjutan yang didukung oleh Tata Kelola Pemerintahan Desa	Persentase Indeks Tata Kelola Pemerintahan Desa dengan Kategori Baik	%	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	2.13.04.2.01.0005	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur							
Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN	Meningkatnya Kemandirian Pedesaan yang Berkelanjutan yang	Persentase Indeks Tata Kelola Pemerintahan Desa dengan Kategori Baik	%	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	2.13.04.2.01.0004	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa

ASTA CITA	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	INDIKATOR	SATUAN	PROGRAM	KODE	SUBKEGIATAN
Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	MASYARAKAT DAN DESA	didukung oleh Tata Kelola Pemerintahan Desa					
Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Terwujudnya Penyelenggaraan Program Bangga Kencana yang Berkualitas	Proporsi Kebutuhan KB yang Terpenuhi Menurut Alat/Cara KB Modern	%	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	2.14.03.2.03.0033	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya
Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Terwujudnya Penyelenggaraan Program Bangga Kencana yang Berkualitas	Proporsi Kebutuhan KB yang Terpenuhi Menurut Alat/Cara KB Modern	%	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	2.14.04.2.01.0033	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (Satyagatra)
Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Terwujudnya Penyelenggaraan Program Bangga Kencana yang Berkualitas	Proporsi Kebutuhan KB yang Terpenuhi Menurut Alat/Cara KB Modern	%	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	2.14.04.2.02.0008	Promosi dan Sosialisasi Program Pembangunan Keluarga
Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Terwujudnya Peningkatan Konektivitas Antar Wilayah dan Penurunan Angka Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Tingkat Keselamatan Transportasi di Daerah	%	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.							

ASTA CITA	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	INDIKATOR	SATUAN	PROGRAM	KODE	SUBKEGIATAN
Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Terwujudnya Peningkatan Konektivitas Antar Wilayah dan Penurunan Angka Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Rasio Konektivitas Simpul Transportasi di Daerah	Rasio	PROGRAM PENYELENGGARAA N LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	2.15.02.2.03.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)
Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.							
Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Terakselerasinya Transformasi Pemerintah Digital di Daerah	Indeks Komunikasi Pembangunan dan Informasi Publik	Nilai	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	2.16.02.2.01.0026	Sosialisasi/Diseminasi Informasi serta Pengelolaan Media Komunikasi Publik
Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.							
Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Terakselerasinya Transformasi Pemerintah Digital di Daerah	Indeks Komunikasi Pembangunan dan Informasi Publik	Nilai	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	2.16.02.2.01.0029	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini Publik, dan Aspirasi Publik
Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.							
Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Terakselerasinya Transformasi Pemerintah Digital di Daerah	Indeks Pemerintah Digital (Pemdi)	Nilai	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	2.16.03.2.02.0040	Penyediaan Akses Internet
Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.							
Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Terakselerasinya Transformasi Pemerintah Digital di Daerah	Indeks Pemerintah Digital (Pemdi)	Nilai	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	2.16.03.2.02.0042	Koordinasi Pengelolaan Aplikasi, Data/Informasi, dan Layanan Pemerintah Daerah Berbasis Elektronik yang Terintegrasi
Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.							

ASTA CITA	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	INDIKATOR	SATUAN	PROGRAM	KODE	SUBKEGIATAN
Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	Meningkatnya Produktivitas Koperasi dan UMKM	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB	%	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	2.17.06.2.01.0005	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha
Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	Meningkatnya Produktivitas Koperasi dan UMKM	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB	%	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	2.17.07.2.01.0018	Peningkatan Kompetensi dan Kapasitas SDM Usaha Mikro dan Kecil (UMK)/Pelaku Usaha
Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	Meningkatnya Produktivitas Koperasi dan UMKM	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB	%	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	2.17.07.2.01.0023	Fasilitasi Integrasi Basis Data Tunggal UMKM
Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	Pencapaian Target realisasi Penanaman Modal	Nilai Realisasi Penanaman Modal	Triliun Rupiah	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal
Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	Pencapaian Target realisasi Penanaman Modal	Nilai Realisasi Penanaman Modal	Triliun Rupiah	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	2.18.05.2.01.0007	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya
Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Meningkatnya Kualitas Pemuda, Budaya Olahraga yang Inklusif, dan Prestasi Olahraga	Indeks Pembangunan Pemuda	Nilai	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	2.19.02.2.01.0019	Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/Kota

ASTA CITA	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	INDIKATOR	SATUAN	PROGRAM	KODE	SUBKEGIATAN
Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Meningkatnya Kualitas Pemuda, Budaya Olahraga yang Inklusif, dan Prestasi Olahraga	Indeks Pembangunan Pemuda	Nilai	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	2.19.02.2.02.0005	Penyelenggaraan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota
Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Meningkatnya Kualitas Pemuda, Budaya Olahraga yang Inklusif, dan Prestasi Olahraga	Persentase Olahragawan dalam Pemusatan Latihan (Nasional/Daerah) yang Berprestasi di Tingkat (Nasional)/Internasional	%	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	2.19.03.2.04.0008	Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di kabupaten/kota
Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	Menguatnya Keamanan Siber dan Sandi Lingkungan Pemerintah Daerah	Persentase Tingkat Kematangan Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah	%	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	2.21.02.2.01.0010	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik
Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	Menguatnya Keamanan Siber dan Sandi Lingkungan Pemerintah Daerah	Persentase Tingkat Kematangan Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah	%	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	2.21.02.2.01.0010	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik
Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	Peningkatan Indeks Pemajuan Kebudayaan (IPK)	Persentase Penduduk Usia 10 Tahun ke Atas yang Menonton Pertunjukan Seni	%	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	2.22.08.5.07.0006	Gelar Budaya Jogja

ASTA CITA	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	INDIKATOR	SATUAN	PROGRAM	KODE	SUBKEGIATAN
Memperkuat penyelaras kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur							
Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	Peningkatan Indeks Pemajuan Kebudayaan (IPK)	Persentase Penduduk 10 Tahun ke Atas yang Pernah Terlibat Sebagai Pelaku/Pendukung Pertunjukan Seni	%	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	2.22.08.5.02.000	Pengembangan Cagar Budaya dan Warisan Budaya
Memperkuat penyelaras kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur							
Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	Meningkatnya Kegemaran Membaca dan Literasi Masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	2.23.02.2.01.0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan
Memperkuat penyelaras kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur							
Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	Meningkatnya Kegemaran Membaca dan Literasi Masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	2.23.02.2.01.0013	Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota

ASTA CITA	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	INDIKATOR	SATUAN	PROGRAM	KODE	SUBKEGIATAN
Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur							
Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	Meningkatnya Kegemaran Membaca dan Literasi Masyarakat	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	2.23.03.2.01.0003	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno
Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur							
Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	Meningkatnya Kegemaran Membaca dan Literasi Masyarakat	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	2.23.03.2.01.0004	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan
Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur							
Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	Meningkatnya Tertib Arsip dan Mengembangkan Memori Kolektif Bangsa	Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan di lingkup Pemerintahan Daerah	Nilai	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	2.24.02.2.01.0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota

ASTA CITA	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	INDIKATOR	SATUAN	PROGRAM	KODE	SUBKEGIATAN
Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	Meningkatnya Tertib Arsip dan Mengembangkan Memori Kolektif Bangsa	Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan di lingkup Pemerintahan Daerah	Nilai	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	2.24.02.2.03.0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN
Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	Terwujudnya Tata Kelola Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan	Produksi Perikanan Budidaya	Ton	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	3.25.04.2.04.0004	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	Terwujudnya Tata Kelola Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan	Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan	%	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.05.2.01.0004	Pengawasan usaha pembudidayaan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota
Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	Terwujudnya Tata Kelola Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan Sektor Perikanan	Miliar Rupiah	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.05.2.01.0004	Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Sesuai Kewenangan Kabupaten/Kota
Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	Terwujudnya Tata Kelola Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan Sektor Perikanan	Miliar Rupiah	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.05.2.01.0006	Pengawasan Usaha Pemasaran Hasil Perikanan dan/atau Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Sesuai Kewenangan Kabupaten/Kota
Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	Meningkatnya Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional	Rasio PDB Pariwisata	%	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	3.26.03.2.01.0007	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri

ASTA CITA	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	INDIKATOR	SATUAN	PROGRAM	KODE	SUBKEGIATAN
Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	Meningkatnya Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif Terhadap PDB Ekonomi Kreatif Nasional	%			
Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	Meningkatnya Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif Terhadap PDB Ekonomi Kreatif Nasional	%	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	3.26.04.2.02.0014	Fasilitasi Penguatan Kekayaan Intelektual
Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	Meningkatnya Produksi Pertanian	Jumlah Produksi Padi	Ton	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	3.27.02.2.01.0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi
Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	Meningkatnya Produksi Pertanian	Jumlah Produksi Padi	Ton	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	3.27.02.2.01.0003	Perbanyak Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih
Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	Meningkatnya Produksi Pertanian	Luasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan	Hektar	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	3.27.03.2.01.0015	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota
Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	Meningkatnya Perdagangan melalui Integrasi Rantai Pasar Domestik dan Global	Nilai Ekspor Barang di Provinsi	SBM/Milyar Rupiah	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	3.30.04.2.02.0002	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan

ASTA CITA	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	INDIKATOR	SATUAN	PROGRAM	KODE	SUBKEGIATAN
Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	Meningkatnya Perdagangan melalui Integrasi Rantai Pasar Domestik dan Global	Nilai Pembelian Perdagangan Antar Wilayah di Provinsi	Rp. Juta Per Tahun	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	3.30.05.2.01.0005	Peningkatan Citra Produk Ekspo
Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	Meningkatnya Peran Industri Dalam Perekonomian Nasional	Rasio Industri Pengolahan Nonmigas Terhadap PDRB	%	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	3.31.02.2.01.0001	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota
Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	Meningkatnya Peran Industri Dalam Perekonomian Nasional	Rasio Industri Pengolahan Nonmigas Terhadap PDRB	%	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	3.31.02.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat
Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	Meningkatnya Peran Industri Dalam Perekonomian Nasional	Pertumbuhan PDRB Industri Pengolahan Nonmigas	%	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	3.31.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha Sektor Perindustrian yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota
Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	Meningkatnya Peran Industri Dalam Perekonomian Nasional	Pertumbuhan PDRB Industri Pengolahan Nonmigas	%	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	3.31.03.2.01.0004	Fasilitasi Verifikasi Pemenuhan Persyaratan/Standar Kegiatan Usaha Sektor Perindustrian Dalam Rangka Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)
Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	Mewujudkan transformasi kawasan transmigrasi menjadi pusat pertumbuhan lokal berbasis sinergi	Persentase Dukungan Kegiatan Pemerintah Daerah yang Dilaksanakan di Kawasan Transmigrasi	%	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	3.32.03.2.01.0005	Penyuluhan Transmigrasi

ASTA CITA	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	INDIKATOR	SATUAN	PROGRAM	KODE	SUBKEGIATAN
		dan kolaborasi lintas sektor					
Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	Mewujudkan transformasi kawasan transmigrasi menjadi pusat pertumbuhan lokal berbasis sinergi dan kolaborasi lintas sektor	Persentase Dukungan Kegiatan Pemerintah Daerah yang Dilaksanakan di Kawasan Transmigrasi	%	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	3.32.03.2.01.0006	Pelatihan Transmigrasi
Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Meningkatnya Kualitas Stabilitas Politik dan Demokrasi Indonesia serta Implementasi Nilai-nilai Ideologi Pancasila, Wawasan kebangsaan, ketahanan ekonomi dan sosial budaya, serta kewaspadaan nasional	Indeks Demokrasi Indonesia	Indeks	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	8.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.							
Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.							
Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Meningkatnya Kualitas Stabilitas Politik dan Demokrasi Indonesia serta Implementasi Nilai-nilai Ideologi Pancasila, Wawasan kebangsaan, ketahanan ekonomi dan sosial budaya,	Indeks Kewaspadaan Nasional	Nilai	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	8.01.06.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah

ASTA CITA	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	INDIKATOR	SATUAN	PROGRAM	KODE	SUBKEGIATAN
Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).		serta kewaspadaan nasional					
Memperkuat penyesuaian kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.							
Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.							

Sumber: RKPD, 2026

Pemerintah Daerah memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian Asta Cita selain melalui Pro-SN dan *outcome* prioritas penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, diantaranya melalui kegiatan yang bersifat direktif pemerintah yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden dan/atau Instruksi Presiden sebagai program prioritas yang bersifat lintas sektor dan lintas wilayah, berdampak luas terhadap pertumbuhan dan pemerataan pembangunan, serta keberlanjutan pembangunan. Beberapa direktif pemerintah yang didukung oleh Pemerintah Kabupaten Bantul antara lain:

1. Konektivitas Jalan Daerah.

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2025 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah untuk Mendukung Swasembada Pangan dan Energi merupakan strategi untuk mempercepat perbaikan dan pembangunan jalan daerah guna mendukung swasembada pangan dan energi. Sejalan dengan Inpres di atas, Kabupaten Bantul telah menetapkan Program Unggulan Daerah, salah satunya adalah Peningkatan kemantapan jalan kabupaten, yang bertujuan untuk memperkuat konektivitas antarwilayah, memperlancar mobilitas warga, serta memacu pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif.

2. Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Kabupaten Bantul mempercepat capaian *Universal Coverage* Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dengan peningkatan minimal 20% (dua puluh persen) dari tahun sebelumnya. Upaya yang dilakukan salah satunya dengan menerbitkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 33 Tahun 2025 Tentang Bantuan Keuangan Program Pemberdayaan Berbasis Masyarakat Padukuhan, disebutkan pada pasal (4) bahwa bantuan keuangan dapat dimanfaatkan untuk bantuan iuran jaminan sosial ketenagakerjaan yang berupa jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian bagi pekerja pencari nafkah utama dari keluarga miskin atau sangat miskin.

3. Pengelolaan Sampah Menjadi Energi Ramah Lingkungan

Kabupaten Bantul dalam penanganan kedaruratan sampah perkotaan terlibat dalam pengolahan sampah menjadi energi terbarukan berbasis teknologi ramah lingkungan di DIY. Pengelolaan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) ini merupakan program dari Pemerintah Pusat berdasar pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109

Tahun 2025 Tentang Penanganan Sampah Perkotaan melalui Pengelolaan Sampah menjadi Energi Terbarukan Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan. Kota Yogyakarta sebagai pengusul PSEL akan melakukan MoU dengan Kabupaten Sleman dan Bantul dan ditindaklanjuti Perjanjian Kerja Sama dengan koordinasi oleh DIY. PSEL direncanakan berada di wilayah Kabupaten Bantul tepatnya di ex- TPA Piyungan, Ds Ngablak Kelurahan Sitimulyo Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan pemegang Hak Tanah adalah Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. PSEL bertujuan untuk menyelesaikan sampah di 3 wilayah di DIY, yaitu Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul dan Kabupaten Sleman. Sejalan dengan PP di atas, Kabupaten Bantul menetapkan Program Unggulan Daerah yaitu Penuntasan pengelolaan sampah dengan pemanfaatan teknologi modern, budaya bersih dan penegakan hukum

4. Percepatan Pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP)

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan KDKMP dan Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan dan Kelengkapan KDKMP, yang diantaranya bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat di desa melalui peningkatan potensi ekonomi lokal, meningkatkan kesejahteraan sosial-ekonomi masyarakat desa melalui lembaga kemasyarakatan yang kuat, dan mewujudkan pemerataan pembangunan antardesa dengan partisipasi aktif masyarakat.

Kabupaten Bantul telah memiliki Peraturan Bupati Bantul Nomor 35 Tahun 2025 tentang Koperasi Desa Merah Putih, peraturan ini dibentuk untuk mendorong pemerataan ekonomi di tingkat Kalurahan dengan memberikan kemudahan, pemberdayaan, dan perlindungan bagi koperasi. Selain Peraturan Bupati di atas, Pemerintah Kabupaten Bantul mengeluarkan Keputusan Bupati Bantul Nomor 672 Tahun 2025 Tentang Pembentukan Satuan Tugas Kapanewon Dalam Percepatan Pembentukan dan Pengembangan Koperasi Desa Merah Putih.

Bupati Bantul telah melayangkan surat permohonan izin pemanfaatan tanah kalurahan kepada Gubernur DIY untuk pembangunan gerai di 29 kalurahan, dengan tujuan agar pembangunan gerai Koperasi Merah Putih segera terwujud.

Bupati Bantul juga mengeluarkan Surat Edaran Bupati Nomor B/400.1.5.3/04693/DPMK Tentang Dukungan Pembayaran Simpanan Wajib dan Simpanan Pokok Anggota Koperasi Desa Merah Putih Bagi Warga Miskin Melalui Program Program Pemberdayaan Berbasis Masyarakat Pedukuhan. Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan dukungan Program PPBMP untuk membantu warga miskin dalam membayar simpanan pokok dan simpanan wajib keanggotaan Koperasi Desa Merah Putih, dengan tujuan:

- Membuka akses bagi warga miskin untuk menjadi anggota koperasi.
- Mengurangi beban ekonomi warga miskin melalui dukungan pembayaran simpanan awal.
- Meningkatkan kemandirian ekonomi desa berbasis koperasi.
- Memperkuat kelembagaan Koperasi Desa Merah Putih sebagai wadah ekonomi kerakyatan.

5. Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (MRPN).

Dalam rangka menjamin tercapainya target kinerja pembangunan daerah sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD dan RKPD, Pemerintah Daerah wajib mengintegrasikan Manajemen Risiko Pembangunan. Pemerintah Kabupaten Bantul telah menerbitkan Peraturan Bupati Nomor 85 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Resiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul, yang memuat penilaian risiko atas:

- a. tujuan strategis Pemerintah Daerah;
- b. tujuan strategis (entitas) Perangkat Daerah/unit kerja; dan
- c. tujuan operasional (kegiatan) Perangkat Daerah /unit kerja.

Penilaian risiko atas tujuan strategis Pemda dilaksanakan bersamaan dengan proses penyusunan RPJMD atau segera setelah diselesaikannya RPJMD, penilaian risiko atas tujuan strategis (entitas) Perangkat Daerah dilaksanakan bersamaan dengan proses penyusunan renstra Perangkat Daerah atau segera setelah diselesaikannya renstra Perangkat Daerah dan penilaian risiko atas tujuan operasional (kegiatan) Perangkat Daerah/unit kerja dilaksanakan bersamaan dengan proses penyusunan RKA Perangkat Daerah atau segera setelah diselesaikannya RKA Perangkat Daerah.

Pembentukan dan rincian tugas struktur Pengelola Risiko di Kabupaten Bantul telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Nomor

541 Tahun 2022 tentang Pembentukan Struktur Pengelola Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul dimana yang mengamanatkan bahwa Koordinator Penyelenggaraan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah adalah Sekretaris Daerah, dengan tugas:

- a. menetapkan kebijakan penerapan Pengelolaan Risiko;
- b. menetapkan petunjuk pelaksanaan Pengelolaan Risiko; dan
- c. melakukan pemantauan dan evaluasi efektivitas penerapan Pengelolaan Risiko.

Sedangkan pengelolaan risiko dilakukan melalui pengembangan Budaya Sadar Risiko, pembentukan Struktur Pengelola Risiko dan penyelenggaraan Proses Pengelolaan Risiko.

Dalam rangka percepatan perwujudan **Prioritas Daerah (PD)** Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029, terdapat **13 Program Unggulan Daerah Tahun 2025-2029** yang meliputi:

1. Peningkatan kemantapan jalan kabupaten.
2. Swasembada pangan melalui pembebasan PBB lahan pertanian pangan berkelanjutan serta fasilitasi pembuatan pupuk organik dan benih tanaman pangan dan hortikultura.
3. Penguatan Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Padukuhan (PPBMP) untuk penanganan masalah strategis kewilayahan padukuhan.
4. Pembangunan dan pengembangan destinasi pariwisata unggulan dan fasilitas olahraga *jogging track*.
5. Penuntasan pengelolaan sampah dengan pemanfaatan teknologi modern, budaya bersih dan penegakan hukum.
6. Peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui penciptaan lapangan kerja dan wirausahawan muda serta pembangunan kawasan industri.
7. Penataan dan pengembangan kawasan pantai selatan dan restorasi kawasan gumuk pasir.
8. Optimalisasi peran dan fungsi relawan untuk penanganan masalah kemanusiaan dan masalah sosial.
9. Pengembangan SDM birokrasi yang kreatif dan kolaboratif serta penuntasan reformasi pelayanan publik.
10. Perluasan jaringan telekomunikasi untuk mendukung pengembangan layanan digital dan peningkatan keamanan.

- 11. Penguatan layanan kesehatan promotif, preventif, peningkatan status gizi masyarakat dan pencegahan *stunting*.
- 12. Peningkatan kualitas pendidikan melalui pemenuhan sarana prasarana, profesionalitas guru dan tenaga kependidikan serta bantuan bagi pelajar berprestasi.
- 13. Pelestarian budaya untuk mendukung pariwisata serta penguatan nilai guyub rukun dan gotong royong untuk mewujudkan keharmonisan dan ketenteraman masyarakat.

Program unggulan tersebut diterjemahkan kedalam program perangkat daerah yang memiliki kesamaan atau kemiripan *outcome* yang akan dihasilkan. Daftar program perangkat daerah yang mendukung pelaksanaan program unggulan tersebut disajikan pada tabel di bawah.

Tabel 7.4 Program Unggulan Daerah Tahun 2027

No	Program Unggulan	PROGRAM	Perangkat Daerah
1	Peningkatan kemantapan jalan kabupaten.	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	DPUPKP
2	Swasembada pangan melalui pembebasan PBB lahan pertanian pangan berkelanjutan serta fasilitasi pembuatan pupuk organik dan benih tanaman pangan dan hortikultura.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	BPKPAD
		1. PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN 2. PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	DKPP
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	DPTR
3	Penguatan Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Padukuhan (PPBMP) untuk penanganan masalah strategis kewilayahan padukuhan.	1. PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 2. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Dinas Kesehatan
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	DP3APPKB
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Dinas Sosial
		PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	DPMKa1
4	Pembangunan dan pengembangan destinasi pariwisata unggulan dan fasilitas olahraga jogging track.	1. PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA 2. PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA	Dinas Pariwisata

No	Program Unggulan	PROGRAM	Perangkat Daerah
		PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	
		PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	DLH
5	Penuntasan pengelolaan sampah dengan pemanfaatan teknologi modern, budaya bersih dan penegakan hukum.	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	DLH
		PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Satpol PP
6	Peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui penciptaan lapangan kerja dan wirausahawan muda serta pembangunan kawasan industri.	1. PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI 2. PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI 3. PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	DKUKMPP
		1. PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL 2. PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	DPMPTSP
		1. PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA 2. PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Dinas Nakertrans
7	Penataan dan pengembangan kawasan pantai selatan dan restorasi kawasan gumuk pasir.	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Bappeda
		PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN***	Dinas Kominfo
		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Dinas Pariwisata
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	DKP
		1. PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM 2. PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	DKUKMPP

No	Program Unggulan	PROGRAM	Perangkat Daerah
		PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	DLH
		PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG***	BPBD
		PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG***	DPUPKP
		1. PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) 2. PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG***	Dinas Perhubungan
		PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN***	DPTR
		PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN***	Dinas Kebudayaan
		PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG***	Satpol PP
8	Optimalisasi peran dan fungsi relawan untuk penanganan masalah kemanusiaan dan masalah sosial.	1. PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL 2. PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL 3. PROGRAM REHABILITASI SOSIAL 4. PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Dinas Sosial
		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	BPBD
9	Pengembangan SDM birokrasi yang kreatif dan kolaboratif serta penuntasan reformasi pelayanan publik.	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	BKPSDM
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Setda
10	Perluasan jaringan telekomunikasi untuk mendukung pengembangan layanan	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Dinas Kominfo

No	Program Unggulan	PROGRAM	Perangkat Daerah
	digital dan peningkatan keamanan.		
11	Penguatan layanan kesehatan promotif, preventif, peningkatan status gizi masyarakat dan pencegahan stunting.	1. PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 2. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Dinas Kesehatan
12	Peningkatan kualitas pendidikan melalui pemenuhan sarana prasarana, profesionalitas guru dan tenaga kependidikan serta bantuan bagi pelajar berprestasi.	1. PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 2. PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Dinas Dikpora
13	Pelestarian budaya untuk mendukung pariwisata serta penguatan nilai guyub rukun dan gotong royong untuk mewujudkan keharmonisan dan ketenteraman masyarakat.	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kapanewon
		PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN***	Dinas Pariwisata
		PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN***	Dinas Kebudayaan
		1. PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 2. PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN***	Satpol PP
		PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Bakesbangpol

Sumber: RKPD, 2026

Strategi pencapaian target indikator ekonomi makro yang akan dilakukan antar lain sebagai berikut:

1. Merumuskan inovasi kebijakan penanggulangan pengangguran dan kemiskinan yang efektif, adaptif, dan berkelanjutan.
2. Menjaga laju inflasi pada tingkat yang terkendali guna mempertahankan stabilitas ekonomi makro serta mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
3. Mengakselerasi pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan dan penguatan sektor-sektor unggulan serta lapangan usaha andalan daerah.
4. Meningkatkan daya saing daerah dalam mendukung pembangunan kawasan strategis sebagai bagian dari prioritas pembangunan kewilayahan.
5. Meningkatkan daya saing ekonomi daerah, kualitas dan daya saing tenaga kerja, serta memperkuat iklim dan daya saing investasi.
6. Meningkatkan produktivitas sektor-sektor ekonomi dan promosi daerah melalui penguatan kemitraan antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat.
7. Mengembangkan program pemberdayaan bagi usaha mikro, termasuk percepatan digitalisasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
8. Memperkuat peran koperasi sebagai pilar pengembangan ekonomi kerakyatan.
9. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi untuk mengintegrasikan data dan informasi lintas sektor dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik, kompetensi dan produktivitas tenaga kerja, serta mendorong pengembangan riset dan inovasi guna meningkatkan daya saing daerah.
10. Memperkuat kapasitas fiskal daerah melalui optimalisasi pendapatan daerah, peningkatan kualitas belanja daerah, penguatan sinergi pembiayaan pembangunan, serta pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

BAB VIII

PENUTUP

Demikian Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Tahun Anggaran 2027 ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2027.

Bantul, 10 Agustus 2026

PIMPINAN DPRD

KETUA DPRD KABUPATEN BANTUL
HANUNG RAHARJO

BUPATI BANTUL

BUPATI KABUPATEN BANTUL
ABDUL HALIM MUSLIH